BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pemilihan bahasa (*language choice*) lazimnya lahir akibat penggunaan bahasa dalam suatu masyarakat bilingual (dwibahasa) atau multilingual (multibahasa). Menurut Fasold (1984), timbulnya pemilihan bahasa disebabkan oleh terjadinya kontak bahasa, sosial, dan budaya sehingga tumbuh kelompok masyarakat tutur yang memiliki kemampuan untuk memilih bahasa atau kode bahasa dalam peristiwa tertentu, baik mempertahankan bahasa pertama maupun melakukan pergeseran bahasa ke bahasa baru atau mencampurkan bahasa pertama dan bahasa baru.

Kontak bahasa, sosial, dan budaya antaretnis merupakan implikasi langsung dari mobilitas penduduk dari suatu wilayah geografis satu ke wilayah lainnya. Saat demikian terjadi pula gerakan wilayah pakai bahasa sehingga terdapat wilayah pakai bahasa yang meluas dan menyempit, bahkan ada wilayah pakai bahasa yang hilang sama sekali dan menjadi wilayah pakai bahasa lain. Tendensinya ialah bahwa bahasa-bahasa mayoritas dipelajari oleh penutur bahasa lain yang pada gilirannya melahirkan situasi masyarakat bilingual atau multilingual.

Tingginya frekwensi mobilitas horizontal anggota masyarakat, karena itu, memungkinkan terbentuknya masyarakat multilingual dan/atau multietnis. Situasi demikian cenderung mendorong kelompok masyarakat tertentu untuk menguasai dua bahasa atau lebih, baik sepenuhnya atau sebagian sesuai kebutuhannya. Karena itu, dalam kenyataan, terdapat anggota masyarakat yang menguasai bahasa daerahnya

MILIK
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA

sebagai bahasa pertama dan bahasa Indonesia sebagaiu bahasa kedua—ada juga yang menguasai bahasa daerah lain dan bahasa asing selain bahasa pertama dan kedua.

Masyarakat Perumnas Kota Baru Driyorejo (KBD) Gresik terlibat dalam berbagai kontak sosial dan budaya dalam situasi kebahasaan yang bilingual/ multilingual. Mereka berasal dari berbagai daerah dan etnis yang membawa serta bahasa daerahnya masing-masing, sehingga di tempat baru ini mereka mau tak mau melakukan pemilihan bahasa dalam kehidupan sosialnya. Pemilihan bahasa ini bisa menimbulkan tindakan berupa pemertahanan dan pergeseran bahasa daerahnya, atau pengakomodasian bahasa baru ke dalam bahasa daerahnya untuk menjadi semacam kode bahasa campuran (*code-mixing*).

Memang, dalam interaksi antaretnis di Perumnas KBD Gresik ada tendensi dipakainya bahasa Indonesia baik situasi formal maupun informal, untuk tetap membangun komunikasi yang berimbang. Sementara itu, dalam interaksi intra-etnis masing-masing etnis memakai bahasa daerahnya masing-masing. Akan tetapi, tak jarang dijumpai kelompok masyarakat yang cenderung "memaksakan" dipakainya bahasa-daerahnya sendiri dalam situasi kebahasaan yang melibatkan etnis lain yang minoritas.

Studi terdahulu tentang pemilihan bahasa banyak ditinjau dari Sosiolinguistik; sementara itu studi dalam perspektif sosiologi dan psikologi sosial masih belum banyak dilakukan. Dalam perspektif perilaku individu dalam struktur masyarakat, Giles, Bourish dan Taylor (dalam Giles 1977:307-349) meneliti bahasa Inggris orang Amerika kulit hitam dan bahasa Inggris orang Amerika kulit putih ketika keduanya

bertemu dan berbicara. Penelitian itu untuk memahami loyalitas penutur pada kelompoknya sendiri dan membedakannya dengan kelompok lain. Penelitian itu kemudian mempopulerkan Howard Giles dalam blantika sosiolinguistik dengan Teori Akomodasi-nya.

Kita juga dapat merujuk pada karya klasik William Labov (1972) mengenai pulau Martha's Vineyard di lepas pantai Massachusetts, Amerika Serikat. Di pulau itu, pada setengah penutur terdapat ciri pelafalan diftong bahwa (ay) dan (aw) yang terpusatkan, sedangkan pada yang lain pelafalannya lebih mirip dengan pelafalan dua diftong itu di daratan. Ternyata, pemusatan menandakan bahwa si penutur berorientasi pada pulau itu dan tajk bermaksud meninggalkannya, sedangkan tidak adanya pemusatan menandakan bahwa si penutur berorientasi pada daratan dan ingin meninggalkan pulau itu. Aspirasi telah cukup untuk secara tak sadar membuatnya mengubah lafal.

Labov (1966) juga pernah melakukan pengkajian terhadap pelayan toko di kota New York, dan menemukan bahwa makin bergengsi tokonya, maka makin banyak pelayan yang mengucapkan bunyi bahasa Inggris (r) pascavokal dengan jelas.

Dalam konteks Indonesia, Octomo (1989) mengkaji masyarakat perumahan KPR/BTN di Surabaya, yang menemukan munculnya kelas menengah baru di kawasan perumahan perkotaan Surabaya, yang disertai oleh adanya pergeseran pemakaian bahasa. Menurutnya, kelas menengah baru merujuk pada kelompok masyarakat yang "telah menjadi" dan "beraspirasi untuk menjadi" kelas menengah. Setiawan (2001) juga menemukan bahwa masyarakat bilingual Jawa Timur sedang

mengalami pergeseran bahasa secara gradual menuju pemakaian bahasa Indoneia. Bahasa Jawa hanya dominan digunakan di rumah, tempat ibadah, dan di sekolah antar teman— meski masih juga digunakan dengan anggota (dalam) kelompok dan dengan generasi lebih tua. Penyumbang pergeseran bahasa paling kuat adalah keluarga-keluarga kawin campur dan generasi muda. Bahasa Jawa tidak lagi dianggap sebagai bahasa efektif untuk komunikasi tulis.

Sementara itu, dalam perspektif psikologi sosial, Koiri & Fahri (1991) meneliti sikap-perilaku masyarakat Jawa urban di Surabaya. Mereka menemukan, antara lain bahwa masyarakat urban menunjukkan empat tipe perilaku bahasa: (i) adaptasi dan integrasi sosial dengan dialek Surabaya; (ii) divergensi berbahasa (linguistik atau psikologis) yang agak antipati terhadap dialek Surabaya; (iii) pencampuran dialek asal daerah dan dialek Surabaya; dan (iv) pemakaian bahasa Indonesia.

Studi-studi di atas—di luar Labov (1966, 1972) dan Giles et al (1977)—telah memetakan pemilihan bahasa dan pola-pola penggunaan bahasa daerah (Jawa) serta faktor-faktor penyebabnya, dalam kaitannya dengan bahasa Indonesia pada situasi kebahasaan yang baru. Akan tetapi, ada beberapa hal yang belum terungkap dalam studi-studi terdahulu terutama yang menyangkut penggunaan bahasa Jawa dalam masyarakat multilingual (selain berbahasa Jawa, juga ada yang berbahasa Indonesia, bahasa Madura, Sunda, Ambon, dan Batak), yang mendorong studi ini hendak dilakukan di Perumnas KBD Gresik.

Pertama, ditinjau dari karakter *setting* penelitian, Perumnas KBD Gresik berbeda dengan lokasi penelitian Koiri & Fahri (1991) dan Setiawan (2001) yang

menggambarkan adanya masyarakat tutur yang sudah jadi (*established*). Di Perumnas KBD Gresik masyarakat tuturnya (yang kebanyakan termasuk keluarga-keluarga muda) belum terbentuk utuh dan sempurna, atau masih mengalami dinamika dan proses penemuan identitas dan jatidiri. Sebagaimana disinggung di muka, mereka berasal dari berbagai etnik yang membawa serta bahasa daerahnya masing-masing; sehingga di Perumnas ini mereka harus melakukan 'tawar-menawar' dalam penggunaan bahasa (daerah) mereka, dan kemudian melakukan pemilihan bahasa untuk kehidupan dan interaksi sosialnya. Sementara itu, jika dibandingkan dengan studi Oetomo (1989), *setting* penelitian di Perumnas KBD Gresik ini lebih beragam dalam menunjukkan stratifikasi sosial penghuninya. Penataan rumah per kawasan disusun secara berlapis-lapis dari yang terbesar (Tipe 70 ke atas, yang dekat dengan jalan besar) sampai yang terkecil (Tipe RSS 21, yang masuk ke gang-gang kecil). Meski sama-sama ber-*setting* perumahan, karakternya berbeda: Oetomo meneliti di perumahan KPR/BTN di pinggiran Surabaya yang cukup elit dan kemudian menemukan kelas menengah baru yang disertai pergeseran bahasa (bahasa daerah ke bahasa Indonesia), sedangkan Perumnas KBD Gresik adalah perumahan di perbatasan Surabaya Barat-Gresik yang kurang elit tetapi terdiri atas beraneka-ragam tipe rumah.

Kedua, dalam proses migrasi ke Perumnas KBD Gresik, suatu tempat hunian yang sama sekali baru, tentulah mereka mengalami keterkejutan budaya dan bahasa, sekiranya lebih hebat daripada di lokasi penelitian sebelumnya. Mungkin bisa dikatakan bahwa pada hakikatnya mereka sedang atau telah mengalami "krisis identitas (kebahasaan)" di tempat yang baru. Mereka memiliki pola asosiasi dengan

lingkungan baru, baik dengan strategi penyatuan dengan orang sekampung, interaksi antar karakter budaya, maupun konflik dengan kelompok sosial lain (Gilbert & Gugler 1996:164). Dalam konteks komunikasi, untuk melakukan asosiasi ini mereka mereka harus mengidentifikasi bahasa apa yang digunakan agar identitasnya menjadi jelas dan diakui secara sosial. Dan semua ini tidaklah selalu mudah bagi masyarakat di lingkungan baru.

Ketiga, penelitian di Perumnas KBD Gresik memfokuskan diri pada pola pemilihan bahasa yang berbeda dibanding penelitian Oetomo (1989) dan Setiawan (2001) yang masing-masing mengidentifikasi bahasa Jawa dan bahasa Indonesia. Penelitian di Perumnas KBD Gresik ini lebih disejalankan dengan pola pemilihan bahasa masyarakat multilingual model Howard Giles (1979) dan Ralph Fasold (1984) dan pengadaptasian temuan Koiri & Fahri (1991) di atas, yakni: (1) penggunaan bahasa yang sama (*intra-language variation*) yakni penggunaan bahasa Jawa/daerah, (2) campur kode (*code-mixing*) yakni penggunaan campuran bahasa Jawa dan bahasa Indonesia, dan (3) alih kode (*code switching*) yakni peggunaan bahasa Indonesia. Hal ini diharapkan akan lebih jelas mengungkapkan kecenderungan "tengah" dalam pola pemilihan bahasa, mengingat keluarga-keluarga (muda) di Perumnas KBD Gresik tampaknya menerapkan sosialisasi bahasa dengan pola campuran ini.

Keempat, penelitian ini mengambil faktor-faktor pengaruh yang belum secara khusus diungkap dalam penelitian sebelumnya. Faktor-faktor berpengaruh yang dikaji dalam penelitian ini dalam kaitannya dengan pemilihan bahasa adalah stratifikasi sosial yang "dimediasi" atau diperantarai oleh sikap bahasa dan kompetensi

komunikatif. Oetomo (1989) hanya menyinggung sedikit tentang strata sosial dan "stratifikasi sosial bahasa", tetapi tidak mengkaji secara detil pengaruhnya terhadap pemilihan bahasa. Koiri & Fahri (1991) hanya menonjolkan faktor geografis, waktu tinggal, integrasi, jarak sosial dan pendidikan. Sementara itu, Setiawan (2001), selain tidak mengkaji stratifikasi sosial, juga tidak menyinggung hubungan sikap bahasa dan kompetensi komunikatif dengan pemilihan bahasa, meskipun dia menggunakan sikap bahasa untuk meneropong pemilihan bahasa dalam ranah keluarga.

Kelima, berdasarkan observasi yang seksama di berbagai fora temu warga dan peristiwa tutur, peneliti mencatat bahwa kendala bahasa berakibat serius pada integrasi sosial (pergaulan) mereka. Ada penutur bahasa Jawa yang sangat *totok* angkat bicara dalam bahasa Indonesia di dalam forum rapat warga di lingkungan RT-nya, tentu saja dengan logat Jawa yang kental. Bahasanya lama-lama menjadi stereotipe unik bagi penutur itu: bahasa Indonesia yang disertai "kramanisasi". Karena label stereotipe yang kurang sedap, akhirnya dia menjadi enggan untuk angkat bicara dalam forum yang sama. Ternyata, peristiwa yang mirip dengan kasus tersebut juga terjadi di tempat-tempat lain dalam lingkungan Perumnas KBD Gresik, baik ketika penutur bahasa Jawa itu berkomunikasi dengan sesama orangt Jawa, maupun ketika berkomunikasi dengan etnis Madura, Batak, Ambon, dan/atau Sunda. Kegaguan dan kekakuan dalam berbahasa—meski kelihatan sepele—sangat menentukan kesuksesan atau kegagalan interaksi sosial di antara warga Perumnas KBD Gresik, tak terkecuali masyarakat Jawa.

Kemudian, mengapa penelitian ini hendak difokuskan hanya pada masyarakat Jawa, dan mengapa stratifikasi sosial masyarakat Jawa diasumsikan berpengaruh terhadap pemilihan bahasa mereka di perumnas ini? Pertama, masyarakat Jawa dipilih sebagai fokus penelitian karena, selain sebagai mayoritas, mereka merupakan kelompok etnis paling kuat menonjolkan budaya stratifikasi, yakni adanya—pinjam istilah Oetomo (1989)—stratifikasi sosial bahasa, dengan 3 tingkat tutur atau *undha usuk* pokok: *ngoko* (rendah), *krama madya* (sedang), *krama inggil* (tinggi). Hirarki kekuasaan (*power*) di dalam masyarakat tampak dari penggunaan bahasa bertingkat tutur itu. Kontak bahasa dan budaya mereka dengan anggota masyarakat etnis lain di lingkungan mereka, menurut pengamatan, menunjukkan pola penggunaan bahasa yang khas. Kedua, dalam pengamatan juga tampak bahwa stratifikasi sosial mereka terkesan berkaitan dengan pemilihan bahasanya. Seseorang berstrata tinggi, baik dalam situasi formal maupun situasi informal, cenderung memiliki perilaku bahasa yang konvergen (beradaptasi dan berintegrasi) dengan kelompok lain. Dia tampaknya memakai bahasa Indonesia agar komunikasi dan interaksinya dengan orang lain menjadi lancar. Dia juga tak jarang mencampur bahasa Jawa (daerah) dan bahasa Indonesia dan jika lawan bicaranya (interlokuter) memang menuntut demikian. Akan tetapi, dalam interaksi inter-etnis dan/atau dalam kehidupan keluarga, dia seringali menggunakan bahasa Jawa (daerah)nya.

Sementara itu, orang etnis Jawa yang berstrata rendah, dengan terbatasnya perkumpulan dan hubungan sosialnya, dalam banyak kesempatan sering berperilaku divergen (menarik diri, tidak membaur) dalam komunikasi-interaksi intra-etnis.

Dalam komunikasi-interaksi intra-etnis, dia lebih sering hanya menggunakan bahasa daerahnya sendiri. Berkaitan dengan orang lain atau komunikasi-interaksi antar-etnis, dia tampak berusaha menyesuaikan bahasanya dengan lawan bicaranya, baik dengan pencampuran bahasa Jawa dan bahasa Indonesia, maupun dengan pemakaian bahasa Indonesia yang berlogat daerah asalnya. Pilihan terakhir ini, dalam sejumlah kasus, kelihatannya, merupakan keputusan dan tindakan yang tidak nyaman dan melegakan.

Stratifikasi sosial dalam penelitian ini ditinjau dengan "metode objektif", dan dipandang sebagai stratifikasi karena capaian (*achieved*), bukan semata karena perolehan (*ascribed*). Metode objektif ini sebagaimana diajukan G. Tan dalam Koentjaraningrat (1997:23), Nasution (1999), dan Karsidi (2005:175), yang memfokuskan pada tiga faktor paling lazim dipakai dalam ilmu sosial, yakni: tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, dan jumlah penghasilan. Logikanya, karena pendidikan, pekerjaan, dan penghasilan menunjukkan strata sosial seseorang dalam masyarakat, mereka juga ikut menentukan tindakan atau perilaku sosialnya. Karena pemilihan bahasa dalam konteks sosial sebenarnya juga merupakan bagian dari perilaku sosial, maka dapat dikatakan bahwa tiga faktor stratifikasi sosial tersebut sangat mungkin juga ikut menentukan pemilihan bahasa.

Akan tetapi, tidak begitu jelas apakah pekerjaan, pendidikan, dan penghasilan masyarakat Jawa di Perumnas KBD Gresik memiliki pengaruh yang sama atau berbeda terhadap kecenderungan pemilihan bahasa mereka. Ada kemungkinan, orang yang berpendidikan tinggi memiliki pekerjaan bagus, dan penghasilan tinggi. Mungkin pula orang berpendidikan tinggi memiliki pekerjaan kurang bagus, dan

penghasilan kurang baik. Sebaliknya, orang berpendidikan tak begitu tinggi mungkin memiliki pekerjaan bagus dan penghasilan yang tinggi pula. Juga dapat terjadi, orang yang berpendidikan tak begitu tinggi memiliki pekerjaan kurang bagus, dan penghasilannya rendah. Akan tetapi, belum jelas bagaimana tingkat pendidikan, pekerjaan, dan penghasilan seseorang menentukan pemilihan bahasanya dalam komunikasi dan interaksi sosial sehari-hari.

Secara rinci, pendidikan mungkin mempengaruhi sikap dan pemilihan bahasa. Sejalan dengan pemikiran Baker (1998), sikap bahasa diperoleh dan dipupuk lewat pembelajaran, dan dimodifikasi lewat pengalaman. Dalam kerangka pandang ini, pendidikan mempengaruhi sikap bahasa. Tetapi, pendidikan dan pemilihan bahasa Indonesia, menurut temuan Suhartono (2005), tidak menunjukkan hubungan pengaruh yang signifikan; terbukti, bahwa tingkat pendidikan bukanlah kendala komunikasi verbal. Dalam konteks pemilihan bahasa Jawa, Koiri & Fahri (1991) juga menemukan adanya hubungan kurang signifikan antara tingkat pendidikan dan pemilihan bahasa (dialek). Masih menarik dibuktikan lagi hubungan sikap bahasa dan pemilihan bahasa di perumnas yang belum *established* secara sosiokultural ini.

Adapun pengaruh pekerjaan dan penghasilan terhadap sikap dan pemilihan bahasa, sejauh pengetahuan peneliti, belum dilakukan. Akan tetapi, jika pemilihan bahasa diasumsikan sebagai suatu gaya hidup, maka ada kemungkinan bahwa pekerjaan dan penghasilan memiliki pengaruhnya. Betapapun juga pekerjaan dan penghasilan erat kaitannya dalam menentukan strata sosial seseorang dan, karena itulah, kemudian juga berkaitan dengan kecenderungan pemilihan bahasa.

Di samping itu, faktor sikap bahasa dan kompetensi komunikatif masyarakat Jawa di Perumnas KBD Gresik hendak dikaji pula berkaitan dengan pemilihan bahasa mereka sebagai faktor perantara (*intervening variable*). Secara teoretis, sejalan pemikiran Baker (1988), sikap [bahasa] memberi kecenderungan pada seseorang untuk bertindak dalam cara tertentu, tetapi hubungan antara sikap dan tindakannya bukanlah hubungan yang kuat. Secara empiris, penelitian Fahri (1989) juga mengungkap tidak-adanya korelasi antara sikap bahasa mahasiswa IKIP Surabaya (mayoritas beretnis Jawa) terhadap bahasa Inggris dan prestasi belajar bahasa Inggris. Agaknya fenomena ini perlu dikaji kembali dalam konteks masyarakat tutur bahasa Jawa.

Adapun kompetensi komunikatif masyarakat Jawa yang beragam, akibat perbedaan asal daerah, pendidikan, pekerjaan, penghasilan, dan sebagainya, tampaknya juga akan memiliki hubungan pengaruh dengan pemilihan bahasa. Secara teoretis, sejalan dengan paradigma Chomsky (1965), kompetensi komunikatif sangat kuat menentukan pemilihan bahasa. Pasalnya, kompetensi komunikatif seseorang memanifestasi menjadi performansi komunikatif, sedangkan performansi komunikatif hakikatnya mencakup pemilihan bahasa. Penelitian ini diharapkan akan memberikan bukti empiriknya.

Dengan demikian, sangatlah menarik untuk mengkaji hubungan pengaruh stratifikasi sosial (dalam bidang pendidikan, pekerjaan, dan penghasilan) terhadap pemilihan bahasa, baik dengan mediasi sikap bahasa dan kompetensi komunikatif maupun tidak dengan mediasi sikap bahasa dan kompetensi komunikatif. Tidak kalah

menariknya adalah mengungkap hubungan-hubungan yang memungkinkan antara stratifikasi sosial dan sikap bahasa dan/atau kompetensi komunikatif, antara sikap bahasa dan pemilihan bahasa, antara kompetensi komunikatif dan pemilihan bahasa. Perumnas KBD Gresik, yang diasumsikan kondusif untuk melaksanakan penelitian ini, diharapkan memberikan bukti-bukti empirik yang diperlukan.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini dirumuskan ke dalam masalah umum dan masalah khusus. Masalah umum penelitian ini dirumuskan berikut ini: "Adakah pengaruh stratifikasi sosial dalam bidang pendidikan, pekerjaan, dan penghasilan terhadap pemilihan bahasa masyarakat Jawa di Perumnas KBD Gresik?"

Masalah umum tersebut diturunkan menjadi 8 (delapan) buah masalah khusus yang lebih rinci, mengingat hadirnya faktor atau variabel antara (*intervening variable*) yakni sikap bahasa dan kompetensi komunikatif. Adapun masalah khusus penelitian dirumuskan berikut ini:

1. Adakah pengaruh stratifikasi sosial dalam bidang pendidikan, pekerjaan, dan penghasilan terhadap sikap bahasa masyarakat Jawa di Perumnas KBD Gresik?
2. Adakah pengaruh sikap bahasa terhadap pemilihan bahasa masyarakat Jawa di Perumnas KBD Gresik?

MILIK
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA

3. Adakah pengaruh stratifikasi sosial dalam bidang bidang pendidikan, pekerjaan, dan penghasilan terhadap kompetensi komunikatif masyarakat Jawa di Perumnas KBD Gresik?
4. Adakah pengaruh kompetensi komunikatif terhadap pemilihan bahasa masyarakat Jawa di perumnas KBD Gresik?
5. Adakah pengaruh stratifikasi sosial (dalam bidang pendidikan, pekerjaan, penghasilan) terhadap pemilihan bahasa dengan tidak dimediasi sikap bahasa dan kompetensi komunikatif?
6. Adakah pengaruh stratifikasi sosial (dalam bidang pendidikan, pekerjaan, penghasilan) terhadap pemilihan bahasa dengan dimediasi oleh sikap bahasa dan kompetensi komunikatif secara bersamaan?
7. Adakah pengaruh stratifikasi sosial (dalam bidang pendidikan, pekerjaan, penghasilan) terhadap pemilihan bahasa dengan dimediasi oleh sikap bahasa dan kompetensi komunikatif secara individual?
8. Bagaimanakah perbandingan pengaruh stratifikasi sosial terhadap pemilihan bahasa yang dimediasi sikap bahasa dan yang dimediasi kompetensi komunikatif?

1.3. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian dipilah menjadi dua: tujuan umum dan tujuan khusus. Secara umum penelitian ini dimaksudkan untuk mengungkapkan pengaruh stratifikasi sosial (dalam bidang pendidikan, pekerjaan, dan penghasilan) terhadap pemilihan bahasa masyarakat Jawa Perumnas KBD Gresik.

Secara khusus, penelitian ini difokuskan untuk mengungkapkan:

1. Pengaruh stratifikasi sosial dalam bidang pendidikan, pekerjaan, dan penghasilan terhadap sikap bahasa masyarakat Jawa di Perumnas KBD Gresik;
2. Pengaruh sikap bahasa terhadap pemilihan bahasa masyarakat Jawa di Perumnas KBD Gresik;
3. Pengaruh stratifikasi sosial dalam bidang bidang pendidikan, pekerjaan, dan penghasilan terhadap kompetensi komunikatif masyarakat Jawa di Perumnas KBD Gresik;
4. Pengaruh kompetensi komunikatif terhadap pemilihan bahasa masyarakat Jawa di perumnas KBD Gresik:
5. Pengaruh stratifikasi sosial (dalam bidang pendidikan, pekerjaan, penghasilan) terhadap pemilihan bahasa *dengan tidak dimediasi* sikap bahasa dan kompetensi komunikatif;
6. Pengaruh stratifikasi sosial (dalam bidang pendidikan, pekerjaan, penghasilan) terhadap pemilihan bahasa *dengan dimediasi* sikap bahasa dan kompetensi komunikatif secara bersamaan;
7. Pengaruh stratifikasi sosial (dalam bidang pendidikan, pekerjaan, penghasilan) terhadap pemilihan bahasa *dengan dimediasi* sikap bahasa dan kompetensi komunikatif secara individual; dan
8. Perbandingan pengaruh stratifikasi sosial terhadap pemilihan bahasa yang dimediasi sikap bahasa dan yang dimediasi kompetensi komunikatif.

1.4. Batasan Penelitian

Untuk mendekati masalah dan tujuan penelitian di atas, penelitian ini memiliki batasan dan/atau keterbatasan sebagai berikut ini:

1. Masyarakat dalam penelitian ini mengacu ke warga Perumnas KBD Gresik (bukan mesti penduduk yang ber-KTP setempat) yang memiliki kartu keluarga atau sejenis maks. 2 tahun terakhir. Waktu dua tahun diasumsikan masih menggambarkan kondisi yang relatif stabil dan belum banyak perubahan. Juga diasumsikan bahwa lebih dari dua tahun, data tertulis mungkin akan tidak valid lagi, mengingat mobilitas sosial mereka yang cukup tinggi.
2. Penelitian ini hanya melibatkan masyarakat beretnis Jawa—dengan (merujuk Frans Magnis Suseno dalam *Etika Jawa*) bahasa Jawa sebagai bahasa ibu (*mother tongue*)—di Perumnas KBD Gresik, meskipun sebenarnya terdapat beberapa etnik lain seperti Madura, Sunda, Batak, Ambon. Etnis Jawa dilibatkan dalam penelitian, selain karena jumlahnya yang mayoritas, juga karena merekalah yang teramati sedang dan/atau telah mengalami proses pemilihan bahasa yang dilematis.
3. Penelitian ini hanya melibatkan Kepala Keluarga (suami), karena mereka-lah yang secara sosio-kultural "diwajibkan" untuk bekerja dan mencari nafkah dan dianggap merepresentasikan pembentuk stratifikasi sosial diri dan keluarga. Di samping itu, Kepala Keluarga (suami) masih dijadikan penentu kebijakan dalam keluarga, termasuk dalam proses sosialisasi nilai-nilai budaya, dan sekaligus dalam sosialisasi bahasa.

4. Penelitian ini merupakan penelitian survei, yang hakikatnya menggunakan pendekatan swalapor (*self-report*), dengan instrumen berupa angket atau kuesioner. Penelitian ini mengasumsikan bahwa jawaban responden terhadap pertanyaan dan pernyataan angket merupakan cerminan dan representasi sikap, pendapat, dan perilaku responden sesuai dengan keadaan sebenarnya. Penelitian tidak melakukan triangulasi jawaban responden secara menyeluruh.
5. Penjenjangan stratifikasi sosial, sebagai kumulasi tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, dan jumlah penghasilan, hanya berlaku terbatas bagi masyarakat Perumnas KBD Gresik, dan tidak digeneralisasi untuk masyarakat lain di tempat lain. Terutama tentang jumlah penghasilan, penetapan penghasilan Rp 2.000.500—Rp 3.000.000 sebagai sedang (dengan skor 3), misalnya, tidak bisa diterapkan pada tempat lain.
6. Pemilihan bahasa yang dimaksud dalam penelitian ini hanya dibatasi pada pemilihan bahasa lisan (untuk komunikasi lisan), dan bukan pemilihan bahasa tulis (untuk komunikasi tulis). Ini didasarkan pada pertimbangan peneliti bahwa komunikasi lisan dominan terjadi antar masyarakat Jawa sendiri dan dengan masyarakat etnis lain.

1.5. Manfaat Penelitian

Selaras dengan tujuan penelitian di atas, penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan teoretis terhadap kajian sosiolinguistik, khususnya mengenai pemilihan bahasa dari perspektif sosiologis dan psikologi sosial. Sejalan dengan tujuan umum

kajian sosiolinguistik, yakni mengkaji fungsi-fungsi bahasa dalam masyarakat yang berkaitan dengan sosiokulturalnya, kebijakan, dan perencanaan bahasa, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan bahan informasi untuk suatu pengambilan kebijakan di bidang kebahasaan. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan pula untuk dijadikan bahan rujukan atau pertimbangan bagi penelitian lanjutan atau upaya-upaya pembinaan dan pengembangan bahasa-bahasa daerah dan bahasa Indonesia.

BAB 2

KAJIAN PUSTAKA

Kajian terhadap perilaku pemilihan bahasa individu tidak bisa lepas dari komunitas dan situasi sosial yang menyertainya. Dalam Bab ini dipaparkan pemikiran-pemikiran tentang bahasa, stratifikasi sosial, sikap bahasa, kompetensi komunikatif, dan pemilihan bahasa. Setelah itu, tinjauan kerangka teori sosial yang digunakan dalam penelitian ini juga disajikan, yang meliputi: Teori Pilihan Rasional, Teori Interaksi Simbolik, dan Teori Akomodasi. Adapun pemikiran dan teori tersebut dapat dipaparkan di bawah ini.

2.1. Pemikiran Tentang Bahasa dan Stratifikasi Sosial

Pemikiran yang erat kaitannya dengan perilaku pemilihan bahasa adalah pemikiran tentang bahasa dalam masyarakat dan penggunaannya. Untuk itu dalam bagian ini disampaikan pemikiran mengenai bahasa dalam masyarakat tutur, serta kaitannya dengan kesukuan (etnisitas). Di samping itu, bagian ini juga akan mengemukakan pemikiran tentang stratifikasi sosial dan pemilihan bahasa.

2.1.1 Bahasa, Etnisitas, dan Masyarakat Tutur

Para ahli sosiologi bahasa telah banyak menyingkap keberadaan bahasa dalam masyarakat. Adanya bahasa membuat manusia menjadi makhluk yang bermasyarakat (makhluk sosial). Kemasyarakatan manusia tercipta dan dikembangkan dengan bahasa. Lindgren (1972) menyebut bahasa sebagai "perekat masyarakat". Broom dan Selznik (1973) menyebutnya sebagai "faktor penentu dalam penciptaan masyarakat

manusia". Dengan bahasa, sistem komunikasi manusia berbeda dengan makhluk yang lain. Para peneliti telah banyak membuktikan melalui eksperimennya pada seekor simpanse untuk diajari bahasa dan juga bahasa isyarat. Tahun 1951 telah diperoleh hasil bahwa simpanse (bernama Vicki) tidak memiliki kesanggupan berbahasa seperti manusia. Tahun 1974 telah diperoleh hasil bahwa simpanse (bernama Washoe) mampu berbahasa isyarat (*American Sign Language, Ameslan*) dan berkomunikasi dengan manusia. Hasil percobaan-percobaan itu memberikan bukti hanya manusia yang sanggup belajar dan menggunakan bahasa untuk berkomunikasi.

Gumperz (1973) memandang bahwa bahasa merupakan media komunikasi yang paling canggih dan produktif; semua kelompok manusia memiliki bahasa. Tidak seperti sistem isyarat yang lain, sistem verbal (bahasa) bisa digunakan untuk mengacu berbagai objek dan konsep. Interaksi verbal merupakan proses sosial dengan ujaran yang dipilih sesuai dengan norma-norma dan harapan-harapan yang disadari secara sosial. Sejumlah kajian tentang penggunaan bahasa (*language use*), menyatakan bahawa penggunaan bahasa bisa merefleksikan norma-norma perilaku yang lebih umum. Dalam pokok itu, bahasa adalah etika. Di samping itu, bahasa juga sebagai logika. Sebagaimana premis kedua dari teori interaksi simbolik (Mulyana 2001:71-72), makna adalah produk interaksi sosial, karena itu makna tidak melekat pada objek, melainkan dinegosiasikan melalui penggunaan bahasa. Oleh sebab itu, Mead (dalam Mulyana 2001:77) menekankan pentingnya komunikasi, khususnya melalui mekanisme isyarat verbal (bahasa).

Penggunaan bahasa di masyarakat menuntut individu selektif dan adaptif. Norma-norma sosial pemilihan bahasa bervariasi dari satu situasi ke situasi yang lain dan dari masyarakat yang satu ke masyarakat yang lain. Akan tetapi, regularitas dalam sikap terhadap variasi bahasa terjadi dalam sejumlah masyarakat (Gumperz 1973). *Argot* pencopet, *jargon* remaja, dan sejenisnya secara tipikal berfungsi sebagai batasan kelompok yang mempertahankan mekanismenya. Sikap eksklusif yang sama juga terdapat dalam bahasa etnis. Barth (1988:12) menyatakan bahwa bahasa juga menjadi isolasi etnis, di samping ras, budaya, dan bentuk sosial. Bahasa etnis dipergunakan dalam berbagai hubungan kebudayaan. Bahasa etnis terkait dengan bahasa ritual rahasia, dalam arti pengetahuan tertentu yang ada di dalamnya terjaga dari orang luar.

Bahasa yang dimiliki etnis tertentu menjadi identitas etnis tersebut. Atau, seperti dikatakan Nadkarni (dalam Kennedy 1983) bagi setiap kelompok atau masyarakat tertentu, bahasanyalah yang paling sering merupakan simbol keunikan dan identitasnya. Bahasa etnis menjadi pembentuk etnosentrisme. Etnosentrisme dalam bentuk ekstrem dapat meluas menimbulkan rasisme, prasangka, stereotipe, dan diskriminasi dalam konotasi yang negatif (Garcia 1982:75). Dalam paradigma multikulturalitas, pemeliharaan etnosentrisme menjadi penting untuk berbagai bidang kehidupan. Oleh sebab itu, hak hidup bahasa etnis pun menjadi penting.

Bahasa merupakan komponen penting dalam kebudayaan. Multikulturalitas juga ditandai kemajemukan bahasa (*multilingual*). Kemajemukan bahasa sering dirasa oleh suatu rezim pemerintahan negara sebagai hambatan kesatuan nasional. Oleh sebab itu, diadakan upaya yang mengarah kepada satu bahasa (*monolingual*). Upaya

itu sering berakibat tidak bergunanya bahasa-bahasa etnis dan kemerosotan bahasa (*language loss*). Walaupun fenomena semacam itu jarang diteliti, setidak-tidaknya penelitian Watson (dalam Kennedy 1983) di Malaysia, yang menyimpulkan bahwa perencanaan bahasa harus memperhatikan dan memperlihatkan nilai-nilai sosiokultural dan situasi kelompok-kelompok rasial, cukup menjadi alasan pernyataan tersebut.

Sementara itu, sebagai upaya menghidupkan bahasa dan budaya tertentu (termasuk juga etnis), orang menggantungkan harapan akan dipakainya bahasa-budaya bersangkutan dalam kehidupan sosial. Pemakaian bahasa-budaya etnis akan memperpanjang umurnya, sekaligus mengurangi bahaya kepunahan yang sedang mengintai. Dengan demikian, yang bertanggungjawab atas hidup-matinya suatu bahasa, tidak lain dan tidak bukan, adalah masyarakat tutur (*speech community*) sendiri.

Lalu, siapakah sebenarnya yang termasuk masyarakat tutur itu? Ada sejumlah definisi telah diusulkan, termasuk kriteria seperti penggunaan bahasa bersama (Lyons 1970), frekwensi interaksi oleh sekelompok orang (Gumperz 1962), kaidah berbicara dan interpretasi performansi tutur (Hymes 1972), sikap bersama dan berkenaan dengan nilai, bentuk dan penggunaan bahasa (Labov 1972), serta pemahaman sosiokultural dan presuposisi dalam hubungannya dengan tutur (Dherzer 1975).

Masyarakat tutur merupakan kelompok manusia yang ditandai oleh interaksi reguler dan sering, dengan menggunakan isyarat-isyarat verbal dan terpisahkan dari kelompok-kelompok lain menurut perbedaan dalam penggunaan bahasa (Gumperz

1973). Kelompok-kelompok tertentu, bangsa modern yang terbagi ke dalam wilayah-wilayah lebih kecil, atau bahkan asosiasi profesi atau kelompok-kelompok rukun tetangga bisa dipandang sebagai masyarakat tutur, asalkan mereka menunjukkan kekhasan pengguaan bahasa. Perilaku verbal kelompok-kelompok seperti itu selalu menyusun suatu sistem. Sistem itu pastilah didasarkan pada seperangkat kaidah gramatika yang mendasari produksi kalimat-kalimat yang berterima (*acceptable*), jika tidak suatu pesan tidak akan bisa dipahami.

Akan tetapi, para linguis secara umum menyetujui bahwa masyarakat tutur tidak bisa disamakan secara persis dengan sekelompok orang yang berbicara bahasa yang sama. Para penutur dialek-dialek China yang sulit dipahami satu sama lain (*mutually unintelligible*) mengidentifikasi mereka sendiri sebagai anggota dari masyarakat tutur yang sama (mereka memiliki kode tulis yang sama, maupun kaidah untuk pengunaannya), sementara para penutur bahasa Spanyol, Italia, dan Portugis bukanlah anggota dari masyarakat tutur yang sama meskipun bahasa-bahasa mereka pada tataran tertentu mudah dipahami satu sama lain (*mutually intelligible*). Dus, penting untuk membedakan antara berpartisipasi dalam sebuah masyarakat tutur dan menjadi anggota masyarakat tutur itu; berbicara bahasa yang sama sudah cukup untuk partisipasi, tetapi keanggotaan tidak bisa didasarkan pada pengetahuan dan skill bahasa saja.

Dengan demikian, masyarakat tutur suatu bahasa hakikatnya memiliki bahasa tersebut baik 'diwariskan' generasi sebelumnya maupun dipelajari, terikat nilai-nilai sosial-budaya yang melatarinya dan kaidah-kaidah kemampuan tutur, yang

menggunakannya untuk komunikasi atau interaksi satu sama lain. Rasa memiliki (*sense of belonging*) terhadap bahasa tersebut relatif tinggi, sehingga anggota masyarakat tutur terpanggil untuk senantiasa berusaha menggunakannya dan bahkan mengembangkannya atau menurunkannya ke generasi berikutnya. Mereka menganggap bahwa bahasa merupakan simbol identitas. Anggota masyarakat tutur tentu saja tidak akan mudah untuk menghapus simbol identitas yang dimilikinya.

Tentu saja tingkat kepedulian dan fanatisme anggota masyarakat tutur terhadap bahasanya tidaklah sama. Ada masyarakat tutur yang termasuk bungkus-keras (*hard-shelled*), ada juga yang bungkus lunak (*soft-shelled*). Masyarakat tutur *hard-shelled* memiliki batas-batas yang lebih kuat, dengan memungkinkan interaksi minimal antara anggota dan *outsiders* (orang luar), dan dengan memberikan pemeliharaan maksimum pada bahasa dan budayanya. Sebaliknya, masyarakat tutur *soft-shelled* memiliki batas-batas lunak dalam interaksi dengan *outsiders*, sehingga mereka cenderung terbuka bagi kompromi dan akomodasi dalam penggunaan bahasa lain. Orang Jawa yang *soft-shelled*, misalnya, mungkin akan menggunakan bahasa Indonesia saat memimpin rapat di kantornya, atau bahasa Inggris saat menemui relasi bisnisnya yang berasal dari Australia.

Dalam kondisi Indonesia, sejak Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 bahasa Melayu (Indonesia) dijadikan bahasa pemersatu bangsa, dan karena itu juga menjadi awal "proses harakiri" kebudayaan Jawa (Basir 1998:44; Adipitoyo 1996). Kasus ini mirip dengan nasib bahasa-bahasa daerah di kota-kota besar metropolitan (Muhadjir 1998). Menurutnya, sejak saat itu, kepedulian pemerintah terhadap bahasa-budaya

Jawa semakin luntur. Akibatnya, terjadilah kemerosotan atau kemunduran etos penggunaan bahasa Jawa, tidak hanya melanda kalangan tidak terpelajar, melainkan juga kalangan terpelajar. Alwasilah (1985: 180-181) juga melaporkan seminar politik bahasa nasional 1975, yang menegaskan kepedulian pemerintah terhadap bahasa Jawa. Tetapi, apa yang kemudian terjadi? Belakangan ini kepedulian pemerintah sangat terbatas, dan bahasa Jawa hanya dimasukkan sebagai muatan lokal untuk pelajaran di sekolah.

Meski demikian, ada analisis yang penuh spirit dan optimisme. Murdiyanto & Sawardi (2000:224-225) dengan yakin menyatakan: baik kekhawatiran dan bahkan unsur penghapusan adanya tingkat tutur (*speech level*) bahasa Jawa yang sudah satu abad, tidak dapat menghapus kenyataan bahwa sekarang keberadaan tingkat tutur itu masih ada. Bukan hanya masih ada, bahkan tingkat tutur itu merembes ke dalam bahasa Indonesia. Hal ini dapat dilihat dengan adanya gejala *kramanisasi* bahasa Indonesia. Lebih lanjut, pada masa yang akan datang tingkat tutur itu masih akan hidup. Ia masih didukung oleh berbagai jenis kesenian, upacara tradisional, dan karya sastra yang memerlukan ekspresi membedakan rasa hormat dan rasa akrab. Singkatnya, tingkat tutur bahasa Jawa masih menyimpan daya hidup.

Dari sudut pandang ini, keluarga sebagai basis sosialisasi bahasa-budaya Jawa diperlukan peranannya. Hubungan-hubungan keluarga dari anggota masyarakat tutur Jawa berkompeten untuk memainkan peranan ini. Sejalan dengan Robert Bell yang dikutip Evelyn Suleeman dalam Ihromi (2004:91), jenis hubungan keluarga terbagi menjadi tiga: kerabat dekat (*conventional kin*), kerabat jauh (*discretionary kin*), dan

orang yang dianggap kerabat (*fictive kin*). Sosialisasi bahasa dan budaya Jawa seharusnya dapat berjalan dalam ketiga jenis hubungan kerabat tersebut. Frekwensi pertemuan yang relatif tinggi di antara mereka, setidaknya, mengikat mereka untuk menerapkan kode bahasa yang sama. Anak-anak mereka sekaligus mengamati dan memahami kode bahasa apakah sedang disaksikan. Imitasi dan akomodasi berlangsung di sini.

Di samping itu, masyarakat tutur sebagai lembaga sosial juga merupakan penentu sosialisasi bahasa mereka kepada generasi berikutnya. Sosialisasi ini secara horizontal ditempuh dengan tetap menggunakan bahasa Jawa dalam sistem nilai budaya yang melekat. Secara vertikal, sosialisasi bahasa dalam masyarakat tutur dapat berwujud kebijakan bahasa dan perencanaan bahasa agar generasi berikutnya terkondisikan untuk bersikap bangga dan loyal terhadap bahasa-budaya leluhur.

Deskripsi singkat di atas membuktikan, bahwa betapapun ancaman akan keruntuhan atau kepunahan bahasa etnis tertentu, masyarakat tuturlah yang akan menentukan apakah bahasa tersebut tetap hidup atau kemudian berangsur-angsur mati. Pesimisme pasti ada di hati sebagian anggota masyarakat tutur, akan tetapi sebagian anggota yang lain pastilah juga memiliki spirit dan optimisme tersendiri. Daya hidup bahasa-budaya bersangkutan akan berpulang kepada masyarakat tutur itu sendiri dalam menyikapi dan menunjukkan kepedulian dan etos penggunaan bahasa.

2.1.2. Stratifikasi Sosial dan Bahasa

Stratifikasi, menurut Susanto (1999: 65-66), merupakan hasil kebiasaan hubungan antar-manusia secara teratur dan tersusun, sehingga setiap orang, setiap saat

mempunyai situasi yang menentukan hubungannya dengan orang lain secara vertical maupun mendatar dalam masyarakatnya. Dengan demikian, peranan yang diambil oleh orang dalam masyarakatnya ditentukan oleh situasi kelompok.

Dalam setiap masyarakat akan ditemukan atau berkembang dengan sendirinya suatu stratifikasi sosial. Tiada masyarakat yang sepenuhnya homogen dan sederajat, serta tidak terpola ke dalam stratifikasi sosial tertentu. Ia terjadi dengan makin meluasnya masyarakat, dengan terjadinya pembagian pekerjaan. Jadi masyarakat modern akan memperlihatkan kecenderungan menuju ke stratifikasi yang lebih banyak; karena dasar dari stratifikasi ialah pembagian pekerjaan, baik spesialisasi maupun diversifikasi.

Piritim A. Sorokin, sebagaimana dikutip Sutinah dan Norma (dalam Narwoko & Suyanto 2004:132-3), mengemukakan bahwa sistem pelapisan (stratifikasi) dalam masyarakat itu merupakan ciri yang tetap dan umum dalam setiap masyarakat yang hidup dengan teratur. Mereka yang memiliki barang atau sesuatu yang berharga dalam jumlah banyak akan menduduki lapisan (strata) atas dan sebaliknya mereka yang memiliki dalam jumlah relatif sedikit atau bahkan tidak memiliki sama sekali akan dipandang sebagai berkedudukan rendah.

Lebih lanjut Sorokin mengemukakan, stratifikasi sosial adalah pembedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat (hierarkis). Perwujudannya adalah adanya kelas-kelas tinggi dan kelas yang lebih rendah. Selanjutnya disebutkan bahwa dasar dan inti dari lapisan-lapisan dalam masyarakat adalah adanya ketidakseimbangan dalam pembagian hak dan kewajiban, kewajiban

dan tanggung-jawab nilai-nilai sosial dan pengaruhnya di antara anggota-anggota masyarakat.

Pada umumnya mereka yang menduduki lapisan atas tidak hanya memiliki satu macam saja dari sesuatu yang dihargai oleh masyarakat, akan tetapi kedudukan yang tinggi tersebut bersifat kumulatif. Maksudnya, mereka yang memiliki uang banyak, misalnya, akan mudah mendapatkan tanah, kekuasaan, ilmu pengetahuan, bahkan mungkin kehormatan tertentu.

Bentuk konkret lapisan-lapisan dalam masyarakat tersebut bermacam-macam. Namun, menurut Sutinah & Norma (dalam Narwoko & Suyanto 2004:133), pada prinsipnya bentuk-bentuk tersebut dapat diklasifikasikan ke dalam tiga macam kelas, yakni: (1) Kelas yang didasarkan pada faktor ekonomi; (2) Kelas yang didasarkan pada faktor politis; dan (3) Kelas yang didasarkan pada jabatan-jabatan tertentu dalam masyarakat. Ketiga bentuk tersebut biasanya saling berkaitan satu dengan lainnya.

Karena itu, stratifikasi sosial memiliki beberapa fungsi. Mengutip Kingsley Davis dan Wilbert Moore, Susanto (1999:67) mengemukakan fungsi-fungsi itu berikut ini: (1) Stratifikasi sosial menjelaskan kepada seseorang "tempat"-nya dalam masyarakat sesuai dengan pekerjaan, menjelaskan kepadanya bagaimana harus menjalankannya dan sehubungan dengan tugasnya menjelaskan apa dan bagaimana efek serta sumbangannya kepada masyarakatnya; (2) Karena peranan dari setiap tugas dalam masyarakat berbeda-beda dengan seringkali adanya tugas yang kurang dianggap penting oleh masyarakat (karena beberapa pekerjaan maminta pendidikan dan keahlian terlebih dahulu) maka berdasarkan perbedaan persyaratan dan tuntutan atas prestasi

kerja, masyarakat biasanya memberi imbalan kepada yang melaksanakan tugas dengan baik dan sebaliknya "menghukum" yang tidak atau kurang baik. Dengan sendirinya terjadilah distribusi penghargaan, hal mana menghasilkan dengan sendirinya pembentukan stratifikasi sosial; (3) Penghargaan yang diberikan biasanya bersifat ekonomik, berupa pemberian status sosial atau fasilitas-fasilitas yang karena distribusinya berbeda (sesuai dengan pemenuhan persyaratan dan penilaian terhadap pelaksanaan tugasnya) membentuk struktur sosial.

Sementara itu, Sutinah dan Norma (dalam Narwoko & Suyanto 2004:136-37), mengemukakan metode Pitirim Sorokin untuk mengukur status seseorang, yakni dengan melihat: (1) Jabatan atau pekerjaan; (2) Pendidikan dan luasnya ilmu pengetahuan; (3) Kekayaan; (4) Politis; (5) Keturunan; dan (6) Agama. Sementara Suyanto dan Karnaji (dalam Narwoko & Suyanto 2004:150) mengemukaan faktor-faktor yang menjadi determinan stratifikasi sosial yang relatif beragam, yakni dimensi (1) usia; (2) jenis kelamin; (3) agama; (4) kelompok etnis atau ras; (5) pendidikan formal; (6) pekerjaan, (7)kekuasaan; (8) status; (9) tempat tinggal, dan (10) dimensi ekonomi.

Dari sejumlah faktor tersebut, sebagian eksis karena perolehan (*ascribed status*), ada sebagian lagi eksis karena peraihan (*achieved status*). Sunarto (2000: 86-87) mengkategorikan usia, jenis kelamin, kekerabatan, agama, dan kelompok etnis ke dalam *ascribed status*; serta mengkategorikan pendidikan, pekerjaan, dan ekonomi ke dalam *achieved status*. Politis atau kekuasaan, sebagaimana tempat tinggal, jika dilihat dari sudut pandang Sunarto, bisa mengarah ke kedua-duanya: Dalam kehidupan

tradisional, kekuasaan dan model tempat tinggal termasuk *ascribed status*, namun dalam kehidupan modern mereka termasuk *achieved status*.

Dalam masyarakat yang kian modern, perbedaan strata yang terbentuk dan berkembang di masyarakat umumnya tidak lagi atas dasar hal-hal yang bersifat kodrati, tidak *given*, tidak mengandalkan *ascribed status*. Perbedaan strata masyarakat modern tidak lagi berdasarkan jenis kelamin, usia, kekerabatan, agama, dan etnis atau ras. Parameter untuk mengetahui stratifikasi sosial masyarakat modern tentu saja yang dominan merepresentasikan raihan prestasi (*achievement*) dan tak jarang menyimbolkan modernitas, yakni pendidikan, pekerjaan, kekuasaan, status ekonomi, dan tempat tinggal.

Sejalan dengan pemikiran stratifikasi sosial "modern" tersebut, penelitian ini mengambil pijakan stratifikasi sosial dengan "metode objektif", yang lazimnya, diarahkan terhadap tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, dan jumlah pendapatan/penghasilan (G.Tan dalam Koenjaraningrat 1997:23; Nasution 1999; Kohn dalam Soe'oed 2004, dan Karsidi 2005:175). Dalam metode objektif ini, pada dasarnya stratifikasi atau kelas sosial merupakan suatu "cara hidup". Diperlukan banyak uang untuk dapat hidup menurut cara hidup berkelas atas. Meski demikian uang tidak menjamin segera mendapatkan status sosial atas. Jadi "orang kaya baru", meski mampu memberi mobil mewah dan membangun rumah megah, tidak serta merta dianggap sebagai orang lapisan atas jika tidak mampu menyesuaikan diris secara mendalam terhadap gaya hidup "orang kaya lama".

Pendapatan atau penghasilan yang diperoleh dari investasi lebih memiliki prestise daripada pendapatan yang diperoleh dari tunjangan pengangguran. Penghasilan yang diperoleh dari pekerjaan profesional lebih berfungsi dalam sistem sosial daripada yang berwujud upah pekerjaan kasar. Uang yang diperoleh dari spekulasi penjualan barang-barang yang disimpan lebih baik daripada uang dari hasil perjudian balapan kuda. Sumber dan jenis penghasilan seseorang memberi gambaran tentang latar belakang keluarga dan kemungkinan cara hidupnya.

Jenis dan tingkat pendidikan juga mempengaruhi jenjang kelas sosial. Pendidikan bukan hanya memberikan ketrampilan kerja, melinkan juga melahirkan perubahan mental, selera, minat, tujuan dan lain-lain. Implikasinya, orang yang berpendidikan Strata-2 akan dipandang lebih tinggi kelas sosialnya dibandingkan orang yang berpendidikan Sekolah Dasar. Orang yang berpendidikan tinggi berpotensi untuk mengakses barang atau jasa yang berkaitan dengan representasikan aspirasi kelas atas. Bahkan, sejalan dengan Clark (1944), Karsidi (2005:186) menegaskan bahwa makin tinggi tingkat pendidikan seseorang, makin tinggi pula tingkat penghasilannya—meskipun tidak semua orang mengalami korelasi linier semacam itu.

Pekerjaan merupakan aspek kelas sosial yang penting karena begitu banyak segi kehidupan lainnya yang berkaitan dengan pekerjaan. Apabila kita mengetahui jenis pekerjaan seseorang, kita bisa menduga-duga tinggi-rendahnya pendidikan, standar hidup, teman-teman, jam kerja, kebiasaan-kebiasaan sehar-hari keluarga orang itu. Kita bahkan bisa membaca selera bacaan, selera rekreasi, standar moral, dan orientasi kegemarannya.

Sekarang, apakah hubungan stratifikasi sosial dengan pemilihan bahasa? Karena pendidikan, pekerjaan, dan pekerjaan tersebut menunjukkan stratifikasi/kelas sosial seseorang dalam masyarakat, mereka agaknya juga ikut menentukan tindakan atau perilaku sosialnya. Karena pemilihan bahasa dalam konteks sosial sebenarnya juga merupakan bagian dari perilaku sosial, maka dapat dikatakan bahwa ketiga sub-faktor stratifikasi tersebut sangat mungkin juga menentukan pemilihan bahasa. Dalam berkomunikasi, misalnya, orang yang berpendidikan secara normal akan mamakai kalimat-kalimat yang mencerminkan intelektualitasnya, termasuk menunjukkan formalitas dan sopan-santun berbicara. Orang yang berprofesi sebagai pemilik warung kopi akan cenderung menggunakan bahasa-bahasa yang informal dan santai dalam peristiwa tutur.

Dalam kaitannya dengan masyarakat tutur yang berstrata, beragam kondisi sosio-budayanya, boleh jadi beragam pula pemahaman makna kontekstual dalam berbahasa. Makna konotasi sebuah kata atau ungkapan, misalnya, boleh jadi berbeda antara strata masyarakat satu dan strata masyarakat lain. Masyarakat kurang terpelajar bisa bingung memahami makna kata-kata *dilemarieskan, paradigma, metode, sangkil, referensi*, dan sejenisnya. Sebaliknya, kalau ada orang yang menggunakan bahasa Jawa yang kasar, *ngoko*, dan kurang tahu sopan-santun berbahasa, orang kemudian menganggap bahwa orang yang bersangkutan berasal dari kalangan masyarakat bawah. Bahasa, bagaimanapun juga, menunjukkan identitas penuturnya.

Memang, masyarakat bervariasi pada tataran sejauh mana perilaku komunikatif berhubungan dengan definisi peran sosial. Dalam sebagian masyarakat, seperti Indian

Cuna San Blas, Panama, kemampuan berbicara merupakan bagian integral dari prestasi dan validasi (Sherzer 1974). Dalam masyarakat yang lain, kompetensi komunikatif bisa memiliki signifikansi yang kecil atau tidak sama sekali dalam bentuk peran, meskipun kategori sosial tertentu (seperti usia dan jenis kelamin) bisa ditandai oleh perilaku / performasi komunikatif yang khas.

Dalam masyarakat yang terstratifikasi secara ketat, keanggotaan kelas sosial ditentukan secara jelas, peran sudah dibagi secara tegas, dan varietas bahasa dibedakan dengan jelas. Dalam masyarakat semacam itu anggota strata yang lebih rendah tidak banyak memiliki kesempatan untuk memperoleh bentuk bahasa 'lebih tinggi'. Dalam masyarakat yang lebih demokratis individu memiliki keterbukaan peran yang lebih besar, dan pada umumnya memiliki varietas ujaran yang bisa ditentukan secara sosial. Penelitian Labov (1966) di Amerika Serikat telah menunjukkan bahwa mereka yang bergerak ke atas cenderung mengadopsi varietas bahasa yang digunakan oleh kelompok yang di atas mereka, yang seringkali dengan melibatkan hiperkorek, meskipun revolusi sosial bisa melenyapkan bentuk bahasa yang berprestise maupun orang yang menggunakan varietas itu.

Banyaknya bahasa yang tersedia untuk kelas sosial yang lebih tinggi dicontohkan oleh para penutur dialek Telugu di India (Sjoberg 1962). Dalam kelompok ini hanya anggota kelompok kelas atas saja yang bisa menggunakan varietas formal dan informal, yang ditandai oleh dua sistem fonemik yang berbeda. Rentangan ini berhubungan langsung dengan pola pendidikan, sebab varietas formal hanya

dipelajari oleh mereka yang bersekolah. Demikian juga, sarana komunikasi tertulis di kebanyakan masyarakat hanya tersedia bagi kelas atas.

Terdapat banyak orang dalam masyarakat Amerika yang merasa bahwa pemarkah bahasa (*language marker*) membantu mempertahankan ketidaksamaan dalam sistem sosial, dan bahwa bahasa bisa diubah untuk menghilangkan ketidaksamaan itu. Contoh lain, ada kepercayaan luas di Amerika dan Inggris bahwa berbicara bahasa Inggris non-standar merupakan faktor penyebab dalam rendahnya status ekonomi sebagian besar segmen-segmen penduduk kelompok minoritas, dan bahwa belajar bahasa Inggris yang 'baik' secara otomatis akan meningkatkan batasan dan kecurigaan kelas sosial. Pandangan ini disinggung dalam *Pygmalion* karya Shaw, di mana Eliza Doolittle berhasil dalam mengubah kelas sosial dengan mengubah pola bicaranya. Di Indonesia, bahasa Indonesia yang dipandang lebih bersifat demokratis daripada bahasa Jawa telah mengembangkan kapasitasnya untuk menyamakan perbedaan-perbedaan sosial.

Deskripsi di atas dimaksudkan untuk membantu menunjukkan bahwa stratifikasi atau kelas sosial memiliki peran tertentu dalam diri seseorang untuk memilih suatu bahasa dalam situasi komunikasi tertentu. Yang menarik, agaknya, adalah mengungkap seberapa jauh stratifikasi sosial *per se* atau, dalam skala lebih kecil, tiga sub-faktornya (pendidikan, pekerjaan, dan penghasilan) berhubungan atau mempengaruhi satu sama lain, dan kemudian mempengaruhi pola pemilihan bahasa. Kajian yang cermat diperlukan untuk menjawab permasalahan semacam ini.

2.2. Sikap Bahasa, Kompetensi Komunikatif, dan Pemilihan Bahasa

Sekarang pemikiran tentang sikap bahasa, kompetensi komunikatif, dan pemilihan bahasa disajikan dalam bagian berikut ini. Di samping mendalami pengertian masing-masing, uraian berikut ini diharapkan juga memadai untuk melihat hubungan-hubungan yang memungkinkan antara satu dengan lainnya.

2.2.1. Sikap Bahasa

Istilah 'sikap' seringkali digunakan masyarakat kita secara kurang tepat dan kurang proporsional. Jika sebuah keluarga bertandang ke rumah sanak-famili yang sedang memiliki hajat mantu, misalnya, si ayah atau ibu akan berpesan kepada si bungsu demikian: "Nak, nanti jangan lupa cium tangan, *sungkem*. Sikapmu jangan sampai memalukan." Dalam kontcks ini, *cium tangan* dan *sungkem* sebenarnya sudah termasuk tindakan psikomotorik yang nyata atau manifes. Jadi si ayah atau ibu telah menggunakan istilah 'sikap' di luar proporsi yang selayaknya.

Untuk membicarakan sikap bahasa, pengertian 'sikap' dirujukkan pada makna katanya ketika ia dimplikasikan berkait dengan konteks interaksi sosial dan bahasa. Dalam hal ini secara jelas Baker (1988) memetakan ciri-ciri utama sikap sebagai berikut:

- Sikap bersifat kognitif (yakni dapat dipikirkan) dan afektif (yakni melekat padanya perasaan dan emosi).
- Sikap itu dimensional daripada bipolar—bervariasi dalam derajat *favourability* atau *unfavourability*.

- Sikap memberi kecenderungan kepada seseorang untuk bertindak dalam cara tertentu, tetapi hubungan antara sikap dan tindakan bukanlah hubungan yang kuat.
- Sikap dipelajari, tidak diwariskan atau diturunkan secara genetik.
- Sikap cenderung persisten tetapi dapat dimodifikasi dengan pengalaman.

Ciri-ciri tersebut menggambarkan betapa sikap sebenarnya bukanlah merupakan tindakan nyata (manifes) yang bersifat psikomotorik. Sikap masih berada dalam tahap kognisi dan afeksi. Karena itu, dalam sikap seseorang terhadap sesuatu terkandung pikiran dan perasaan senang atau tidak senang, positif atau negatif. Dialah yang mendasari seseorang untuk berbuat sesuatu, meskipun sikap dan tindakan "tidak selalu" berkorelasi secara kuat dan signifikan.

Sejalan dengan itu, sikap bahasa dapat didefinisikan sebagai "fungsi keyakinan" (Suharsono 1995:27). Hakikatnya, ia merupakan konstruk yang ada di dalam pikiran dwibahasawan (Oskamp 1977:14). Sebagai suatu konstruk, sikap bahasa tidak dapat diakses hanya dari satu respons saja tetapi harus diinferensikan dari sejumlah respons yang mencakup representasi penggunaan bahasa dan penerapan keyakinan. Dalam pengukurannya, sikap bahasa—sebagaimana sikap yang merupakan entitas abstrak—selayaknya diukur dengan menderajatkannya pada skala sikap. (Setiawan 2001).

Untuk melacak sikap bahasa seseorang, perlu dipetakan bentuk-bentuk manifestasi dari sikap tersebut. Sejalan dengan Ellis (1997a:198), manifestasi sikap seseorang dapat berupa sikap terhadap: (1) bahasa sasaran; (2) penutur bahasa sasaran;

(3) budaya bahasa sasaran; (4) nilai sosial pembelajaran bahasa sasaran; (5) kegunaan-kegunaan khusus bahasa sasaran; (6) diri sendiri sebagai anggota dari budayanya sendiri. Bentuk-bentuk manifestasi sikap bahasa tersebut merefleksikan *setting* sosial di mana seseorang menemukan dirinya sendiri. Pernyataan-pernyataan *investigatif* dapat didesain untuk mengetahui bagaimana sikap seseorang etnis Batak, misalnya, terhadap bahasa Indonesia, penutur bahasa Indonesia, dan seterusnya (Ardiana 1995).

Dalam kehidupan masyarakat multilingual, di mana kontak bahasa dan budaya terjadi, bahasa memiliki fungsi bukan hanya sebagai alat komunikasi dan/atau interaksi antara masyarakat penuturnya, akan tetapi juga merupakan simbol identitas sosial atau kelompok etnik, bahkan merupakan suatu emblem keanggotaan kelompok dan emblem solidaritas (Grosjean: 1982:117; Setiawan 2001). Dalam kondisi demikian, sikap bahasa yang *favourable* dan *unfavourable* bisa muncul terhadap bahasa kelompok sendiri dan bahasa orang lain. Implikasinya, orang mungkin memandang secara positif bahasa orang lain sehingga ia berminat untuk mempelajari atau menggunakannya dalam komunikasi.

Sudah barang tentu lazimnya ada pemerian bahasa bermartabat (prestisius) dan bahasa kurang bermartabat (kurang prestisius) atau kadang disebut dengan bahasa Tinggi dan bahasa Rendah. Tumbuhlah penilaian yang ekstrem untuk membedakan kedudukan dan fungsi sosialnya. Bahasa Tinggi, misalnya, dianggap sebagai lebih indah, lebih bermartabat, lebih ekspresif, lebih logis, dan lebih baik digunakan untuk mengungkapkan pikiran dan perasaan yang abstrak. Sebaliknya, bahasa Rendah dianggap kuno, tidak gramatikal, tidak bermartabat, dan sebagainya. Singkatnya,

predikat-predikat yang tidak *favourable* acapkali diarahkan untuk mendeskripsikan bahasa Rendah, dan bukan untuk bahasa Tinggi. Karena itu wajar kiranya bila bahasa-bahasa minoritas di dalam masyarakat bilingual atau multilingual telah dijadikan objek serangan oleh kelompok yang dominan (Grosjean 1982:123; Setiawan 2001).

Sebagai konsekwensinya, bahasa yang digunakan kelompok dominan lazimnya dipelajari baik oleh anggota masyarakat kebanyakan maupun oleh kelompok minoritas, sementara itu bahasa minoritas hanya dipelajari oleh anggota kelompok minoritas itu sendiri. Dalam konteks sosial kebahasaan di Indonesia terbukti bahwa bahasa Indonesia kini dipelajari oleh seluruh bangsa Indonesia, termasuk etnis Jawa. Sementara itu, bahasa Jawa hanya praktis dipelajari oleh masyarakat etnis Jawa. Bahkan tidak sedikit generasi muda Jawa yang tidak lagi berminat mempelajari dan/atau menggunakan bahasa Jawa dalam kehidupan sehari-hari.

Sejalan dengan pemikiran Baker (1988), kendati tidak berada dalam hubungan yang kuat dan signifikan, sikap bahasa memberikan kecenderungan seseorang untuk menunjukkan perilaku tertentu dalam berbahasa. Orang yang memiliki sikap bahasa positif terhadap bahasa Indonesia, misalnya, mungkin akan mempelajarinya saja, menggunakannya saja, atau mempelajari sekaligus menggunakannya. Sedangkan orang yang memiliki sikap bahasa negatif, mungkin dia tidak berminat menggunakannya meskipun dia terpaksa mempelajarinya. Orang Madura dengan sikap bahasa tertentu mampu berkomunikasi dalam bahasa Indonesia logat Madura hampir di mana pun mereka berada. Inilah antara lain bukti hubungan sikap bahasa terhadap perilaku pemilihan bahasa.

Fahri (1989), dalam penelitiannya, semula meyakini bahwa sikap bahasa mahasiswa bahasa Inggris IKIP Surabaya berkorelasi potitif terhadap prestasi belajar bahasa Inggris. Mereka mayoritas orang Jwa. Akan tetapi, ternyata penelitiannya justru menunjukkan bahwa tidak ada korelasi antara sikap bahasa mahasiswa dan prestasi belajar bahasa mereka. Penelitian yang sama juga pernah dilakukan sebelumnya oleh Joshua A. Fishman terhadap mahasiswa Sastra Inggris Universitas Indonesia, dan hasilnya setali tiga uang alias sama saja.

Jika belajar bahasa merupakan suatu perilaku berbahasa, dapatlah dikatakan bahwa sikap bahasa positif seseorang belum tentu berpengaruh langsung terhadap perilaku berbahasa secara positif. Namun, justru logis bahwa orang yang bersikap bahasa negatif akan cenderung menunjukkan perilaku berbahasa yang negatif pula. Artinya, seseorang yang tidak suka bahasa Inggris lazimnya tidak akan belajar bahasa Inggris dengan giat dan meraih prestasi terbaik di kelasnya.

Akan tetapi, sejalan dengan pemikiran Baker (1988) di atas, sikap bahasa diperoleh dan dipupuk lewat proses pembelajaran, serta dapat dimodifikasi dengan pengalaman (berbahasa). Dalam pandangan ini, pendidikan memiliki peran tertentu di dalam membentuk atau membangun sikap bahasa seseorang. Bangsa Indonesia, yang berasal dari berbagai etnis dan bahasa daerah, kini cenderung menggunakan bahasa Indonesia dalam hampir semua situasi dan peristiwa komunikasi. Ini semua berkat peran pendidikan yang mewajibkan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar. Orang tua yang beretnis Jawa pun, misalnya, tidak selalu bangga mengajarkan pemakaian

bahasa Jawa di rumah karena mereka khawatir anaknya akan ketinggalan pelajaran di sekolah.

2.2.2. Kompetensi Komunikatif

Chomsky (1965) secara rapi memecahkan kajian sistem kaidah bahasa dari studi kaidah sosial yang menentukan penggunaan bahasa secara kontekstual. Dia melakukan hal ini dengan membuat pembedaan antara kompetensi (*competence*) dan performansi (*performance*), sama halnya antara kompetensi komunikatif (*communicative competence*) dan performansi komunikatif (*communicative performance*). Menurut Chomsky, 'kompetensi' terdiri atas representasi mental aturan-aturan linguistik yang mendasari tata-bahasa internal penutur-pendengar. Tata-bahasa ini lebih bersifat implisit daripada eksplisit dan terbukti ada dalam intuisi-intuisi yang dimiliki penutur-pendengar tentang kegramatikalan kalimat. 'Performansi' terdiri atas pemakaian tata-bahasa ini di dalam pemahaman dan pemroduksian bahasa. Pembedaan antara kompetensi dan performansi telah dikembangkan untuk mencakup aspek-aspek komunikatif bahasa (Ellis 1997a:13).

Secara lebih sederhana, kompetensi mengacu pada pemahaman seseorang tentang sistem kaidah, sedangkan performansi berhubungan dengan penggunaan sistem kaidah itu secara sosial. Kompetensi mengacu pada manusia yang diabstraksikan dari batasan-batasan kontekstual; performansi mengacu pada manusia dalam batasan-batasan kontekstual yang menentukan tindak ujarannya. Kompetensi mengacu pada yang Ideal; performansi mengacu pada kenyataan dalam komunikasi.

'Kompetensi komunikatif' meliputi pengetahuan (*knowledge*) yang penutur-pendengar miliki tentang apa yang mendasari perilaku bahasa (*language behavior*) atau perilaku tutur (*speech behavior*) yang tepat dan benar, dan tentang apa yang membentuk perilaku bahasa yang efektif dalam kaitannya dengan tujuan-tujuan komunikatif. Karena itu, ia mencakup pengetahuan linguistik dan pengetahuan pragmatik. Sementara itu, 'performansi komunikatif' terdiri atas pemakaian aktual (sesungguhnya) dari dua jenis pengetahuan ini—pengetahuan linguistik dan pragmatik—dalam memahami dan menghasilkan wacana (*discourse*). Dengan demikian, performansi komunikatif merupakan manifestasi dari kompetensi komunikatif seseorang dalam komunikasi, dan pada hakikatnya identik dengan perilaku bahasa.

Berikut ini disajikan paparan yang lebih jelas mengenai kompetensi komunikatif, dengan harapan bahwa pengertian atau pemahaman mengenai performansi komunikatif juga semakin komprehensif dan utuh.

Kompetensi komunikatif melibatkan pengetahuan tidak saja mengenai kode bahasa, tetapi juga apa yang akan dikatakan kepada siapa, dan bagaimana mengatakannya secara benar dalam situasi tertentu. Kompetensi komunikatif berkenaan dengan pengetahuan sosial dan kebudayaan yang dimiliki penutur untuk membantu mereka menggunakan dan menginterpretasikan bentuk-bentuk linguistik. Seorang yang menggunakan ekspresi tabu di muka umum dan menyebabkan kejengkelan dikatakan tidak "mengetahui dengan baik", yakni, dia tidak memperoleh kaidah tertentu untuk tindak sosial dalam penggunaan bahasa.

Fonologi, gramatika, dan leksikon yang merupakan sasaran deskripsi linguistik tradisional hanyalah merupakan sebagian dari elemen-elemen dalam kode yang digunakan untuk komunikasi. Yang juga dimasukkan (dalam komunikasi) adalah fenomena paralinguistik dan non-verbal yang memiliki makna konvensional dalam masyarakat tutur, dan pengetahuan mengenai rentangan varian dalam semua elemen yang tersedia untuk mentransmisikan informasi sosial dan referensial. Kemampuan untuk membedakan antara varian-varian yang berfungsi sebagai pemarkah (*marker*) kategori sosial atau membawa makna lain dan makna yang tak signifikan, dan pengetahuan tentang makna suatu varian dalam situasi tertentu, semuanya merupakan komponen komunikatif.

Sebagai deskripsi praktisnya, kompetensi komunikatif menjangkau baik pengetahuan dan harapan tentang siapa yang bisa atau tidak bisa berbicara dalam setting tertentu, kapan mengatakannya dan bilamana harus tetap diam, siapa yang bisa diajak bicara, bagaimana seseorang berbicara kepada orang yang status atau peranannya berbeda, perilaku non-verbal apakah yang sesuai untuk berbagai konteks, rutin-rutin apakah yang terjadi untuk alih-giliran dalam percakapan, bagaimana menawarkan bantuan atau kerjasama, bagaimana meminta dan memberi informasi, bagaimana menekankan disiplin, dan sebagainya—pendeknya, segala sesuatu yang melibatkan penggunaan bahasa dan dimensi komunikatif dalam setting sosial tertentu.

Konsep kompetensi komunikatif perlu ditambahkan dalam konsep kompetensi kebudayaan, atau keseluruhan pengetahuan dan keterampilan yang dibawa dalam suatu situasi. Pandangan ini konsisten dengan pendekatan semiotik yang

mendefinisikan kebudayaan sebagai makna, dan memandang semua etnografer (komunikasi) berhubungan dengan simbol (Douglas 1970). Terlebih lagi, sistem kebudayaan hakikatnya merupakan pola simbol, dan bahasa merupakan salah satu sistem simbol dalam kerangka ini.

Yang paling utama, semua aspek kebudayaan relevan dengan komunikasi, tetapi aspek-aspek yang memiliki pengaruh langsung pada bentuk-bentuk dan proses komunikatif adalah struktur sosial, nilai dan sikap yang dimiliki mengenai bahasa dan cara-cara berbicara, kerangka kategori konseptual yang berasal dari pengalaman yang sama, dan cara-cara pengetahuan dan ketrampilan (termasuk bahas) ditransmisikan dari satu generasi ke generasi berikutnya, dan kepada anggota baru kelompok. Dengan kata lain, struktur sosial, nilai dan sikap individu, dan kompetensi komunikasi ikut menentukan adanya bentuk dan proses komunikasi (Troike 1970). Meskipun demikian, kompetensi dimensi *reseptif* dam *produktif* agaknya tidak selalu koeksisten. Anggota-anggota dari masyarakat sama bisa memahami varietas bahasa yang berbeda menurut kelas sosial, daerah, jenis kelamin, usis, pekerjaan, tetapi hanya sedikit mimik muka yang berbakat yang mampu berbicara dengan mereka semua. Dalam masyarakat tutur multilingual, anggota memiliki kompetensi reseptif yang sama dalam lebih dari satu bahasa tetapi bervariasi secara luas dalam kemampuan relatifnya untuk berbicara bahasa yang satu atau bahasa lain.

Kemudian, adakah hubungan kompetensi komunikatif dengan sikap bahasa atau sebaliknya? Tentang hubungan antara sikap bahasa dan kompetensi komunikatif, pemikiran Rod Ellis berkaitan dengan sikap bahasa pembelajar bahasa asing berikut

ini cukuplah penting. Menurut Ellis (1997a:198) sikap pembelajar bahasa memiliki dampak pada tingkat profisiensi (penguasaan) bahasa sasaran yang dicapai oleh pembelajar individual, dan sikap itu sendiri dipengaruhi oleh 'keberhasilan (belajar) ini'. Dengan demikian, pembelajar dengan sikap positif, yang mengalami keberhasilan, akan mendapati sikapnya mengalami penguaatan (*reinforcement*). Sikap negatif pembelajar mungkin diperkuat oleh kurangnya keberhasilan. Juga ada kalanya pembelajar yang mulai dengan sikap positif tetapi, karena suatu alasan, mengalami kesempatan belajar yang tak memadai, gagal memperoleh kemajuan dan kemudian menjadi lebih negatif dalam penampilannya.

Karena profisiensi (penguasaan) bahasa pada hakikatnya bagian tak terpisahkan dari kompetensi komunikatif, dan karena sikap pembelajar bahasa mempengaruhi tingkat profisiensi bahasa, maka dapatlah dikatakan bahwa sikap bahasa berhubungan erat atau berdampak signifikan terhadap kompetensi bahasa. Konteks kebahasaannya lebih bersifat reseptif daripada produktif, karena itulah sikap mempengaruhi kompetensi komunikatifnya.

Akan tetapi, masih boleh jadi terjadi kondisi sebaliknya, yakni jika tidak dalam konteks pembelajaran bahasa. Jika konteks kebahasaannya adalah proses komunikasi yang produktif, logikanya bisa berlawanan. Maksudnya, dalam kegiatan komunikasi, kompetensi komunikatif seseorang akan menentukan pola sikap bahasa yang dimilikinya. Dengan kompetensi komunikatif mumpuni dia diasumsikan memiliki sikap bahasa yang positif, terbuka, tidak *chauvinistik*, dan akomodatif serta adaptif terhadap perbedaan linguistik dan kultural bahasa lain, sehingga komunikasi menjadi

lancar dan berhasil. Hal ini akan berbeda bilamana orang tersebut hanya memiliki kompetensi komunikatif yang rendah.

2.2.3. Pemilihan Bahasa

Dengan adanya berbagai varietas bahasa di dalam repertoir komunikatif masyarakat, dan berbagai subvariasi yang tersedia bagi subkelompok dan individu, para penutur haruslah memilih kode dan strategi interaksi untuk digunakan dalam konteks yang spesifik. Kemampuan untuk mengetahui alternatif dan kaidah untuk menentukan pilihan yang tepat dari berbagai alternatif itu merupakan bagian dari kompetensi komunikatif penutur.

Dengan kata lain, seseorang yang melakukan pemilihan bahasa dalam komunikasinya sebenarnya sedang menerapkan kompetensi komunikatifnya, atau sedang menunjukkan performansi komunikatifnya. Sebagai perilaku, pemilihan bahasa hakikatnya merupakan tindakan atau perilaku dalam menggunakan bahasa terpilih berdasarkan situasi yang tersedia. Karena itu, Fasold (1984) dalam Ibrahim (1992:92) menggunakan istilah "perilaku pilihan bahasa."

Meski demikian, untuk kepentingan studi ini, istilah 'pemilihan bahasa' digunakan secara praktis untuk merujuk ke performansi komunikatif dan/atau perilaku bahasa (*language behavior*)—kendati perilaku bahasa mengandung cakupan pengertian yang lebih luas.

Sebuah contoh baik tentang pemilihan bahasa di dalam masyarakat bilingual atau multilingual dapat ditemukan dalam studi Blom & Gumperz (1972). Studi mereka berfokus pada pemilihan bahasa di Norwegia dimana penutur dihadapkan pada pilihan

antara varietas bahasa lokal dan varietas bahasa standar (baku). Situasi ini mirip dengan Indonesia dimana masyarakat juga dihadapkan pada pilihan antara bahasa daerah sebagai bahasa ibu/pertama dan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional.

Dalam hal ini, Blom & Gumperz (1972) mengajukan dua tipe pilihan kode: peralihan situasional (*situational switching*) dan peralihan metaforik (*metaphorical switching*). Peralihan situasional digunakan untuk mengacu ke pemilihan bahasa yang bergantung pada aneka aspek situasi, termasuk pula derajat formalitas. Sebagaimana yang dipkrediksikan, ketika situasi kebahasaannya formal dan relatif bebas dari masalah pribadi, varietas bahasa standarlah yang dipilihnya, sedangkan varietas lokal dipilih tatkala situasinya informal. Peralihan metaforik digunakan untuk menjelaskan pemilihan bahasa yang ditentukan oleh hubungan para partisipan. Lazimnya partisipan yang menjadi anggota komunitas etnis tertentu, dia akan menggunakan bahasa etnis tersebut. Dalam hal ini, Blom & Gumperz (1972) menemukan, bahwa di kantor orang masih menggunakan varietas lokal (bukannya varietas standar) meskipun varietas standar semestinya justru perlu digunakan. Orang menyambut yang lain dalam varietas lokal, begitu pula saat menanyakan tentang masalah keluarga. Dalam situasi ini varietas lokal berfungsi sebagai simbol persahabatan.

Para psikolog memiliki pandangan berbeda dalam memahami pemilihan bahasa. Dalam masyarakat bilingual atau multilingual, penutur menerapkan asumsi dasar pengetahuan tentang potensi linguistik lawan-bicaranya (Clyne 1991). Asumsi semacam ini didasarkan pada Teori Akomodasi bahasa atau *Speech Accomodation Theory* (Giles & Smith 1979; Thakerar, Giles & Cheshire 1982). Menurut mereka,

tatkala penutur mengalami proses wacana interaktif, dia mungkin akan *konvergen* terhadap kode bahasa lawan bicaranya, atau mungkin *divergen* terhadap kode bahasanya sendiri. Keputusan untuk menggunakan salah satu kode bahasa bergantung pada ongkos (*cost*) atau *reward* yang dipersepsikan akan diperolehnya.

Sebagai ilustrasi konkretnya, situasi kebahasaan yang ada di Perumnas KotaBaru Driyorejo Gresik dapat disajikan sepintas. Seorang pendatang di tengah masyarakat tutur yang baru akan berkecimpung secara kultural (termasuk kebahasaan). Ketercimpungan itu membawa ia untuk mengalami kontak-kontak bahasa (dan kultural), dan terjadilah adaptasi antar bahasa atau antar dialek dalam komunikasi-interaksi sosial, utamanya yang bersifat informal. Dari situ, muncullah berbagai sikap dan/atau perilaku bahasa yang ia tunjukkan: kadang ia membaur dengan bahasa/dialek setempat, kadang memakai bahasa/dialek asalnya, kadang menuturkan kombinasi antar-bahasa/dialek yang ada dan berkembang, dan kadang memakai bahasa nasional yang bisa dipahami oleh berbagai kelompok penutur.

Dalam komunikasi-interaksi sosial tersebut, orang mengidentifikasi dirinya dengan kode bahasa/dialek yang digunakan, dan kemudian akan menentukan perilaku pemilihan bahasanya yang, antara lain, berwujud apa yang disebut alih kode (*code switching*), misalnya peralihan dari ragam bahasa satu ke ragam bahasa lain, atau dari dialek satu ke dialek lain. Dalam masyarakat multietnis dan multilingual, kiranya tiada seorang pun yang hanya memiliki satu kode bahasa dalam *repertoir*-nya. Yang kerap terjadi, bahkan, adalah orang akan senantiasa terlibat dalam kontak antar-bahasa atau antar dialek.

Sementara itu, kita mafhum, bahwa dari sekian fungsi bahasa, ada yang disebut fungsi interaksional dan fungsi informatif (Halliday 1984:17). Ini berarti, bahwa bahasa bisa berfungsi untuk menciptakan hubungan sosial dan komunikasi-interaksi, serta untuk saling-tukar informasi di antara komunitas bahasa penuturnya. Kelancaran hubungan ini banyak dideterminasi oleh sama/mirip-tidaknya ragam bahasa yang digunakan. Komunikasi-interaksi akan lambat, atau bahkan mandek, manakala ragam bahasa yang dipakai oleh penutur-pendengar tidak bisa saling dimengerti.

Untuk membangun interaksi sosial menjadi cukup lancar, orang akan berusaha menerapkan kemampuan integrasi sosial dengan kelompok masyarakat dimana ia tinggal. Tingkat integrasi sosial (dan psikologis) seseorang diasumsikan cukup menentukan cepat-tidaknya ia melakukan akomodasi sosial, termasuk akomodasi berbahasa. Asumsi didasarkan pada realitas bahwa kesupelan seseorang dalam pergaulan akan banyak menentukan cepat-tidaknya ia diterima oleh lawan bicaranya.

Deskripsi di atas menunjukkan, bahwa pemilihan bahasa dalam masyarakat multilingual memiliki pola yang rumit dan tidak mudah dipetakan. Akan tetapi, hakikatnya, konvergensi dan divergensi bahasa tersebut dapat dipetakan dengan merujuk Fasold (1984:184), yakni ada tiga jenis pilihan dalam berbahasa: (1) memilih satu variasi bahasa yang sama (*intra language variation*), (2) alih kode (*code switching*), dan (3) campur kode (*code mixing*). Sebelum itu, Giles (1979) mengidentifikasi tiga pola penggunaan bahasa: (1) penggunaan bahasa etnik minoritas; (2) bilingual dalam bahasa etnik dan bahasa dominan; (3) monolingual dalam dalam bahasa dominan. Sejalan dengan dua pemetaan itu, Koiri dan Fahri (1991) juga

menemukan empat tipe perilaku berbahasa kaum migran Jawa di Surabaya: (i) adaptasi dan integrasi sosial dengan dialek Surabaya; (ii) divergensi berbahasa (linguistik atau psikologis) yang agak antipati terhadap dialek Surabaya; (iii) pencampuran dialek asal daerah dan dialek Surabaya; dan (iv) pemakaian bahasa Indonesia.

Merujuk Giles (1979), Fasold (1984) dan Koiri dan Fahri (1991) tersebut, dapatlah dikemukakan, bahwa seorang anggota masyarakat berkemungkinan menerapkan pemilihan bahasa berikut ini: (1) menggunakan bahasa daerah/pertamanya (divergen); (2) menggunakan bahasa daerah/pertamanya dan bahasa Indonesia (konvergen); dan (3) menggunakan bahasa Indonesia (konvergen). Pola pemilihan bahasa semacam ini diprediksikan akan dapat ditemukan dalam penelitian.

Dalam konteks semacam ini Teori Akomodasi Bahasa sangat penting dalam studi ini karena ia akan mampu mendeskripsikan situasi linguistik diantara penuturnya. Aneka bahasa-etnis dan etnisitas menuntun penuturnya untuk lebih menyadari akan ongkos dan hadiah dari pemilihan bahasa yang dilakukannya. Setiap pemilihan bahasa yang diambil akan membawa konsekwensi tertentu bagi penutur bersangkutan.

Masalahnya, apakah yang lazim mendorong orang memilih bahasa tertentu daripada bahasa lain dalam situasi tertentu? Dalam masyarakat bilingual (dwibahasa) atau multilingual (multibahasa), pemilihan bahasa dideterminasi oleh dua faktor utama: 'intra-linguistik' dan 'ekstra-linguistik' (Weinreich 1953:3; Setiawan 2001).

Intralinguistik mengacu ke profisiensi atau penguasaan penutur terhadap bahasa (sasaran) yang dimaksud. Esktralinguistik berkaitan dengan kode-kode estetik atau etika perilaku (Smith 1973:105). Implikasinya, ketika seseorang memilih suatu bahasa daripada bahasa yang lain dalam situasi komunikasi tertentu, hal ini menunjukkan bahwa dia telah menguasai pengetahuan tentang ketepatan menggunakan bahasa-bahasa tersebut (Suharsono 1995:13). Performasi komunikatif yang ditunjukkannya , yakni pemilihan bahasa, merupakan perwujudan atau manifestasi dari kompetensi komunikatifnya. Penutur bilingual sadar akan konsekwensi yang harus ditanggungnya kalau dia menggunakan satu bahasa daripada bahasa lain.

Dalam kerangka pandang demikian, kompetensi komunikatif dapat dikategorikan sebagai faktor intralinguistik. Pasalnya, kompetensi komunikatif hakikatnya merupakan kompetensi penutur tentang kaidah-kaidah kebahasaan dan bagaimana menerapkan kaidah-kaidah itu dalam situasi komunikasi. Secara teoretis, dengan demikian, kompetensi komunikatif seseorang mempengaruhi pemilihan bahasanya. Seberapa besar pengaruh kompetensi komunikatif terhadap pemilihan bahasa menjadi salah satu fokus tujuan penelitian ini.

Adapun sikap bahasa kiranya dapat dikategorikan sebagai faktor ekstralinguistik. Pembicaraan mengenai hubungan antara sikap bahasa dan perilaku pemilihan bahasa telah disinggung pada butir 2.2.1. Sementara itu, hubungan stratifikasi sosial dalam bidang pendidikan, pekerjaan, dan penghasilan dengan pemilihan bahasa juga sudah dibicarakan pada butir 2.1.2. Sikap bahasa dan

stratifikasi sosial, secara teoretis, juga mempengaruhi pemilihan bahasa seseorang, dengan variasi tingkat pengaruhnya.

Justru yang akan menarik lagi adalah apakah stratifikasi sosial seseorang mempengaruhi sikap bahasa, juga kompetensi komunikatif, yang kemudian akan mempengaruhi lanjut pemilihan bahasa. Dengan kata lain, stratifikasi sosial mungkin mempengaruhi sikap bahasa dan kompetensi komunikatif, baik secara bersama-sama maupun secara individual, dan kemudian menentukan pemilihan bahasa. Hal ini didasarkan pada kajian teoretis pada butir 2.2.2, bahwa dalam konteks kebahasaan yang reseptif, sikap bahasa bisa mempengaruhi kompetensi komunikatif; sementara dalam konteks kebahasaan produktif (dalam komunikasi) kompetensi komunikatif bisa mempengaruhi sikap bahasa. Sementara itu, sikap bahasa dan kompetensi komunikatif sebagai faktor esktralinguistik dan intralinguistik dapatmempengaruhi pemilihan bahasa.

Penggabungan sikap bahasa dan kompetensi komunikatif menjadi suatu konsep baru, dengan istilah baru, memang tidak mudah. Akan tetapi, secara substansial, karena keduanya saling berhubungan, sikap bahasa dan kompetensi komunikatif agaknya dapat menjadi kesatuan yang penting dalam menentukan pemilihan bahasa. Besar-kecilnya potensi pengaruh gabungan dari dua unsur linguistik ini bergantung pada masing-masing dalam memberikan pengaruh terhadap lainnya. Dan hal itu berkaitan dengan pemilihan bahasa. Meskipun demikian, untuk kepentingan studi ini, peneliti memberikan sebutan untuk gabungan sikap bahasa-kompetensi komunikatif

ini sebagai "modal komunikatif" (*communicative capital*) sebelum ditemukan istilah yang paling tepat untuknya lewat suatu studi mendalam.

2.3. Kerangka Teori Sosial

Untuk memahami dan menjelaskan fenomena sosial dalam penelitian ini dipergunakan teori-teori yang relevan dan memadai. Teori-teori itu meliputi Teori Pilihan Rasional (*Rational ChoiceTheory*), interaksi simbolik (*Symbolic Interaction Theory*), dan Teori Akomodasi (*Accommodation Theory*). Kendati penelitian ini mempergunakan tiga teori itu, tetapi ia berpusat pada Teori Pilihan Rasional. Jadi, dua teori yang lain berfungsi sebagai pendukung untuk menjelaskan.

Adapun rasionalisasi pemilihan teori sosial itu dapat digambarkan singkat berikut ini: Fenomena pemilihan bahasa di antara anggota masyarakat Jawa di Perumnas KBD Gresik untuk kepentingan fungsional dalam kegiatan komunikasi dan interaksi sosial melibatkan beberapa faktor, antara lain stratifikasi sosial (dalam bidang pendidikan, pekerjaan, penghasilan), sikap bahasa, dan kompetensi komunikatif. Untuk menjelaskan fenomena yang menonjolkan perilaku memilih, digunakanlah *Teori Pilihan Rasional*. Teori Pilihan Rasional James Colleman tidak secara cermat menjelaskan makna pilihan tindakan. Oleh sebab itu, Teori Pilihan Rasional dilengkapi dengan *Teori Interaksi Simbolik*. Teori ini juga tidak menyinggung masalah akomodasi sosial dan akomodasi berbahasa, karena itu perlu dituntaskan dengan *Teori Akomodasi*, baik sebagai teori sosial maupun teori psikologi sosial bahasa.

2.3.1. Teori Pilihan Rasional

Teori Pilihan Rasional (*Rational Choice Theory*) sering disebut teori tindakan rasional (*Rational Action Theory*). Teori ini pada mulanya mendominasi ilmu ekonomi, kemudian merambah ke wilayah lainnya, seperti politik, psikologi, sosiologi, dan bahkan ilmu humaniora. Meski teori ini berakar pada sosiologi Max Weber, dalam sosiologi ia populer sekitar tahun 1990-an, setelah muncul penerbitan jurnal *Rationality and Society* tahun 1989 pendirian Seksi Pilihan Rasional (*Rational Choice Section*) dalam Asosiasi Sosiologi Amerika (*American Sociology Association*) tahun 1994.

Dalam penggolongan Poloma (2000) Teori Pilihan Rasional berada pada perspektif naturalistik, bagian penggunaan matematika dalam teori sosiologi; sedangkan dalam penggolongan perspektif Haralambos dan Holborn (2000:1031-1079) tidak dimasukkan, baik pada perspektif struktural, tindakan sosial, maupun penyatuan pendekatan struktural dan tindakan sosial. Poloma (2000) tidak secara langsung menyebut Teori Pilihan Rasional, tetapi dengan memasukkan teori permainan (*games theory*) dalam kelompok sosiologi naturalistik, padahal teori itu bagian dari Teori Pilihan Rasional. Teori Pilihan Rasional memang golongan teori naturalitistik. Akan tetapi, teori itu memiliki kesempatan dalam sosiologi evaluatif, karena dapat dgiunakan untuk pengukuran pengambilan kebijakan (Friedman dan Hechter dalam Ritzer, ed., 1990:220). Haralambos dan Holborn (2000:1031-1079), walaupun mengungkap adanya perspektif penyatuan antara pendekatan struktural dan tindakan sosial, tetapi yang disebut hanya Teori Strukturasi Giddens. Melberg

(http:/2home.sol.no/-hmelberg/papers/950520.htm) dan juga Mouzelis (1995) menyebutkan bahwa Teori Pilihan Rasional termasuk golongan teori dalam perspektif penyatuan antara pendekatan struktural dan tindakan sosial itu (*macro-micro linkage*). Sebutan itu berbeda dengan yang dikatakan Ritzer (dalam Ritzer 1990:351), bahwa Teori Pilihan Rasional tidak menunjukkan penyatuan (*linkage*) secara eksplisit, hanya menunjukkan kerja teoretis makro-mikro kontemporer.

Pandangan-pandangan di atas berbeda dengan Ritzer dan Smart, ed. (2001), yang mengkategorikan dalam teori sosial kontemporer. Sayangnya, Ritzer dan Smart, ed. (2001) tidak begitu jelas dalam pembedaan antara teori sosial klasik dan teori sosial kontemporer.

Menurut Melberg (http:/2home.sol.no/-hmelberg/papers/950520.htm) model pilihan rasional menjadi berharga dalam sosiologi, karena menyediakan aturan berdasarkan pengalaman dan praktik atau petunjuk praktis, "*rule of thumb*", tentang bagaimana tindakan dipilih (mekanisme). Akan tetapi, karena pilihan rasional memerlukan banyak faktor, seperti pilihan yang diambil, maka untuk penjelasan harus dipergunakan model-model yang lain. Model pilihan rasional sangat penting untuk menjelaskan pertukaran sosial, dalam arti pemilihan tindakan dalam situasi interaktif yang sangat dipengaruhi oleh percobaan pemaksimalan menurut tujuan. Model pilihan rasional hanya merupakan mekanisme yang memerlukan fakta-fakta tertentu yang eksternal (seperti tujuan dan makna tindakan). Jadi, teori-teori yang lain diperlukan untuk menjelaskan tujuan dan pengertian yang mempengaruhi situasi (seperti Teori

Interaksi Simbolik). Model pilihan rasional sangat baik untuk menjelaskan masalah tindakan kolektif yang ada dan dipecahkan.

Sebagaimana identifikasi Huber, yang dikutip Heckathorn (dalam Ritzer dan Smart 2001:274), sosiologi pilihan rasional mencakup sebagian besar penelitian sosiologis dalam kesamaan analisis mengenai perilaku yang purposif. Dengan demikian, perilaku purposif atau bertujuan merupakan elemen penting dalam Teori Pilihan Rasional. Ciri terpenting sosiologi pilihan rasional adalah komitmennya yang mendalam pada individualisme metodologis (*methodological individualism*) yang berakar pada sosiologi Max Weber. Ciri yang kedua, bahwa pilihan rasional memandang konsep memilih (*choice*) sebagai proses pengoptimalan.

Para tokoh Teori Pilihan Rasional seperti James S. Colleman, Richard M. Emerson, Karen S. Cook, Peter M. Bau, dan juga Robert von Mises menunjukkan harapan yang sama, yakni model pilihan rasional berupaya menunjukkan (1) dasar fenomena sosial itu nyata, (2) para aktor bertujuan mengejar kepentingan secara rasional, (3) kecanggihan individualisme metodologis, (4) fokus analisis lebih pada aktor dan strateginya, daripada sistem seluruhnya, dan (5) logika deduksi untuk menjelaskan fenomena (Mozelis 1995).

Friedman dan Hechter (dalam Ritzer 1990:220-223) juga mencatat tiga kelebihan yang dimiliki Teori Pilihan Rasional, yaitu memiliki kontribusi pada area pengukuran, sebagai pendekatan pertikaian dalam institusi sosial (seperti hukum, peraturan-peraturan, norma, dan nilai-nilai budaya), dan menjadi jalan kemungkinan untuk menjawab pilihan tujuan individu. Adanya kesempatan untuk pengukuran, yang

bisa dilakukan pilihan rasional adalah pada proses pembuatan keputusan (*decision-making processes*) dan dalam agregasi (*aggregation*).

Teori Pilihan Rasional, menurut Friedman dan Hechter dalam Ritzer dan Goodman (2004:357-58), memusatkan perhatian pada aktor. Artinya, aktor memiliki tujuan dan tindakannya tertuju pada upaya-upaya untuk mencapai tujuan itu. Aktor dipandang mempunyai pilihan (atau nilai, keperluan). Yang penting bukan apa yang menjadi pilihan atau apa yang menjadi sumber pilihan aktor, melainkan kenyataan bahwa tindakan dilakukan untuk mencapai tujuan yang sesuai dengan tingkatan pilihan aktor.

Ada dua pemaksa tindakan. *Pertama*, keterbatasan sumber. Aktor memiliki sumber berbeda dan akses berbeda terhadap sumber daya lain. Aktor yang bersumber-daya besar mencapai tujuannya dengan relatif mudah. Sebaliknya, yang bersumber-daya sedikit mencapai tujuannya dengan sulit atau mustahil. *Kedua*, lembaga sosial. Aktor individual biasanya akan:

> Merasakan tindakannya diawasi sejak lahirnya hingga mati oleh aturan keluarga dan sekolah; hukum dan peraturan; kebijakan tegas; gereja; sinagoge dan masjid; rumah sakit dan pekuburan. Dengan membatasi rentetan tindakan yang bolch dilakukan individu, dengan dilaksanakannya aturan permainan—meliputi norma, hukum, agenda, dan aturan pemungutan suara—secara sistematis mmengaruhi akibat sosial (Friedman dan Hechter 1988: 202).

Colleman merupakan tokoh utama Teori Pilihan Rasional yang tetap teguh, sedangkan yang lain bergabung dalam model pertukaran sosial (*social exchange*) yang juga segaris dengan pilihan rasional. Posisi Colleman dekat ke arah atomisme sosial, karena memasukkan proposisi makro ke tingkat mikro. Meski demikian tiga proposisi

Coleman (dalam Mozelis 1995) menggambarkan bentuk ideal penjelasan peristiwa sebagai berikut.

1. Proposisi makro ke mikro, yang mengungkapkan pengaruh faktor tingkat masyarakat atas individu;
2. Proposisi mikro ke makro, yang menggambarkan proses-proses pada tingkatan mikro;
3. Proposisi mikro ke makro, yang menunjukkan bagaimana sejumlah peristiwa pada tingkat individu menghasilkan perubahan-perubahan pada tingkat masyarakat;

Dijelaskan oleh Heckathorn (dalam Ritzer dan Smart 2001:274) bahwa sosiologi pilihan rasional memandang bahwa "memilih" itu sebagai tindakan yang bersifat rasional. Meski demikian, berbeda dengan pandangan ekonomi mikro klasik yang melihat proses rasional sekadar untuk memaksimalkan pendapatan dan keuntungan. Sosiologi pilihan rasional memandang bahwa dorongan bertindak lebih didasarkan pada tujuan-tujuan altruistik (*altruistic*) dan egoistik (*egoistic*) yang kompleks. Selain itu, sosiologi pilihan rasional juga memandang bahwa rasionalitas itu memiliki keterbatasan-keterbatasan. Jadi, adakalanya suatu tindakan yang sudah diperhitungkan secara rasional, ternyata memiliki akibat yang tidak diharapkan; bahkan, akibat tersebut sama sekali tidak dapat diantisipasi sebelumnya. Semua ini terjadi karena keterbatasan rasio dalam memperoleh dan mengolah informasi.

Apakah yang membedakan sosiologi pilihan rasional dan sosiologi klasik yang bertumpu pada individualisme metodologis? Pada dasarnya tak ada perbedaan esensial

antara keduanya. Yang berbeda hanyalah soal konsepsi tentang "memilih" yang tampak eksplisit pada sosiologi pilihan rasional, dan implisit pada sosiologi klasik (Heckathorn dalam Ritzer dan Smart 2001:274).

Teori Pilihan Rasional mengandung asumsi-asumsi berikut ini:

1. Fenomena sosial, ekonomi, dan fenomena tingkat kemasyarakatan (*societal*) lainnya hanya dapat dijelaskan melalui pemahaman atas tindakan individu-individu, atau suatu hubungan kausal penjelasan dan keberadaannya hanya dapat dicari pada tingkat mikro; dan
2. Tindakan dan institusi pada dasarnya adalah tindakan sosial. Oleh sebab itu, Teori Pilihan Rasional menolak anggapan atomisme sosial truistik (*truistic social atomism*) yang memandang masyarakat sekadar merupakan gabungan individu-individu dan institusi berisi penjumlahan orang-orang, aturan-aturan, dan peran-peran (Heckathorn dalam Ritzer dan Smart 2001:274-275).

Jika struktur umum Teori Pilihan Rasional dicermati, teori ini hakikatnya mencakup terminologi teoretis sebagaimana diungkap Heckathorn (dalam Ritzer dan Smart 2001:276) seperti di bawah ini.

1. Sekumpulan aktor yang berfungsi sebagai pemain dalam sistem;
2. Alternatif-alternatif yang tersedia bagi masing-masing aktor;
3. Seperangkat hasil yang mungkin didapat dengan adanya alternatif-alternatif yang tersedia bagi aktor;
4. Pemilihan kemungkinan hasil oleh aktor; dan
5. Harapan aktor terhadap akibat parameter-parameter sistem.

Bagian substansial Teori Pilihan Rasional adalah dilema sosial (*social dilemma*). Dilema sosial adalah setiap situasi yang secara potensial menimbulkan konflik antara individu dan kelompok kolektif. Ada tiga jenis dilema, dan semua berkaitan dengan isu seputar kepercayaan, persaingan, dan koordinasi. Ketiga dilema itu sebagai berikut.

1. Dilema I: *Prisoner's Dilemma* 'dilema-tahanan' merupakan gambaran untuk menjelaskan kasus tindakan-tindakan rasional individu yang mengarah kepada hasil yang secara kolektif irasional.
2. Dilema II: digambarkan dalam terminologi permainan teoretis "*Chicken Game*". Permainan ini menyangkut kompetisi untuk memperebutkan hal-hal yang langka.
3. Dilema III: digambarkan secara teoretis sebagai "*Assurance Game*". Permainan ini muncul ketika koordinasi diperlukan untuk menentukan langkah bersama.

Prisoner's Dilemma menurut Bartos (dalam Poloma 2000:202) termasuk teori permainan model non-zero-zum. Teori itu juga disebut "*battle of sex*". Dilema dua orang tahanan dalam satu kejahatan besar yang ditahan dalam ruang berbeda ini mengetengahkan kemungkinan tindakan bekerja sama atas dasar kepercayaan atau bertindak demi kepentingan sendiri.

Inti masalah permainan teoretis "*Chicken Game*" tentang alokasi konsesi. Pemain berupaya menggabungkan berbagai kepentingan untuk menghindari konflik. Caranya dengan mempersaingkan kepentingan-kepentingan dengan persetujuan,

seperti alokasi keberanian, kehormatan, dan keuntungan (Heckathorn dalam Ritzer dan Smart 2001:277). Wujud resolusi yang bisa dilakukan aktor ada dua, yakni model pertama, melalui perundingan (*bargaining*) dengan menunjukkan posisi strategisnya dalam penawaran konsesi-konsesi, kemungkinan persetujuan yang bisa muncul dari konsesi-konsesi itu, dan asal mula konflik bila persetujuan gagal; model kedua, membatasi lingkup tawar-menawar melalui penetapan legitimasi hak milik atas sumber-sumber yang langka. Model pertama selaras dengan teori resistensi yang dikembangkan oleh Heckathorn.

Permainan teoretis "*Assurance Game*" mengidentifikasikan masalah di sekitar koalisi dalam sebuah sistem tindakan kolektif yang ditentukan oleh koordinasi sebagai pembentuk partisipasi. Koordinasi menjadi sangat diperlukan.

Model-model pilihan rasional dapat dibedakan berdasarkan bentuk-bentuk institusional. Bentuk institusional ditentukan berdasarkan penyusunan dan target pengaruhnya. Penyusunan itu bisa oleh aktor tunggal (*single actor*) atau aktor jamak (*multiple actors*); dan target pengaruh bisa terhadap seorang saja atau sejumlah orang. Berdasarkan hal itu, literatur pilihan rasional membedakan dan memfokuskan pada empat bentuk institusional yaitu norma, pasar, hirarkhi, dan pemilihan (Heckathorn dalam Ritzer dan Smart 2001:278-279).

Dalam bentuk institusional norma, Teori Pilihan Rasional memfokuskan pengamatannya pada kemunculan dan pelaksanaan norma-norma. Fokus itu terjabarkan dalam bentuk keterlibatan aktor-aktor dalam struktur interaksional pada

norma-norma dan pengawasan aktor-aktor atas pelanggaran serta gerakan ketidakpuasan kolektif (Heckathorn dalam Ritzer dan Smart 2001:278).

Pasar merupakan institusi kedua dalam pilihan rasional. Pasar meliputi pasar-pasar petani, pasar uang, dan juga pasar perkawinan, yang semua ditandai adanya sistem transaksi. Dalam pasar perkawinan memposisikan individu dalam nilai pasar yang sangat bergantung pada pelbagai faktor, seperti prospek kerja, keatraktifan fisik, dan sifat-sifat kepribadian. Dalam pasar perkawinan, transaksi tidak bersifat ekonomis.

Institusi ketiga dalam Teori Pilihan Rasional adalah hirarkhi. Ada prinsip fundamental dalam organisasi yakni aktor menggunakan kekuasaan; atau seorang aktor berpengaruh atas aktor-aktor lain yang tersubordinasi. Dalam susunan sederhana, subordinasi dalam suatu hubungan menjadi superordinasi dalam hubungan yang lain, sehingga membentuk struktur piramidal.

Pemilihan merupakan tempat institusionalisasi. Dalam proses itu aktor pemilih dapat mempengaruhi kolektivitas. Tiga tipe dilema di atas dapat muncul dalam institusi pemilihan.

Selain variasi bentuk institusional, Teori Pilihan Rasional juga sangat memperhatikan variasi kondisi tindakan. Variasi kondisi tindakan menentukan variasi tipe Teori Pilihan Rasional sesuai yang secara analitis (Melber, http:/2home.sol.no/-hmelberg/papers/950520.htm). Perbedaan kondisi tindakan yang paling mendasar adalah kondisi parametrik dan kondisi strategis. Kondisi parametrik berarti pengambil keputusan atau pelaksana tindakan, bila melakukan proses optimalisasi, tidak perlu

membuat perhitungan tentang bagaimana orang-orang lain akan membuat perhitungan mengenai apa yang dilakukan dalam mengambil keputusan. Bila ini yang terjadi, maka teori yang tepat adalah teori keputusan. Sebaliknya, bila aktor perlu membuat perhitungan mengenai bagaimana orang lain akan memilih (tindakan) dalam mengambil keputusan (tindakan-tindakan) mereka sendiri, maka kondisi-kondisi itu bersifat strategis. Kondisi itu menjadikan teori permainan adalah teori pilihan/tindakan strategis.

Kondisi yang diasumsikan dalam teori keputusan adalah pengambil keputusan dapat melakukan tindakan alternatif, tingkat kepastian pengambil keputusan mengenai hasil-hasil yang relevan dari setiap tindakan yang ada, dan peringkat pengambil keputusan mengenai tindakan-tindakan yang ada berdasarkan peringkat hasil-hasil yang relevan itu. Secara konvensional tingkat kepastian pengambilan keputusan dibagi menjadi tiga tipe, yaitu keputusan dengan kepastian diyakini benar hasil-hasilnya relevan oleh pengambil keputusan, keputusan dengan resiko melalui satu cara bisa ditetapkan probabilitas hasil-hasil itu menurut pengambil keputusan; dan keputusan dengan ketidakpastian yang menurut pengambil keputusan tidak dapat menetapkan probabilitasnya. Jika keputusan diambil dalam kepastian pilihan optimal merupakan tindakan berperingkat paling tinggi; jika keputusan diambil dengan resiko teori kemanfaatan yang diharapkan biasanya disebarluaskan. Analisis terhadap keputusan-keputusan yang diambil dengan ketidakpastian bersifat kontroversial, tetapi biasanya melibatkan upaya untuk menetapkan beberapa jenis probabilitas.

Teori permainan (*games theory*) mengembangkan Teori Pilihan Rasional kepada situasi-situasi strategis. Permainan bisa diklasifikasikan dengan banyak cara, termasuk *zero-sum* dan *non-zero-sum*; bentuk normal (atau strategis) dan bentuk ekstensif; informasi yang lengkap dan tidak yang lengkap; informasi sempurna dan yang tidak sempurna; kooperatif dan non-kooperatif; kepastian sekali tembak atau kepastian berulang-ulang (atau berkali-kali secara tidak pasti). Pada umumnya ada kecenderungan untuk menerima pendapat bahwa permainan kooperatif bisa disederhanakan menjadi permainan non-kooperatif, dengan memasukkan beberapa gerakan tawar-menawar secara dini.

Teori Pilihan Rasional tidak dapat menyentuh makna pilihan tindakan bagi orang-orang di sekeliling para aktor. Berdasarkan hal itu, untuk menjelaskan fenomena sosial dalam penelitian ini diperlukan teori yang bisa digunakan untuk menafsirkan makna pilihan tindakan. Untuk makna pilihan tindakan dipergunakan Teori Interaksi Simbolik. Hal itu pun disarankan Melberg (http:/2home.sol.no/-hmelberg/papers/950520.htm), bahwa Teori Pilihan Rasional perlu dilengkapi dengan model teori yang lain supaya dapat memberikan penjelasan yang lebih memuaskan terhadap fenomena di dalam masyarakat.

2.3.2 Teori Interaksi Simbolik

Dalam membicarakan masalah simbol-simbol yang signifikan, Mead (dalam Zeitlin 1995:340) mengungkapkan bahwa di antara bentuk isyarat, "bahasa" merupakan suatu simbol yang sangat penting. Bahasa menjadi pembeda manusia dengan makhluk yang lain. Di samping itu, lebih lanjut bahasa etnis juga menjadi

simbol identitas etnis pemiliknya. Dengan dasar itu, Teori Interaksi Simbolik akan dipergunakan terutama untuk memahami dan menjelaskan bahasa dan identitas etnis dalam penelitian ini dalam kaitannya denganmakna tindakan aktor.

Teori Interaksi Simbolik merupakan suatu pendekatan teoretis yang pada awal perkembangannya lebih menekankan studinya pada perilaku manusia yang berkaitan dengan hubungan interpersonal. Sebagian pakar menyatakan bahwa interaksi simbolik hanya dapat diterapkan pada fenomena mikrososiologi. Pada perkembangan selanjutnya, interaksi simbolik tidak hanya menekankan pada perilaku individu, tetapi lebih luas lagi, sebagaimana dikemukakan Blumer (dalam Ritzer 1988:173) bahwa interaksi simbolik merupakan pengkajian fenomena sosial yang dilakukan secara langsung dan mendasar untuk mempelajari secara ilmiah tingkah laku manusia dan kehidupan kelompok.

Dalam hal ini Blumer (dalam Craib 1986:112) mengemukakan asumsi (premis) tentang interaksi simbolik sebagai berikut.

1. Manusia bertindak terhadap sesuatu atas dasar makna yang dimiliki benda itu bagi mereka;
2. Makna itu merupakan hasil dari interaksi sosial dalam masyarakat manusia; dan
3. Makna dimodifikasi dan ditangani melalui suatu proses penafsiran yang digunakan oleh setiap individu dalam keterlibatannya dengan tanda yang dihadapinya.

Jika diperhatikan, pemikiran Blumer berkaitan dengan pemikiran Mead tentang bahasa atau "simbol-signifikan" yaitu suatu makna yang dimengerti bersama. Makna dihasilkan oleh interaksi sosial dan makna membentuk dunia. Simbol-signifikan memungkinkan aktor mampu untuk berdiri di belakang benda yang dihadapi dan melakukan eksperimen pemikiran terhadapnya. Hal itulah yang sering terjadi setiap kali tindakan dipikirkan (Craib 1986:113-114).

Kemudian, pemikiran Mead tentang interaksi simbolik di atas disimpulkan oleh Ritzer (1988:184) bahwa interaksi simbolik mempelajari tindakan manusia baik yang berupa tindakan fisik yang terlihat maupun tindakan nonfisik yang tersembunyi atau tidak terlihat. Tindakan adalah kegiatan interaksi antara individu dengan individu yang lainnya, termasuk kegiatan individu yang berupa perhatian seseorang terhadap suatu objek, persepsi, imajinasi, alasan melakukan sesuatu, percakapan dan perlakuan, emosi dan sebagainya yang dikategorikan sebagai bagian dari tindakan. Tindakan meliputi seluruh proses yang menyangkut aktivitas manusia.

Membicarakan pendekatan Teori Interaksi Simbolik tidak bisa terlepas dari Blumer dan Mead, karena kedua orang ini merupakan pakar terkemuka teori ini. Berkaitan dengan konsep diri, Mead melihat "diri" sebagai suatu organisasi aktif bukan sekedar tempat buangan yang hanya menerima dan memberikan reaksi terhadap stimulasi. Blumer berpendapat bahwa diri manusia adalah aktif dan kreatif.

Dengan menyingkat ide "diri" (*self*) Mead, Blumer menyatakan bahwa perbuatan manusia terbentuk melalui interaksi diri. Dalam prosedurnya, aktor mencatat dan menilai setiap sifat situasi atau sifat keterlibatannya dalam perbuatan itu.

Perbuatan itu terbentuk melalui proses interaksi diri tanpa mempertimbangkan apakah pembentukan tersebut dilakukan secara baik atau buruk. Pengalaman perbuatan terhadap proses interaksi diri memberikan rekaman pada perbuatan itu; perbuatan itu dapat dihentikan, dicegah, ditinggalkan, dimanfaatkan, ditangguhkan, diintensifkan, disembunyikan, ditampung, atau diarahkan kembali.

2.3.3. Teori Akomodasi

Teori Akomodasi (*accommodation theory*) sangat terkemuka dalam sosiologi bahasa, atau tepatnya psikologi sosial bahasa, dengan tokohnya Howard Giles. Di dalam teori sosial juga terdapat Teori Akomodasi, tetapi tidak sepopuler dalam bidang ilmu bahasa tersebut.

Teori Akomodasi dalam sosiologi sekelompok dengan teori adaptasi, tetapi terdapat sedikit perbedaan. Teori adaptasi yang secara samar-samar diungkap Darwin, diaplikasikan pada modifikasi organis dengan peralihan secara biologis; sedangkan Teori Akomodasi dipergunakan dengan acuan perubahan kebiasaan (Burgess 1996:file: ///INTERNET/ NETSCAPE/COMPCONF). Perubahan kebiasaan itu merupakan peralihan yang bersifat sosiologis dalam bentuk tradisi sosial (*social tradition*). J. Mark Balwin sebagai pencetus ide Teori Akomodasi, menyatakan bahwa adaptasi dalam penyesuaian struktural dibatasi oleh bawaan dan warisan; sedangkan akomodasi sebagai perolehan dari hasil pengubahan fungsi penyesuaian pada lingkungan yang lebih baik dan juga pada perubahan fungsi yang berpengaruh.

Terminologi akomodasi dalam sosiologi meliputi warisan sosial, tradisi, sentimen, budaya, dan teknik yang diperoleh melalui proses sosial, bukan peralihan

secara biologis. Akomodasi bukan sebagai bagian pewarisan ras pada individu, tetapi diperoleh berdasarkan pengalaman sosial (*social experience*). Bila adaptasi mengakibatkan kompetisi, akomodasi lebih khusus akomodasi sosial menghasilkan konflik. Akomodasi dapat disamakan dengan konsep domestikasi (*domestication*), sedangkan adaptasi sama dengan penjinakan (*taming*). Realisasi kesadaran ras manusia merupakan program adaptasi biologis. Sebaliknya pendidikan merepresentasikan program akomodasi, demikian juga organisasi, modifikasi, dan sifat budaya asli.

Akomodasi berbasis pada keseimbangan (*equilibrium*), yang tidak bersifat biologis, tetapi bersifat ekonomis dan sosial yang dialihkan oleh tradisi. Organisasi-organisasi sosial beserta tujuan yang ingin dicapai berbasis pada kompetisi dan adaptasi, yang secara esensial berwujud akomodasi. Akomodasi juga berisi upaya pemeliharaan status kelompok. Dalam konteks itu, maka akomodasi menjadi isu alamiah konflik, dengan elemennya yang antagonisme.

Dimulai dengan konsep dasar yang sama dengan akomodasi sosial, Howard Giles pada awal tahun 1970-an telah mengembangkan konsep akomodasi (*accommodation*) dalam perilaku linguistik. Secara normal, akomodasi mengambil bentuk konvergensi (*convergence*). Dalam bentuk konvergensi, seorang penutur akan memilih sebuah bahasa atau variasi bahasa yang tampak sesuai dengan kebutuhan orang yang diajak bicara. Akan tetapi, dalam kondisi-kondisi tertentu seorang penutur bisa gagal dalam melakukan konvergensi atau bahkan dia melakukan divergensi (*divergence*). Dengan kata lain, seseorang mungkin tidak mengalami kesulitan sama

sekali dalam ujarannya untuk kepentingan orang lain yang diajak bicara dan mungkin secara sengaja membuat ujarannya tidak seperti ujaran orang lain. Hal ini terjadi ketika penutur ingin menekankan loyalitasnya pada kelompoknya sendiri dan membedakan dirinya dari kelompok lawan bicaranya. Fenomena itu yang dipergunakan Giles untuk membangun Teori Akomodasi (*AccommodationTheory*).

Konvergensi dan divergensi tidak menghendaki seleksi satu pilihan (yaitu, kovergensi, nonkovergensi dan divergensi). Kombinasi pilihan di antara varian-varian di dalam sebuah bahasa, maupun menggunakan strategi-strategi seperti menerjemahkan wacana seseorang atau mengurangi kecepatan berbicara bisa saja terjadi. Tingkatan akomodasi berbeda-beda dalam bentuk interaksi penutur dengan anggota luar kelompok (seseorang yang keluar dari kelompok sosiobudaya yang berbeda). Perilaku yang paling konvergen adalah penggunaan bahasa orang lain yang menjadi lawan bicara itu dan membuat upaya sebisa mungkin melafalkannya dalam cara yang dipakai oleh penutur asli. Yang tidak begitu konvergen adalah penggunaan bahasa lain itu, tetapi dengan aksen yang relatif "medhok" (misalnya, seorang warga Kanada yang berbicara bahasa Inggris menggunakan bahasa Perancis kepada seorang warga Kanada yang lain yang berbicara bahasa Perancis, tetapi dengan aksen bahasa Inggris yang kentara). Berikutnya adalah penggunaan bahasa penutur itu sendiri, tetapi berbicara pelan kepada orang lain, yang mungkin kurang bisa memahaminya dengan baik. Yang paling divergen dari keempat strategi itu adalah penggunaan bahasa penutur sendiri dengan kecepatan berbicara yang normal, dengan menyerahkan kepada orang lain itu untuk bisa memahaminya dengan baik.

Teori Akomodasi Giles, sebagaimana diulas Ellis (1997[a]:39), bahwa proses konvergensi menekankan pada kekohesifan sosial (*social cohesiveness*), sedangkan divergensi menekankan pada keberbedaan sosial (*social distinctiveness*). Dengan dasar itu, maka Teori Akomodasi segaris dengan psikologi sosial dalam hal aktraksi-similaritas (*similarity-attraction*) (Giles dan Powesland 1997:233). Cara kerjanya adalah individu dapat membujuk orang lain untuk melakukan evaluasi dengan peleburan ketidakberbedaan di antara mereka. Proses akomodasi beroperasi dalam prinsip dan kemungkinan hasrat refleksi individu dalam persetujuan sosial (*social approval*). Tindak akomodatif merupakan harga yang harus ditanggung individu melalui perubahan identitas, perluasan usaha, dan inisiatif tingkah laku ke arah pemberian hadiah yang tepat.

Konvergensi dan divergensi mempengaruhi dalam pembelajaran bahasa. Pembelajaran bahasa yang menyepakati proses konvergensi berupaya memperoleh kecakapan seperti penutur asli bahasa yang dipelajari. Akan tetapi, pada pembelajar kelompok minoritas prestasi kecakapan tidak bisa seperti penutur asii, karena vitalitas etnolinguistiknya yang tinggi (Ellis 1997[b]:234).

BAB 3

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran (konseptual) yang menjadi landasan konseptual dalam penelitian ini merupakan kombinasi pemikiran tentang stratifikasi sosial, sikap bahasa, kompetensi komunikatif, dan pemilihan bahasa serta teori-teori sosial yang melatarinya: Teori Pilihan Rasional, Teori Interaksi Simbolik, dan Teori Akomodasi. Berikut ini dikemukakan mengenai kerangka pemikiran tersebut.

Dalam masyarakat bilingual atau multilingual, orang harus memilih bahasa untuk komunikasi. Dalam konteks kebahasaan di Perumnas KBD Gresik, masyarakat Jawa memiliki tiga pilihan kode bahasa: bahasa Jawa, campuran bahasa Jawa-bahasa Indonesia, dan bahasa Indonesia

Pemilihan bahasa dideterminasi oleh dua faktor utama: intralinguistik dan esktralinguistik (Weinreich 1953, Setiawan 2001). Intralinguistik mengacu ke profisiensi atau penguasaan penutur terhadap bahasa (sasaran) yang dimaksud. Esktralinguistik berkaitan dengan kode-kode estetik atau etika perilaku (Smith 1973:105). Dalam pandangan ini, stratifikasi sosial merupakan esktralinguistik yang menentukan pemilihan bahasa. Alasannya, stratifikasi sosial menentukan perilaku sosial, termasuk pemilihan perilaku berbahasa.

Karena stratifikasi sosial secara objektif direpresentasikan oleh pendidikan, pekerjaan, dan penghasilan (G. Tan 1997, Nasution 1999, Kardisi 2005), ketiganya juga dianggap menentukan pemilihan bahasa sebagai perilaku sosial atau gaya hidup.

Meski demikian, sebagai faktor ekstralinguistik, pengaruh stratifikasi sosial terhadap pemilihan bahasa mungkin tidak begitu jelas terdeteksi. Mengapa? Masih ada faktor lain yang sebenarnya berhubungan erat dengan stratifikasi sosial dan sekaligus lebih dekat dengan pemilihan bahasa. Dikatakan lebih dekat karena faktor ini lebih merupakan intralinguistik, dan faktor intralinguistik lebih menentukan pemilihan bahasa daripada ekstralinguistik.

Stratifikasi sosial, karena itu, berdiri sebagai variabel pengaruh dan pemilihan bahasa sebagai variabel terpengaruh. Di antara kedua variabel ini terdapat variabel antara (*intervening variables*), yakni sikap bahasa dan kompetensi komunikatif.

Secara teoretis, stratifikasi sosial mungkin mempengaruhi pemilihan bahasa seseorang. Kehadiran dua variabel antara memungkinkan stratifikasi sosial untuk mempengaruhi pemilihan bahasa, baik tanpa melalui variabel antara maupun dengan melalui variabel antara—secara bersamaan maupun individual.

Karena kondisinya demikian, untuk melihat pengaruh stratifikasi sosial terhadap pemilihan bahasa dapat didekati dengan tiga model. Pertama, pengaruh langsung stratifikasi sosial terhadap pemilihan bahasa tanpa melalui variabel antara. Kedua, pengaruh tak langsung stratifikasi sosial terhadap pemilihan bahasa melalui sikap bahasa dan kompetensi komunikatif secara bersamaan. Ketiga, pengaruh tak langsung stratifikasi sosial terhadap pemilihan bahasa melalui variabel sikap bahasa dan kompetensi komunikatif secara individual. Berdasarkan teori, stratifikasi sosial potensial mempengaruhi sikap bahasa dan kompetensi komunikatif, dan kedua variabel ini juga mempengaruhi pemilihan bahasa.

Dalam kerangka pemikiran demikian, teori-teori sosial berfungsi sebagai alat penjelasan. Untuk menjelaskan fenomena yang menonjolkan perilaku memilih, digunakanlah *Teori Pilihan Rasional*. Teori Pilihan Rasional James Colleman tidak secara cermat menjelaskan makna pilihan tindakan. Oleh sebab itu, Teori Pilihan Rasional dilengkapi dengan *Teori Interaksi Simbolik*. Teori ini juga tidak menyinggung masalah akomodasi sosial dan akomodasi berbahasa, karena itu perlu dilengkapi dengan *Teori Akomodasi*, baik sebagai teori sosial maupun teori psikologi sosial bahasa.

Adapun kerangka pemikiran atau konseptual penelitian ini divisualisasikan pada Skema 3.1. berikut ini.

Skema 3.1. Kerangka Pemikiran (Konseptual)

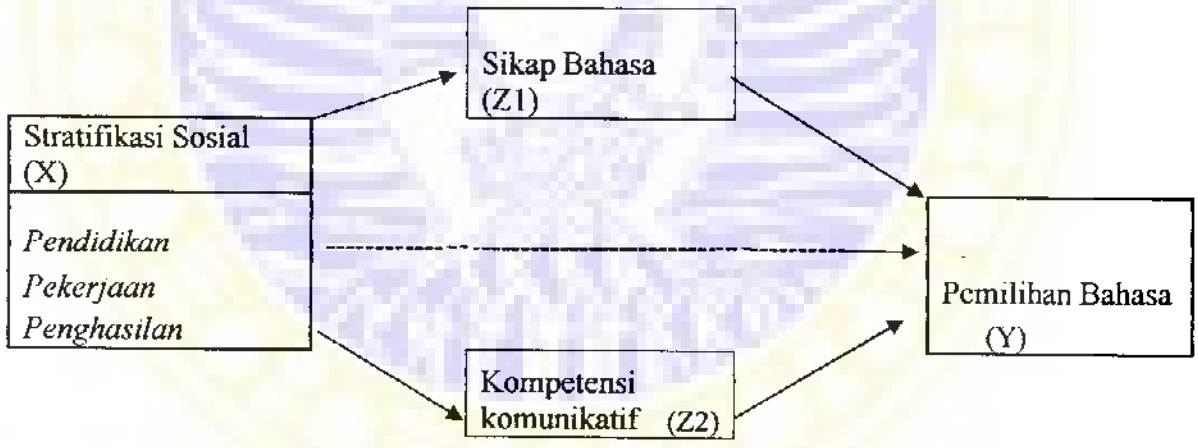

3.2. Hipotesis

Untuk memandu pencapaian tujuan penelitian, dikemukakan dua tingkatan hipotesis, yakni hipotesis mayor dan hipotesis minor. Hipotesis merupakan jawaban

sementara terhadap masalah yang dikaji dalam penelitian ini. Sesuai dengan inti masalah peneitian ini, hipotesis mayor dirumuskan sebagai berikut:

"Ada pengaruh signifikan stratifikasi sosial (dalam bidang pendidikan, pekerjaan, dan penghasilan) terhadap pemilihan bahasa masyarakat Jawa Perumnas KBD Gresik."

Sementara itu, hipotesis-hipotesis minor yang diturunkan dari hipotesis mayor tersebut di atas adalah:

1. Ada pengaruh signifikan stratifikasi sosial dalam bidang pendidikan, pekerjaan, dan penghasilan terhadap sikap bahasa masyarakat Jawa di Perumnas KBD Gresik. Pendidikan lebih signifikan pengaruhnya daripada pekerjaan, sedangkan penghasilan tidak signifikan.
2. Ada pengaruh cukup signifikan sikap bahasa terhadap pemilihan bahasa masyarakat Jawa di Perumnas KBD Gresik.
3. Ada pengaruh signifikan stratifikasi sosial dalam bidang pendidikan, pekerjaan, dan penghasilan terhadap kompetensi komunikatif masyarakat Jawa di Perumnas KBD Gresik. Pendidikan lebih signifikan pengaruhnya daripada penghasilan, sedangkan pekerjaan tidak signifikan.
4. Ada pengaruh signifikan kompetensi komunikatif terhadap pemilihan bahasa masyarakat Jawa di perumnas KBD Gresik.
5. Ada pengaruh signifikan stratifikasi sosial terhadap pemilihan bahasa dengan tidak dimediasi sikap bahasa dan kompetensi komunikatif. Pendidikan, penghasilan, dan pekerjaan memberikan pengaruh signifikan.

6. Ada pengaruh signifikan stratifikasi sosial dalam bidang pendidikan, pekerjaan, penghasilan terhadap pemilihan bahasa dengan dimediasi sikap bahasa dan kompetensi komunikatif secara bersamaan.
7. Ada pengaruh signifikan stratifikasi sosial (dalam bidang pendidikan, pekerjaan, penghasilan) terhadap pemilihan bahasa dengan dimediasi sikap bahasa dan kompetensi komunikatif secara individual.
8. Pengaruh stratifikasi sosial terhadap pemilihan bahasa dengan dimediasi kompetensi komunikatif lebih besar daripada dengan dimediasi sikap bahasa. Signifikansi pengaruh kompetensi komunikatif dan sikap bahasa lebih besar dari pada signifikansi pengaruh stratifikasi sosial terhadap pemilihan bahasa.

3.3. Metode Penelitian

Paparan mengenai metode penelitian berikut ini meliputi: rancangan penelitian, populasi penelitian, sampel penelitian, variabel penelitian dan definisi operasional, pengembangan dan pengukuran instrumen, uji reliabilitas dan validitas instrumen, pengumpulan data, serta prosedur pengolahan dan analisis data.

3.3.1. Rancangan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan metode survei, dalam kategori penelitian yang menerangkan (*explanatory research*)—yang berfungsi untuk mengkaji dan menjelaskan hubungan variabel. Fenomena bahasa dalam penelitian ini didekati dengan metode survei dengan pertimbangan bahwa, sejalan dengan Blumer

(dalam Ritzer 1988: 173), dalam konteks komunikasi interpersonal masyarakat luas, bahasa merupakan simbol yang amat penting—sementara Teori Interaksi Simbolik (yang dulu menjadi sangat penting untuk mengkaji perilaku subjek) telah berkembang tidak hanya berfokus pada perilaku individu tetapi juga perilaku manusia dan kehidupan kelompok, termasuk dalam kaitannya dengan berbahasa dalam interaksi sosial. Dengan kata lain, teori ini telah memungkinkan pengkajian bahasa dari mikrososiologi, melainkan juga makrososiologi.

Penelitian mengambil sampel dari suatu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data yang pokok. (Singarimbun & Effendi 1995:3). Analisis data dilakukan dengan menganalisis seluruh jawaban individu dengan statistik, karena unit analisis penelitian ini adalah individu anggota masyarakat Jawa di Perumnas KBD Gresik. Hasil pengujian dengan statistik dipergunakan untuk menyelidiki kemungkinan adanya saling hubungan sebab-akibat (pengaruh) antar variabel penelitian.

Penelitian ini dirancang melibatkan variabel pengaruh (*independent variable*) yakni stratifikasi sosial, variabel tergantung (*dependent variable*) yakni pemilihan bahasa, dan variabel antara (*intervening variable*) yakni sikap bahasa dan kompetensi komunikatif. Untuk mengatur rangkaian sebab-musabab (variabel pengaruh-variabel terpengaruh), di samping teori, akal sehat bisa dijadikan pedoman. Dikatakan *variabel antara* apabila—dengan masuknya variabel tersebut—hubungan statistik yang semula nampak antara dua variabel menjadi lemah atau bahkan lenyap (Singarimbun & Effendi 1995:64). Dengan kata lain, kehadiran variabel antara akan menunjukkan

pengaruh atau hubungan yang lebih jelas variabel pengaruh terhadap variabel terpengaruh.

Secara umum penelitian ini diarahkan untuk mengungkapkan pengaruh stratifikasi sosial (dalam bidang pendidikan, pekerjaan, dan penghasilan) terhadap pemilihan bahasa masyarakat Jawa Perumnas KBD Gresik. Namun, secara khusus dan rinci, penelitian ini difokuskan untuk mengungkapkan: (1) pengaruh stratifikasi sosial terhadap sikap bahasa; (2) pengaruh sikap bahasa terhadap pemilihan bahasa; (3) pengaruh stratifikasi sosial terhadap pemilihan bahasa; (4) pengaruh kompetensi komunikatif terhadap pemilihan bahasa; (5) pengaruh stratifikasi sosial terhadap pemilihan bahasa *tidak dengan dimediasi* sikap bahasa dan kompetensi komunikatif; (6) pengaruh stratifikasi sosial terhadap pemilihan bahasa *dengan dimediasi* sikap bahasa dan kompetensi komunikatif secara bersamaan; (7) pengaruh stratifikasi sosial terhadap pemilihan bahasa *dengan dimediasi* sikap bahasa dan kompetensi komunikatif secara individual; dan (8) perbandingan pengaruh stratifikasi sosial terhadap pemilihan bahasa yang dimediasi sikap bahasa dan yang dimediasi kompetensi komunikatif.

Sebagai studi kasus, kesimpulan yang dihasilkan oleh penelitian ini pada dasarnya hanya berlaku secara terbatas pada komunitas yang diteliti. Pada lingkup kehidupan sosial yang lebih luas, kesimpulan tersebut hanya berlaku sebagai proposisi hipotesis. Meski demikian, karena dihasilkan oleh suatu penelitian, maka kesimpulan-kesimpulan itu memiliki arti penting sebagaimana yang disinggung dalam uraian mengenai manfaat penelitian.

3.3.2. Populasi Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah Kepala Keluarga atau suami di Perumnas KBD Gresik, yang tersebar di 10 blok kawasan: Pancawarna, Granit Kumala, Biduri Pandan, Mutiara, Granit Nila, Intan, Kalimaya, Aquamarin, Biduri Bulan, dan Phyrus Biru. Mengapa suami? Suami, yang diasumsikan sebagai pembuat kebijakan dalam keluarga, merupakan pusat sosialisasi budaya (termasuk bahasa) dalam keluarga. Bahkan suami juga dapat dianggap sebagai aktor atau agen perubahan dan penurunan nilai-nilai kepada anaknya.

Populasi penelitian ini memiliki karakteristik berikut ini: (1) Kepala keluarga beretnis Jawa (yang secara spesifik menganggap dan menggunakan bahasa Jawa sebagai bahasa ibu), dan sudah berkeluarga; (2) daerah asalnya atau kelahiran meliputi daerah kabupaten atau kota yang berada dalam wilayah provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur—dua provinsi yang telah diakui sebagai penyangga bahasa-budaya Jawa; (3) dwibahasawan (bilingual) , artinya mampu menggunakan bahasa Jawa dan bahasa Indonesia; (4) tinggal di Perumnas KBD Gresik sebagai penghuni tetap di rumah sendiri atau kerabat dekat; (5) kawasan tempat tinggalnya juga dihuni oleh etnik lain sehingga terjadi kontak bahasa dengan mereka; (6) memiliki pendidikan, pekerjaan, dan penghasilan tertentu.

Penjaringan populasi berdasarkan observasi, wawancara dengan para Ketua RT/RW, dan studi dokumen (data sekunder) berupa "Kartu Susunan Keluarga" model RT/RW setempat yang dapat diperbarui sewaktu-waktu. Umur KSK ini ditetapkan tidak lebih dari 2 (dua) tahun untuk menjaga kesesuaian (kemutakhiran) antara data

tertulis dan keadaan sebenarnya (calon) responden; karena itu, KSK yang lebih dari 2 tahun diverifikasi dengan Ketua RT/RW setempat agar diperoleh data yang berguna untuk melacak pendidikan dan pekerjaan. Adapun penghasilan, untuk sementara, diindikasikan oleh tipe/kondisi rumah hunian.

Dengan pembobotan pendidikan, pekerjaan, dan penghasilan (tipe rumah) [lihat pula butir 3.5.), dan pembuatan tabel silang, diperoleh populasi sejumlah 1442 KK yang terdiri atas tiga kategori: strata tinggi sejumlah 489 KK (33.91%), strata sedang sejumlah 612 KK (42.44%), dan strata tinggi sejumlah 341 KK (23.64%). Komposisi populasi dengan tiga kategori ini diharapkan mampu memenuhi persyaratan data yang berdistribusi normal. Adapun profil stratifikasi sosial masyarakat Jawa untuk tiap-tiap blok kawasan di Perumnas KBD Gresik dapat disajikan dalam Tabel 3.1.

Tabel 3.1: Profil Populasi Penelitian

No	*Blok Kawasan*	*Stratifikasi Sosial*			*Total*
		Rendah	*Sedang*	*Tinggi*	
1	Panca Warna	167	112	42	321
2	Granit Kumala	91	121	60	272
3	Mutiara	21	82	39	142
4	Biduri Pandan	30	68	32	130
5	Granit Nila	40	51	38	129
6	Intan	11	28	39	78
7	Kalimaya	20	31	11	62
8	Aquamarin	29	28	20	77
9	Biduri Bulan	30	49	30	109
10	Phyrus Biru	50	42	30	122
	Total	**489**	**612**	**341**	**1442**
	Persen	33.91	42.44	23.64	100

3.3.3. Sampel Penelitian

Berdasarkan jumlah populasi yang ditemukan di atas, sampel diambil dengan teknik *stratified proportionate random sampling*. Sampel ditarik secara proporsional dari masing-masing strata sebagaimana tercantum pada butir 3.1. di atas, dengan patokan 10% dari sub-populasi yang tersebar di 10 blok kawasan. Penentuan sampel sejumlah 10% dari populasi didasarkan pada asumsi bahwa nilai atau skor yang diperoleh dengan jumlah itu memiliki distribusi normal. Bahkan menurut Masri Singarimbun & Effendi (1995:171), sampel yang tergolong besar yang berdistribusi normal adalah sampel yang jumlah lebih besar daripada 30 kasus yang diambil secara random. Bahkan, meski untuk keperluan analisis varian atas tiga strata masyarakat Jawa, dengan jumlah 3 x 30 kasus = 90 kasus, jumlah 10% tersebut dapat memenuhinya. Jadi 10% x 1442 (=144) dianggap memadai untuk memenuhi persyaratan sampel yang berdistribusi normal.

Jumlah sampel per stratum secara keseluruhan adalah stratum rendah 49 (33.98%), stratum sedang, 61 (42.44%) dan stratum tinggi 34 (23.58%). Urutan blok kawasan yang mendapat jatah pengambilan sampel besar mulai (terbesar) Panca Warna, Granit Kumala, Mutiara, Biduri Pandan, Granit Nila, Phyrus Biru, Biduri Bulan, Intan, Aquamarin, dan Kalimaya. Adapun jumlah sampel untuk tiap-tiap blok kawasan di Perumnas KBD Gresik dapat disajikan dalam Tabel 3.2. berikut ini, sedangkan profil responden dapat dilihat pada **Lampiran 3**.

Tabel 3.2: Profil Sampel Penelitian

No	*Blok Kawasan*	*Stratifikasi Sosial*			*Total*
		Rendah	*Sedang*	*Tinggi*	
1	Panca Warna	17	11	4	32
2	Granit Kumala	9	12	6	27
3	Mutiara	2	8	4	14
4	Biduri Pandan	3	7	3	13
5	Granit Nila	4	5	4	13
6	Intan	1	3	4	8
7	Kalimaya	2	3	1	6
8	Aquamarin	3	3	2	8
9	Biduri Bulan	3	5	3	11
10	Phyrus Biru	5	4	3	12
	Total	**49**	**61**	**34**	**144**
	Persen	33.98	42.44	23.58	100

3.3.4. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

Berdasarkan rumusan masalah, variabel-variabel utama yang akan dianalisis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Variabel tergantung atau *dependent variable* (Y), yakni pemilihan bahasa masyarakat Jawa di Perumnas KBD Gresik.
2. Variabel bebas atau *independent variable* (X), yakni stratifikasi sosial dalam bidang pendidikan, pekerjaan, dan penghasilan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pemilihan bahasa masyarakat Jawa di Perumnas KBD Gresik.
3. Variabel Antara atau *intervening variable* (Z), yakni variabel-variabel yang memediasi pengaruh stratifikasi sosial terhadap pemilihan bahasa, yang meliputi sikap bahasa (Z1) dan kompetensi komunikatif (Z2).

Adapun definisi operasional variabel dapat disajikan berikut ini:

1. *Pemilihan Bahasa*: tindakan atau perilaku responden dalam menunjukkan performansi komunikatif atau penggunaan bahasa terpilih sesuai tuntutan komunikasi –yang meliputi tiga jenis pilihan: (1) penggunaan bahasa Jawa; (2) campur kode bahasa Jawa dan bahasa Indonesia; dan (3) alih kode ke bahasa Indonesia.
2. *Stratifikasi Sosial*: pembedaan masyarakat (responden) ke dalam kelas-kelas secara bertingkat (hirarkhis), berdasarkan raihan atau capaian (*achieved*), yang merupakan koefisien penjumlahan masing-masing ukuran tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, dan jumlah penghasilan.
3. *Pendidikan*: jenjang pendidikan formal responden yang ditempuh di sekolah yang gradual bertingkat-tingkat yang meliputi pendidikan dasar (SD—SLTP), pendidikan menengah (SLTA), dan pendidikan tiggi (D1—S2).
4. *Pekerjaan*: jenis aktivitas rutin atau ikhtiar produktif yang dilakukan oleh responden dalam upaya mencari penghidupan (nafkah), baik secara mandiri maupun bergantung pada pihak lain.
5. *Penghasilan*: jumlah imbalan yang diperoleh responden sebagai pemasukan (*income*) akibat dari pekerjaan yang dia lakukan, baik berupa imbalan rutin dan/atau tambahan, untuk jangka waktu satu bulan, yang dinyatakan dalam nilai nominal uang (rupiah).
6. *Sikap Bahasa*: pendapat (kognisi) dan keyakinan (afeksi) responden yang bervariasi dalam derajat senang dan tidak senang terhadap aspek-aspek bahasa

tertentu: status bahasa sasaran, penutur bahasa sasaran, budaya bahasa sasaran, nilai sosial pembelajaran bahasa sasaran, kegunaan khusus bahasa sasaran, dan diri sendiri sebagai anggota budaya.

7. *Kompetensi Komunikatif*: pengetahuan yang responden miliki tentang sistem kaidah kegramatikalan ujaran (pengetahuan linguistik) dan tentang cara menerapkan sistem kaidah itu secara efektif dalam kaitannya dengan tujuan-tujuan komunikasi (pengetahuan pragmatik).

3.3.5. Pengembangan dan Pengukuran Instrumen

Instrumen penelitian ini adalah kuesioner, yang dikembangkan dari definisi operasional variabel di atas. Kuesioner dibuat dalam bahasa Indonesia. Karena bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional dan bahasa resmi negara, diasumsikan bahwa responden adalah dwibahasawan (bilingual) bahasa Jawa dan bahasa Indonesia; sehingga mereka mampu memahami kuesioner berbahasa Indonesia dengan baik. Dengan demikian, diasumsikan tidak perlu menerjemahkan kuesioner berbahasa Indonesia ke dalam bahasa Jawa.

Bagian A dimaksudkan untuk mendeteksi stratifikasi sosial responden, yang mencakup isian tentang latar-belakang responden, yang meliputi: usia, tempat kelahiran, suku bangsa (diri, isteri, orangtua), tipe rumah hunian, jenjang pendidikan, jenis pekerjaan (tetap dan/atau sampingan, dan jumlah penghasilan. Adapun Bagian B memuat aitem pertanyaan/pernyataan tentang kompetensi komunikatif, Bagian C tentang sikap bahasa, dan Bagian D tentang pemilihan bahasa.

Untuk Bagian A: Latar Belakang Responden, aitem-aitem yang paling penting untuk penelitian ini adalah jenjang pendidikan, jenis pekerjaan, dan jumlah penghasilan. Adapun aitem-aitem yang lain digunakan untuk aitem parameter pengecekan, maksudnya untuk alat melakukan pengecekan terhadap pengakuan responden dan fakta riel. Jawaban responden tentang usia untuk pengecekan apakah tepat atau tidak dengan data sekunder, tentang tempat kelahiran dan suku bangsa untuk pengecekan status kesukuan Jawa, dan tentang tipe rumah hunian untuk membuktikan kesesuaian relatif dengan stratifikasi sosial (tertutama pekerjaan dan penghasilan).

Untuk kepentingan pengukuran, pendidikan dikategorikan menjadi 3 (tiga), yakni pendidikan dasar yang meliputi SD dan SLTP atau sederajat (skor 1), pendidikan menengah yang mencakup SLTA (skor 2), dan pendidikan tinggi yang meliputi D1 hingga S3 (skor 3).

Penghasilan dikategorikan menjadi 5 (lima), yakni kurang dari Rp 1.000.000 (skor 1), Rp 1.000.000-Rp 2.000.000 (skor 2), Rp 2.000.500-Rp 3.000.000 ((skor 3), Rp 3.000.500-Rp 4.000.000 (skor 4) dan lebih dari Rp 4.000.000 (skor 5).

Pengukuran pekerjaan dilakukan dengan melabel jenis pekerjaan—dengan mengadaptasi skala prestis model Melvin Kohn dalam Soe'oed (2004:49)—menjadi empat kategori: (1) buruh: identik dengan *lower class*, pekerja yang tak memiliki ketrampilan spesifik, dan yang mengandalkan tenaga/otot dan terutama mengikuti pesanan pihak lain, termasuk 'swasta' yang tidak disebut spesifik/jelas; (2) wirausaha atau wiraswasta: identik dengan *working class*, yakni orang yang memiliki ketrampilan mumpuni, atau memiliki dan menjalankan usahanya sendiri, baik besar

maupun kecil; (3) profesional: identik dengan *middle-class*, yakni orang yang menekuni profesi non-negeri dengan bidang kerja (terutama) jasa, konseptual pemikiran, dan lazimnya bekerja di sektor swasta; (4) pegawai negeri: identik dengan *elite class*, yakni orang yang bekerja untuk pemerintah, baik PNS maupun TNI/Polri, yang masih dipandang bermartabat atau berprestis dalam masyarakat.

Bagian B: Kompetensi Komunikatif memuat 12 buah aitem-aitem pernyataan untuk mengungkap pengetahuan pragmatik dan linguistik responden. Untuk menggali pengetahuan pragmatik, pertanyaan diadaptasikan dari Setiawan (2001) dengan '5 tugas komunikasi' (*communication task*). Penelitian ini menggunakan '4 tugas komunikasi' seperti tampak pada Tabel 3.3, yang diarahkan untuk mengungkap kemampuan komunikasi responden baik dalam bahasa Jawa (Pernyataan no. 1—4) maupun dalam bahasa Indonesia (Pernyataan no. 5—8).

Tabel 3.3: 4 Tugas Komunikasi

Tugas Komunikasi	1	2	3	4	5
Melakukan komunikasi jual beli di toko ketika membeli sesuatu					
Memberikan keterangan biografi di antaranya: tanggal lahir, keterangan seputar keluarga, dan latar pendidikan					
Menjelaskan tentang perkembangan pekerjaan, dan kegiatn kemasyarakatan secara rinci					
Memberi pendapat terhadap masalah-masalah sosial (misal: kemiskinan, penggusuran rumah, gelandangan,pengemis, korupsi, politik, dll.)					

Responden diharapkan menjenjang atau me-*ranking* kemampuan komunikasinya ke dalam 5 tingkat profisiensi/penguasaan (lihat Tabel 3.4). Responden yang menyilang kolom 1 mengindikasikan bahwa dia tidak mempunyai

kemampuan sama sekali dalam bahasa dimaksud (bahasa Jawa atau bahasa Indonesia). Responden dinilai hanya berkemampuan cukup jika dia menyilang kolom 3. Sebaliknya, responden yang menyilang kolom 5 mengindikasikan bahwa profisiensinya dalam bahasa yang dimaksud sangat baik.

Tabel 3.4: Skor Tingkat Profisiensi/Penguasaan Bahasa

Skor	*Tingkat Profisiensi/Penguasaan Bahasa*
1	Tidak mempunyai kemampuan sama sekali
2	Sedikit (beberapa kata)
3	Cukup (mampu berbicara untuk percakapan sederhana)
4	Baik (mampu berbicara untuk topik-topik tertentu)
5	Sangat baik (mampu berbicara untuk semua topik di segala situasi)

Untuk menggali pengetahuan linguistik, aitem-aitem pernyataan no. 9, 10, dan 11 digunakan untuk mengungkap kemampuan tingkat tutur (*speech level*) bahasa Jawa responden: tingkat rendah (*ngoko*), tingkat sedang (*krama madya*), dan tingkat tinggi (*krama inggil*). Dengan menggunakan skor tingkat profisiensi (Tabel 3.4), responden yang menyilang kolom 4 terhadap aitem pernyataan tentang tingkat tutur *ngoko* mengindikasikan bahwa dia mampu dengan baik berbicara *ngoko* tentang topik-topik tertentu. Demikian juga halnya dengan aitem pernyataan tentang tingkat tutur *krama madya* dan *krama inggil*.

Adapun aitem pertanyaan no. 12 (pengetahuan pragmatik) dimaksudkan untuk mengungkap apakah responden mampu menerapkan tingkat tutur bahasa Jawa dalam percakapan. Penerapan tingkat tutur dengan baik dan benar merupakan indikasi bahwa responden masih menjunjung tinggi kaidah kebahasan dan nilai budaya Jawa.

Sebaliknya, orang Jawa yang kurang mampu menerapkan tingkat tutur diasumsikan bahwa bahasa dan budaya Jawa-nya telah mulai luntur.

Bagian C: Sikap Bahasa terdiri atas 11 aitem pernyataan, diarahkan untuk mengungkap sikap responden, yang diadaptasikan dari Ellis (1997a:198), terhadap beberapa dimensi sikap bahasa—yakni sikap umum terhadap bahasa sasaran, sikap terhadap penutur bahasa sasaran, sikap terhadap budaya sasaran, sikap terhadap nilai sosial pembelajaran bahasa sasaran, sikap terhadap kegunaan khusus bahasa sasaran, sikap terhadap dirinya sebagai anggota budaya sasaran—sebagaimana dipetakan dalam Tabel 3.5. Adapun skala sikap yang ditawarkan kepada responden adalah *Sangat Tidak Setuju, Tidak Setuju, Netral (tidak yakin), Setuju,* dan *Sangat Setuju.*

Tabel 3.5: Tipe Pernyataan Sikap

No	*Tipe Pernyataan Sikap*	*Jumlah*	*Nomor Aitem*
1	Sikap umum terhadap bahasa 'sasaran'	4	1, 6, 7, 8
2	Sikap terhadap penutur bahasa 'sasaran'	1	11
3	Sikap terhadap budaya 'sasaran'	1	4
4	Sikap terhadap nilai sosial pembelajaran bahasa 'sasaran'	2	5, (4)
5	Sikap terhadap kegunaan khusus bahasa 'sasaran'	2	2, (7)
6	Sikap terhadap dirinya sebagai anggota budaya 'sasaran'	3	3, 9, 10

Pernyataan sikap diarahkan kepada responden beretis Jawa, sehingga penentuan *favourability* dan *unfavourability* didasarkan pada penyikapan pernyataan dari pihak responden sebagai anggota budaya etnis Jawa. Dalam kuesioner, pernyataan *favourable* ditandai dengan kode positif (+) dan pernyataan *unfavourable* ditandai dengan kode negatif (-).

Penentuan *favourable* dan *unfavourable* digunakan untuk membantu melakukan pengkodean (*coding*) dan penyekoran (*scoring*) terhadap setiap aitem pernyataan sikap. Untuk pernyataan *favourable*, jika responden memilih *Tidak Setuju* (kolom 2), maka tingkat sikapnya *negatif*, dan jika memilih *Sangat Setuju* (kolom 5), maka tingkat sikapnya *sangat positif*. Untuk pernyataan *unfavourable*, jika responden memilih *Sangat Tidak Setuju* (kolom 1), maka tingkat sikapnya *Sangat Positif*, dan jika memilih *Setuju* (kolom 4), maka tingkat sikapnya *negatif*. Pedoman pengukuran ekspresi sikap dan tingkat sikap untuk penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 3.6 berikut ini:

Tabel 3.6: Eskpresi Sikap dan Tingkat Sikap

Skor	*Ekspresi*	*Tingkat Sikap Favourable*	*Tingkat Sikap Unfavourable*
1	Sangat tidak setuju	Sangat negatif	Sangat positif
2	Tidak setuju	Negatif	Positif
3	Netral (tidak yakin)	Netral	Netral
4	Setuju	Positif	Negatif
5	Sangat setuju	Sangat positif	Sangat negatif

Sikap umum terhadap bahasa sasaran dilacak dengan 4 (empat) buah pernyataan. Pertama, pernyataan tentang penting-tidaknya mempelajari bahasa Jawa (Pernyataan no. 1). Sebagai orang Jawa, responden seharusnya menyetujui pernyataan ini. Kedua, pernyataan tentang rasa hormat atau nilai estetik bahasa (Pernyataan no. 6). Jika responden setuju terhadap pernyataan "Bahasa Indonesia merupakan bahasa yang Indah", berarti dia lebih mengaguminya daripada bahasa Jawa. Pernyataan no. 7 melacak kebanggaan responden terhadap kegunaan bahasa Indonesia/Jawa dalam

dunia ilmiah. Pernyataan no. 8 menyelidiki tanggapan responden apakah bahasa Indonesia sendiri sulit dipelajari.

Sikap responden terhadap penutur akan (pergeseran peran) bahasa Jawa dilacak dengan pernyataan no. 11. Jika responden *(Sangat) Tidak Setuju* terhadap pernyataan "Masyarakat Jawa cenderung pasrah terhadap pergeseran bahasa Jawa ke bahasa Indonesia" berarti dia memiliki sikap bahasa *(sangat) positif*terhadap bahasa Jawa. Jika netral jawabannya, dia memiliki sikap netral dan bahkan ragu-ragu.

Budaya Jawa telah di-stigmatisasi-kan memiliki mitos *alon-alon waton kelakon* (pelan-pelan asalkan tercapai), sehingga dianggap tidak mengandung semangat perjuangan dan kemajuan. Karena itu, Pernyataan no. 4 mengkonfrontasikan responden, apakah bahasa Indonesia membuat orang jadi lebih maju daripada bahasa Jawa. Responden akan menolak isi pernyataan itu jika bahasa Jawalah yang lebih mendorong orang untuk maju.

Selanjutnya, sikap terhadap nilai sosial pembelajaran bahasa bisa dilacak dengan pernyataan no. 4 dan 5. Pernyataan no. 4, selain mengandung fanatisme dan loyalitas budaya, juga mengimplikasikan manakah yang menjadi simbol modernitas di mata responden: bahasa Indonesia atau bahasa Jawa. Adapun pernyataan no.5 menyelidiki apakah berbahasa Indonesia meningkatkan status sosial reponden. Pernyataan no. 4 dan 5 merupakan pernyataan *unfavourable*.

Sikap terhadap manfaat khusus bahasa sasaran disclidiki dengan pernyataan no. 2 dan 7. Pernyataan no.2 tentang apakah siaran TV dan radio seharusnya disampaikan dalam bahasa Iawa. Adapun pernyataan no. 7 tentang apakah bahasa

Indonesia lebih baik untuk mempelajari hal-hal bersifat ilmiah daripada bahasa Jawa. Pernyataan no 2 *favourable*, sedangkan no.5 *unfavourable.*

Terakhir, sikap terhadap diri sendiri sebagai angota budaya Jawa. Seberapa besar keterikatan dirinya dengan budaya/bahasa Jawa tercermin dari sikapnya terhadap pernyataan tentang pengajaran bahasa Indonesia ke seluruh rakyat Indonesia (Pernyataan no. 3), pengajaran bahasa Indonesia & bahasa Jawa mulai SD hingga Perguruan Tinggi (Pernyataan no. 9—10). Sebagai orang Jawa tulen, dia tidak akan begitu saja rela jika bahasa Jawa tidak diberi hak hidup, atau malah "dibunuh" atas nama nasionalisasi bahasa Indonesia.

Bagian D: Pemilihan Bahasa terdiri atas 17 aitem pernyataan, yang diarahkan untuk mengungkap pemilihan bahasa responden terhadap lawan bicara pada situasi dan topik berbeda-beda, sebagaimana dikategorikan pada Tabel 3.7 berikut ini:

Tabel 3.7: Situasi dan Topik Komunikasi

No	*Deskripsi Komunikasi*	*Jumlah*	*Nomor Aitem*
1	Komunikasi dengan kerabat dekat pada situasi santai	3	1, 15, 16
2	Komunikasi denga kerabat jauh (sntai dan resmi)	2	2, 3
3	Komunikasi di depan publik pada situasi resmi	1	14
4	Komunikasi dengan orang lain (santai, di rumah)	1	17
5	Komunikasi dengan orang lain terkait status sosial.	2	4, 5
6	Komunikasi dengan orang lain terkait pendidikan	2	6,7
7	Komunikasi dengan orang lain terkait pekerjaan	3	8,9, 10
8	Komunikasi dengan orang lain terkait penghasilan	3	11, 12, 13

Pilihan kode bahasa yang tersedia atau ditawarkan untuk responden adalah *bahasa Jawa* sebagai pilihan variasi intra-bahasa atau *intra-language variation, bahasa Jawa dan bahasa Indonesia* sebagai pilihan campur kode atau *code-mixing,*

dan *bahasa Indonesia* sebagai pilihan alih kode atau *code switching*. Pilihan kode bahasa ini dapat dilihat pada Tabel 3.8 berikut ini.

Tabel 3.8: Pilihan Kode Bahasa

Skor	*Pilihan Kode Bahasa*
1	Bahasa Jawa
2	Bahasa Jawa dan Bahasa Indonesia
3	Bahasa Indonesia

Pemilihan bahasa responden, pertama-tama, diselidiki ketika berbicara dengan kerabat dekat, yakni kakek-nenek pada situasi santai di rumah (Pernyataan no. 1), menyanjung isteri di rumah dan menasihati anak/saudara (Pernyataan no. 15 dan 16). Lazimnya dua orang yang berasal dari sistem kaidah bahasa dan sistem nilai budaya yang sama, terjadi pada situasi santai, mereka cenderung menggunakan bahasa etnis atau bahasa ibu. Tiada jarak sosial-budaya diantara mereka. Akan tetapi, agak berbeda halnya dengan kerabat jauh pada situasi resmi, misalnya—terlebih jika mereka jarang bertemu. Pemilihan bahasa responden terhadap kerabat jauh, baik pada situasi santai maupun situasi resmi, diselidiki dengan pernyataan no. 2 dan 3.

Pernyataan no. 14 dan 17 melacak pemilihan bahasa responden saat berkomunikasi dengan non-kerabat pada topik dan situasi resmi dan santai. Topik dan situasi resmi di sini diwakili dengan pernyataan "berbicara di pertemuan formal (resmi)". Adapun pernyataan "membuat lelucon/humor" mengindikasikan topik dan situasi santai. Tingkat keformalan situasi dan topik pembicaraan sering mempengaruhi orang dalam menggunakan bahasanya.

Selanjutnya, pernyataan no. 4 dan 5 dirancang untuk melacak pemilihan bahasa responden saat berkomunikasi dengan orang lain dari status sosial sama dan lebih tinggi darinya. Status sosial yang sama mengindikasikan kesamaan derajat, dan karena itu tingkat solidaritasnya relatif tinggi. Mereka agaknya akan menggunakan bahasa yang saling menguntungkan kedua pihak, saling menyesuaikan, baik campur kode maupun alih kode. Status sosial lebih tinggi dari yang lain mengindikasikan *power* satu terhadap yang lain; dan yang berstatus rendah cenderung menyesuaikan bahasanya dengan yang berstatus lebih tinggi agar mengalami mobilitas sosial ke atas. Adapun pernnyataan no. 6-7 digunakan untuk melacak pemilihan bahasa responden saat berbicara dengan orang lain dari jenjang pendidikan yang sama dan lebih tinggi darinya. Mirip dengan sub-kategori status sosial, praktik solidaritas dan *power*, serta munculnya aspirasi untuk melakukan mobilitas sosial ke atas juga bisa terjadi ketika berbicara dengan mempertimbangkan jenjang pendidikan.

Pemilihan bahasa responden ketika berbicara dengan lawan bicara dari jenis pekerjaan yang lebih rendah, sama, dan lebih tinggi darinya diselidiki dengan pernyataan no. 8, 9, dan 10. Pekerjaan merupakan aspek stratifikasi atau kelas sosial yang penting karena begitu banyak segi kehidupan lainnya yang berkaitan dengan pekerjaan. Pekerjaan menentukan gaya hidup seseorang. Karena itu, bahasa yang perlu digunakan dengan pemilik pekerjaan tertentu (terutama sama atau lebih tinggi) adalah bahasa yang memungkinkan orang untuk "berada" dalam kedudukan atau derajat gaya hidup yang sepadan. Sedangkan untuk pemilihan bahasa responden ketika berbicara dengan orang lain dari jumlah penghasilan lebih rendah, sama, dan lebih tinggi

darinya, dirancanglah pernyataan no. 11, 12, 13. Hal yang sama dapat juga terjadi dengan jumlah penghasilan seseorang dalam mengkondisikan orang lain dalam pemilihan bahasa saat menjalin komunikasi satu sama lain.

3.3.6. Uji Reliabilitas dan Validitas Instrumen

Instrumen penelitian atau kuesioner diuji reliabilitas dan validitasnya. Pengujian dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik *Alpha Cronbach*. (Kuesioner final setelah uji reliabilitas dan validitas dapat dilihat pada **Lampiran** 4.) Berikut ini disajikan hasil akhir (*output*) pengujian reliabilitas dan validitas instrumen penelitian, terutama yang menyangkut Kompetensi Komunikatif, Sikap Bahasa, dan Pemilihan Bahasa. (Lihat pula **Lampiran** 5).

Kompetensi Komunikatif. Terdapat 12 item pernyataan tentang kompetensi komunikatif, yang mencakup 3 aitem pengetahuan linguistik (KMK8, KMK9, KMK10) dan 9 aitem pengetahuan pragmatik (KMK, KMK1, KMK2, KMK3, KMK4, KMK5, KMK6, KMK7, KMK11). Adapun angka validitas per aitem pernyataan dapat dilihat pada kolom *Corrected Item-Total Correlation* dalam Tabel 3.9. Karena angka-angka tersebut cukup besar, aitem pernyataan yang ada valid. Sementara itu, untuk angka reliabilitas seluruh aitem kompetensi komunikatif sebesar Alpha = 0.9146.

Tabel 3.9: Hasil Uji Reliabilitas dan Validitas Kompetensi Komunikatif

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Alpha ifItem Deleted
KMK	44.7801	47.4013	.7388	.9039
KMK1	44.9433	48.4253	.6178	.9092
KMK2	45.2695	45.5983	.7824	.9013
KMK3	45.5816	46.1737	.7521	.9029
KMK4	44.5461	50.4068	.5850	.9107
KMK5	44.5177	50.7658	.6252	.9098
KMK6	44.7518	48.0308	.7449	.9040
KMK7	45.0000	47.5714	.6155	.9098
KMK8	44.7518	48.6022	.6030	.9099
KMK9	45.2057	46.3074	.7375	.9036
KMK10	45.6738	46.8785	.6056	.9111
KMK11	44.9929	51.2928	.5030	.9136

Reliability Coefficients
N of Cases = 141.0 N of Items = 12
Alpha = .9146

Sikap Bahasa. Terdapat 11 aitem pernyataan tentang sikap bahasa, yang mencakup: 4 buah pernyataan tentang sikap umum terhadap bahasa 'sasaran' (Aitem 1, 6, 7, 8); 1 buah pernyataan tentang sikap terhadap penutur bahasa 'sasaran' (Pernyataan no. 11); 1 buah pernyataan tentang sikap terhadap budaya 'sasaran' (Pernyataan no. 4); 2 buah pernyataan tentang sikap terhadap nilai sosial pembelajaran bahasa 'sasaran' (Pernyataan no. 5 & 4); 2 buah pernyataan tentang sikap terhadap kegunaan khusus bahasa 'sasaran' (Pernyataan no. 2 & 7); dan 3 buah pernyataan tentang sikap terhadap dirinya sebagai anggota budaya 'sasaran' (Pernyataan no. 3, 9, & 10). Adapun angka validitas per aitem pernyataan dapat dilihat pada kolom *Corrected Item-Total Correlation* dalam Tabel 3.10. Karena angka-angka tersebut

cukup besar, aitem pernyataan yang ada valid. Sementara itu, untuk angka reliabilitas seluruh aitem kompetensi komunikatif sebesar Alpha = 0.7397.

Tabel 3.10: Hasil Uji Reliabilitas dan Validitas Sikap Bahasa

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Alpha ifItem Deleted
SIKAP1	37.9514	19.7529	.4611	.7113
SIKAP2	38.6111	21.1204	.2500	.7379
SIKAP3	37.6736	20.1375	.3762	.7221
SIKAP4	38.3333	20.2238	.3913	.7202
SIKAP5	38.5139	18.2096	.5020	.7025
SIKAP6	38.1111	20.2113	.3999	.7192
SIKAP7	37.9375	20.6884	.3573	.7247
SIKAP8	37.9028	20.3821	.4316	.7165
SIKAP9	37.7569	20.4650	.3244	.7289
SIKAP10	38.5069	19.2587	.3658	.7256
SIKAP11	39.0486	19.2913	.4058	.7182

Reliability Coefficients
N of Cases = 144.0 N of Items = 11
Alpha = .7397

Pemilihan Bahasa. Terdapat 17 aitem pernyataan tentang pemilihan bahasa, yang mencakup 8 kategori deskripsi komunikasi: 3 buah pernyataan tentang komunikasi dengan kerabat dekat pada situasi santai (Pernyataan no. 1, 15, 16); 2 buah pernyataan tentang komunikasi dengan kerabat jauh (sntai dan resmi) (pernyataan no. 2 & 3); 1 buah pernyataan tentang komunikasi di depan publik pada situasi resmi (Pernyataan no. 14); 1 buah pernyataan tentang komunikasi dengan orang lain dengan santai, di rumah (Pernyataan no. 17); 2 buah pernyataan tentang komunikasi dengan orang lain terkait status sosial (Pernyataan no. 4 & 5); 2 buah pernyataan tentang komunikasi dengan orang lain terkait tk. pendidikan (Pernyataan

no. 6 & 7); 3 buah pernyataan tentang komunikasi dengan orang lain terkait pekerjaan (Pernyataan no. 8, 9, & 10); dan 3 buah pernyataan tentang komunikasi dengan orang lain terkait penghasilan (Pernyataan no. 11, 12, & 13). Adapun angka validitas per aitem pernyataan dapat dilihat pada kolom *Corrected Item-Total Correlation* dalam Tabel 3.11. Karena angka-angka tersebut cukup besar, aitem pernyataan yang ada valid. Sementara itu, untuk angka reliabilitas seluruh aitem kompetensi komunikatif sebesar Alpha = 0.8872.

Tabel 3.11: Hasil Uji Reliabilitas dan Validitas Pemilihan Bahasa

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Alpha if Item Deleted
LAKU1	33.2708	33.6394	.1521	.8906
LAKU2	32.8403	31.0862	.4572	.8836
LAKU3	32.3750	30.5017	.4277	.8860
LAKU4	32.4722	30.6286	.6538	.8774
LAKU5	32.1944	29.5284	.6036	.8780
LAKU6	32.3472	30.4520	.6070	.8783
LAKU7	32.0069	29.6293	.6202	.8773
LAKU8	32.4653	30.2505	.5255	.8812
LAKU9	32.2847	30.3310	.6720	.8764
LAKU10	31.9653	29.6282	.6540	.8761
LAKU11	32.5764	30.4836	.5619	.8798
LAKU12	32.4583	30.5437	.7171	.8759
LAKU13	32.1736	29.8088	.6115	.8777
LAKU14	31.6042	31.8212	.4396	.8840
LAKU15	32.6389	30.2883	.4915	.8828
LAKU16	32.2847	30.9184	.4326	.8849
LAKU17	32.4861	31.4404	.4131	.8850

Reliability Coeficients
N of Cases = 144.0 N of Item = 17
Alpha = .8872

3.3.7. Pengumpulan Data

Data awal penelitian ini diperoleh dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran wilayah dan kependudukan di berbagai wilayah di Perumnas KBD Gresik dan sekaligus untuk memperoleh kondisi umum tentang stratifikasi sosial masyarakat dan pola-pola pemilihan bahasanya. Wawancara dengan para Ketua RT/RW dilakukan untuk menggali data tentang calon populasi terutama yang terkait dengan karakteristik-karakteristik yabng diperlukan dalam penelitian. Wawancara juga dilakukan dengan sampel atau responden, baik ketika menjelaskan pengisian kuesioner maupun ketika membantu mereka mengisikan kuesioner kalau memang diperlukan. Adapun teknik dokumentasi, yakni menggali dokumen tertulis, untuk data sekunder dilakukan dengan menemui para Ketua RT/RW. Dokumen tertulis itu berupa "Kartu Susunan Keluarga" model RT/RW setempat yang dapat diperbarui sewaktu-waktu. Umur KSK ini tidak lebih dari 2 (dua) tahun untuk menjaga kesesuaian antara data dan keadaan (calon) responden; karena itu, KSK yang lebih dari 2 tahun diverifikasi dengan para Ketua RT/RW. Pada akhirnya serangkaian teknik pengumpulan data awal ini diarahkan untuk menentukan populasi dan sampel, termasuk pola stratifikasi sosialnya.

Adapun data primer penelitian ini dikumpulkan dengan memberikan instrumen penelitian (kuesioner) kepada responden-responden yang ditetapkan. Sejatinya hanya dibutuhkan 144 buah kuesioner yang terjawab, tetapi peneliti sengaja menetapkan 1 buah kuesioner ekstra untuk kelipatan 5 responden dalam stratum sama. Artinya, jika di blok kawasan Intan mestinya ada 2 responden berstratum rendah, maka peneliti

menambah 1 responden lagi sehingga totalnya 3 (tiga). Cara ini dimaksudkan untuk menghindari ketidaksesuaian stratum responden antara hasil olahan data sekunder (dokumen KSK) dan data primer (kuesioner). Di samping itu, hal tersebut juga dimaksudkan untuk mengantisipasi tidak-kembalinya kuesioner, tidak lengkapnya kuesioner, atau alasan lain sehingga kuesioner tidak layak untuk dijadikan data penelitian. Dengan cara demikian, jumlah responden menjadi 187 orang, sehingga responden ekstranya 43 orang. Daftar sebaran sampel / kuesioner selengkapnya dapat disajikan dalam Tabel 3.12 berikut ini.

Tabel 3.12: Daftar Sebaran Kuesioner

No	*Blok Kawasan*	*Stratifikasi Sosial*			*Total*
		Rendah	*Sedang*	*Tinggi*	
1	Panca Warna	17+4= 21	11+3= 14	4 + 1= 5	40
2	Granit Kumala	9+2 = 11	12+3= 15	6 + 2= 8	34
3	Mutiara	2 + 1= 3	8+2 = 10	4 + 1= 5	18
4	Biduri Pandan	3 + 1= 4	7 + 2= 9	3 + 1= 4	17
5	Granit Nila	4 + 1= 5	5 + 1= 7	4 + 1= 5	17
6	Intan	1 + 1= 2	3 + 1= 4	4 + 1= 5	11
7	Kalimaya	2 + 1= 3	3 + 1= 4	1+ 1= 2	9
8	Aquamarin	3 + 1= 4	3 + 1= 4	2 + 1= 3	11
9	Biduri Bulan	3 + 1= 4	5 + 1= 7	3 + 1= 4	15
10	Phyrus Biru	5 + 1= 6	4 + 1= 5	3 +1= 4	15
	Total	**63**	**79**	**45**	**187**
	Persen	33.68	42.24	24.06	100

Sebelum dikirimkan kepada para responden, kuesioner dimasukkan ke dalam amplop agar para responden merasa yakin bahwa kerahasiaan jawaban mereka cukup terjamin. Jawaban responden juga diharapkan agar dimasukkan kembali ke dalam amplop. Dan selama pemberian kuesioner, peneliti dan asistennya membangun

komunikasi dengan baik—bahkan, jika diperlukan untuk datang, peneliti dan asistennya akan datang membantu menuliskan jawaban mereka.

Responden diberi kesempatan paling lama 4 (empat) hari untuk menjawab pertanyaan kuesioner tersebut. Peneliti dan asistennya mengambil sendiri kuesioner yang telah dilengkapi oleh responden. Kemudian, data dikumpulkan, diadakan pengecekan jawaban, dan dikelompokkan secara sistematis. Ada beberapa responden yang dianggap tidak mengisi dengan benar tentang jumlah penghasilan; karena itu, peneliti melakukan verifikasi atau triangulasi terhadap yang bersangkutan.

Setelah prosedur pengumpulan data selesai, dari 187 kuesioner yang didistribusikan, tercatatlah bahwa jumlah kuesioner terjawab yang kembali berjumlah 163 (87.16), dan 24 (12.83%) kuesioner tidak kembali. Dari 163 kuesioner yang kembali, diperoleh kuesioner yang lengkap sejumlah 145 buah. Akhirnya, 1 (satu) buah kuesioner disisihkan karena berkarakteristik sama. Jumlah 144 buah ini sesuai dengan harapan saat penentuan sampel, dan peneliti putuskan jumlah itu memadai dan representatif serta layak untuk dianalisis. Adapun prosedur pengolahan data dan teknik analisis data dapat dilihat pada paparan butir 3.8. berikut ini.

3.3.8. Prosedur Pengolahan dan Analisis Data

Data penelitian diolah dengan prosedur berikut ini:

Pertama, pengeditan data (*editing*) : Kuesioner yang masuk dilakukan *editing* untuk memeriksa jawaban responden terhadap pernyataan-pernyataan yang diajukan. Tercatat, terdapat 18 buah dari kuesioner yang masuk, ternyata tidak lengkap atau cacad yang tidak layak dianalisis.

Kedua, pengkodean data (*coding*): Data yang sudah lengkap dilakukan proses pengkodean, dan tabulasi data secara teliti dan cermat. (Hasil tabulasi data mentah penelitian dapat dilihat pada **Lampiran** 7).

Ketiga, mengklasifikasi data untuk dikelompokkan dalam kategori yang diperlukan sesuai tujuan penelitian: stratifikasi sosial (pendidikan, pekerjaan, penghasilan), kompetensi komunikatif, sikap bahasa, dan pemilihan bahasa.

Keempat, melakukan transformasi data yang ada (stratifikasi sosial, kompetensi komunikatif, sikap bahasa, pemilihan bahasa) menjadi data ordinal. Data tentang pendidikan, sikap bahasa, kompetensi komunikatif sudah ordinal. Data tentang pekerjaan, sejalan Melvin Kohn, juga sudah termasuk ordinal. Penghasilan, sebagai data interval, dapat ditransformasi ke dalam data ordinal dengan cara memberi kode klasifikasi menjadi sangat rendah, rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi. Sedangkan data pemilihan bahasa, sebagai data nominal, ditransformasi ke dalam data ordinal dengan memasukkannya ke dalam skala prestis rendah, sedang, tinggi— dengan rujukan pada Dede Oetomo (1989:20) yang menengarai startifikasi sosial bahasa antara bahasa Indonesia dan bahasa Jawa. Bahasa Indonesia adalah bahasa bergengsi dan modern serta sesuai digunakan di tempat-tempat modern, sedangkan bahasa Jawa adalah bahasa tidak bergengsi dan tidak pantas digunakan untuk pranata modern.

Kelima, memasukkan ke tabel frekwensi satu variabel (univariat). Setelah dimasukkan secara sempurna, data ini menjadi data final penelitian yang siap untuk dianalisis. (Lihat **Lampiran 6.**)

[Khusus untuk menjawab masalah khusus penelitian butir 6, yakni adakah pengaruh stratifikasi sosial terhadap pemilihan bahasa dengan dimediasi sikap bahasa dan kompetensi komunikatif secara bersama, dilakukan pencarian nilai rata-rata (*average*) data antara data sikap bahasa dan kompetensi komunikatif—yang peneliti namakan "Modal Komunikatif". Untuk kepentingan skoring, hasil rerata dengan nilai desimal 0.5 ke atas dibulatkan ke angka berikutnya. Misalnya, jika hasil rerata 3.5, angka ini dibulatkan menjadi 4. Konversinya: Sangat rendah (1), rendah (2), cukup (3), baik (4), dan sangat baik (5).]

Keenam, data diolah dengan menggunakan ***Analisis Univariat*** dengan perangkat *Statistical Package for Social Sciences* (SPSS) versi 10, yang diarahkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian. Analisis Univariat—yang difungsikan sebagai analisis jalur (*path analysis*), yang memungkinkan variabel-variabelnya seakan sebagai variabel bebas X (Hasan 1995)—digunakan untuk mengolah data dengan pertimbangan: (1) data yang ada sudah merupakan data ordinal—setelah melampaui transformasi untuk penyeragaman jenis data; (2) tenik statistiknya non-parametrik, yang dalam perangkat SPSS versi 10 tersedia fasilitasnya; (3) analisis diarahkan untuk melihat seberapa besar pengaruh antar variabel, dan sekaligus melihat perbedaan (*grade*) keterkaitan dimensi variabel dalam memberikan pengaruh—konkretnya berupa uji F (*Tests of Between-Subject Effects*) dan uji beda pengaruh *Post Hoc Tests*.

Untuk menentukan signifikansi perbedaan statistik antara variabel-variabel kategorikal, teknik statistik nonparametrik diterapkan. Nilai *Alfa* (taraf signifikansi)

ditetapkan sebesar 0.05. Suatu hubungan pengaruh dikatakan signifikan bilamana angka Sig. (proporsi, p) lebih kecil daripada 0.05.

Analisis Univariat terhadap varian dioperasikan untuk proporsi faktor-faktor antar-subjek, statistik deskriptif variabel, dan statistik inferensial (uji pengaruh antar variabel). Untuk mengetahui perbedaan pengaruh masing-masing kategori variabel bebas terhadap variabel tergantung digunakan teknik Post Hoc Test. Dengan perangkat SPSS versi 10, variabel-variabel penelitian yang dikehendaki bisa diprogramkan secara langsung sehingga akhirnya diperoleh keluaran (*output*) hitungan statistik yang rinci dan lengkap. Peneliti tinggal memilah dan memilih mana yang benar-benar diperlukan untuk bahan bahasan hasil penelitian.

Khusus untuk menjawab masalah penelitian no. 6-7, yakni pengaruh stratifikasi sosial terhadap pemilihan bahasa melalui sikap bahasa dan kompetensi komunikatif secara bersama-sama dan individual, peneliti membuat nilai rata-rata (*average*) saat menjumlah efek langsung dan efek tak langsung. Maksudnya, jika efek tak langsung stratifikasi sosial terhadap pemilihan bahasa melalui sikap bahasa sebesar r=0.798; dan efek langsung sikap langsung terhadap pemilihan bahasa sebesar r=0.590, maka efek stratifikasi sosial terhadap pemilihan bahasa melalui sikap bahasa adalah 0.798 + 0.590 dibagi 2 = 0.694. Demikian pula untuk *intervening variable* kompetensi komunikatif, dan gabungan sikap bahasa-kompetensi komunikatif (modal komunikatif).

Hasil pengujian statistik akan diikuti dengan bahasan hasil penelitian. Bagian ini akan memperjelas temuan-temuan dalam pengujian statistik. Hakikatnya, ia

digunakan untuk menjelaskan berbagai kemungkinan yang berkaitan dengan hasil temuan. Kesimpulan ditarik secara komprehensif berdasarkan keseluruhan analisis yang dilakukan. Saran-saran diberikan untuk penelitian selanjutnya.

BAB 4

HASIL PENELITIAN

Dalam Bab 4 ini dipaparkan hasil penelitian yang diarahkan untuk menjawab masalah penelitian yang diajukan pada bab terdahulu. Paparan ini dipilah menjadi empat sub-bagian, yakni paparan tentang deskripsi lokasi penelitiann, paparan tentang profil variabel penelitian, paparan tentang uji statistik antar variabel, dan hasil uji pengaruh antar variabel. Paparan selengkapnya dapat disajikan di bawah ini.

4.1. Deskripsi Lokasi Penelitian

Perumnas Kota Baru Driyorejo (KBD) Gresik, sebagai lokasi penelitian ini, adalah sebuah perumnas yang konon terbesar se-Asia Tenggara dan diproyeksikan akan menjadi "sebuah kota baru yang mandiri" ini, terletak sekitar 1 km selatan desa Lakarsantri Surabaya barat, dan dikelilingi oleh tiga desa eks-pemilik tanah perumnas itu: desa Petiken, desa Gadung, dan desa Randegansari. Sementara itu, ketiga desa ini termasuk kecamatan Driyorejo, kabupaten Gresik. Sedangkan batas-batas kecamatan Driyorejo sebagai berikut: sebelah utara: kecamatan Menganti, sebelah selatan: kecamatan Krian, sebelah timur: kecamatan Karangpilang dan kecamatan Taman, dan sebelah barat: kecamatan Kedamaian dan Wringinanom. (Peta kecamatan Driyorejo bisa dilihat pada **Lampiran 2**).

Sebagai perumnas baru—dihuni sejak 1997 lalu—dan sedang berkembang, ia telah memiliki 13 blok kawasan: Panca Warna, Granit Kumala, Biduri Pandan, Granit Nila, Mutiara, Intan (termasuk desa Petiken), Kalimaya, Aquamarine, Silindri

(termasuk desa Randegansari), Biduri Bulan, Phyrus Biru, Zamrud, Mirah Delima (termasuk desa Gadung). Kini Perumnas KBD Gresik masih membangun unit-unit rumah baru dengan berbagai tipe, dan akan termasuk dalam blok kawasan baru.

Masyarakat yang menghuni perumnas ini sudah berjumlah ribuan. Mereka memiliki latar belakang sosioekonomi, status sosial, asal-daerah, pendidikan, integrasi sosial, sosio-budaya yang cukup heterogen. Mereka bekerja di Surabaya dan sekitarnya atau berwiraswasta di rumah mereka, dan memilih menetap di Perumnas KBD Gresik sebagai kawasan yang tidak jauh dari kota Surabaya. Barangkali kian sumpeknya lahan hunian di kota Surabaya di satu sisi dan pesona alamnya PKBD Gresik di sisi lain agaknya telah ikut mendetermiasi pilihan mereka untuk menghuni perumnas ini.

Mobilitas kerja masyarakat dan lokasi yang berhimpitan dengan Surabaya memungkinkan terjadinya suatu difusi (perembesan) kebudayaan secara signifikan. Akibatnya, timbullah perubahan dan/atau perkembangan tipe komunitas atau masyarakat yang ada. Kendati ada di wilayah "pinggiran" Gresik-Surabaya, masyarakat di Perumnas KBD Gresik ini agaknya bukan semata-mata masyarakat pedesaan, tetapi sekaligus juga bukan sepenuhnya masyarakat perkotaan. Setidaknya, terkesan bahwa ada semacam "proses pengkotaan" sedang berlangsung di wilayah ini.

Dalam konteks penelitian ini, hanya ada sepuluh blok kawasan yang dijadikan lokasi penelitian, yakni Panca Warna, Granit Kumala, Biduri Pandan, Granit Nila, Biduri Bulan, Aquamarine, Phyrus Biru, Mutiara, Intan, dan Kalimaya. Sedangkan Zamrud, Silindri, dan Mirah Delima tidak dijadikan bagian lokasi penelitian karena

tidak memenuhi persyaratan: yakni tidak dihuni oleh lebih dari dua etnik sehingga tidak tampak adanya kontak bahasa antar kelompok etnik.

Di blok-blok kawasan dalam lingkungan Perumnas KBD Driyorejo, rumah-rumah disusun berlapis-lapis sesuai dengan tipe rumah, mulai yang bertipe besar/mewah di lapis terluar, tipe sedang di lapis dalamnya, dan tipe kecil di lapis paling dalam. Rumah tipe kecil meliputi RSS-21, RSS-36, RS-21, RS 21+, dan T-27 (dengan total 3.258 unit atau 48.38%); rumah tipe sedang meliputi RS 30+, RS-36, RS-45 (dengan total 3.427 unit atau 50.89%), dan rumah tipe besar/mewah meliputi RS-54, RS-70, MZ-100, Ruko (dengan total 49 unit atau 0.72%). Dengan demikian, total rumah hunian yang ada sebesar 6.734 unit.

Dari jumlah 6.734 unit rumah belum semuanya dihuni oleh pemiliknya. Sementara ini, yang menghuni sepuluh blok kawasan tersebut adalah etnik Jawa (1604 KK), etnik Madura (576 KK), etnik Batak (103 KK), etnik Ambon (112 KK), etnik Sunda (77 KK), dan lain-lain (47 KK). Mereka menyebar di 13 RW (rukun warga) atau 71 RT (rukun tetangga), dengan rincian sebagai berikut: Pancawarna (2 RW, 9 RT), Granit Kumala (2 RW, 9 RT), Mutiara (2 RW, 11 RT), Biduri Pandan (1 RW, 7 RT), Granit Nila (1 RW, 9 RT), Intan (1 RW, 7 RT), Kalimaya (1 RW, 4 RT), Aquamarine (1 RW, 5 RT), Biduri Bulan (1 RW, 5 RT), dan Phyrus Biru (1 RW, 5 RT). (Akan tetapi, belakangan juga tersiar rumor bahwa sejumlah RT akan membentuk RW-RW baru.)

Karena fokus penelitian ini adalah masyarakat Jawa, maka yang diperhatikan hanya masyarakat Jawa, yakni yang berjumlah 1604 KK. Dari 1604 KK ini diseleksi

lagi berdasarkan parameter karakteristik populasi penelitian, dan tercatatlah bahwa jumlah Kepala Keluarga yang layak dijadikan populasi penelitian sebesar 1442 KK.

Berdasarkan observasi yang intensif, tipe rumah cenderung menunjukkan stratifkasi sosial pemiliknya. Artinya, seseorang yang mendiami rumah tipe RS-70 dinilai berstratum sosial cukup tinggi. Untuk memiliki atau mendiami rumah setipe itu pastilah dibutuhkan dana yang cukup banyak, dan dana yang banyak hanya bisa diakses oleh mereka yang berduit. Sebaliknya, orang yang berpendidikan rendah, berpenghasilan rendah, cenderung menempati rumah tipe RS-36 atau bahkan RS-21. Meskipun demikian, kecenderungan ini tidak selalu berjalan linier.

Dalam konteks komunikasi, anggota masyarakat Jawa melakukan kontak bahasa dengan keluarga di rumah, dengan sesama etnik Jawa di berbagai fora dan kesempatan, dan dengan etnik lain. Dalam berbagai ranah anggota masyarakat Jawa harus memilih bahasa yang paling cocok untuk situasi dan peristiwa tutur yang menuntutnya. Kondisi semacam ini tampak sekali ketika pertemuan-pertemuan warga dilaksanakan (lazimnya satu kali dalam satu bulan), dengan medium pengantar bahasa Indonesia. Akan tetapi, bahasa Indonesia yang mereka gunakan tampaknya sangat kental dipengaruhi oleh logat (aksen) bahasa daerahnya.

4.2. Deskripsi Variabel Penelitian

Deskripsi variabel dimaksudkan untuk menyajikan gambaran mengenai variabel-variabel penelitian berdasarkan hasil olahan data penelitian dengan uji univariat. Berikut ini disajikan deskripsi variabel-variabel penelitian, mulai variabel

stratifikasi sosial, variabel sikap bahasa, variabel kompetensi komunikatif, dan variabel pemilihan bahasa.

4.2.1. Variabel Stratifikasi Sosial

Sebagaimana yang telah disinggung di muka, penelitian ini mengambil pijakan stratifikasi sosial dengan metode objektif, yang lazimnya diarahkan terhadap tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, dan jumlah penghasilan (G.Tan dalam Koenjaraningrat 1997:23; Nasution 1999; dan Karsidi 2005:175).

Pemetakan profil stratifikasi sosial responden (lihat Tabel 4.1) didasarkan pada penghasilan, pekerjaan, dan pendidikan. Pada sub-variabel penghasilan didominasi oleh responden berpenghasilan Rp 1.000.000—Rp 2.000.000, dan disusul responden berpenghasilan Rp Rp 2.000.500—Rp 3.000.000. Lewat lacakan data, mereka umumnya adalah pegawai negeri, wirausaha skala sedang, atau tukang yang berpengalaman; berpendidikan menengah atau tinggi, dan kebanyakan menempati rumah tipe 36. Di peringkat ketiga adalah responden berpenghasilan < Rp 1.000.000, yang pada umumnya berpendidikan dasar, menempati rumah hunian tipe RS-21, bekerja sebagai wirausaha kecil, tukang atau buruh. Kelompok minoritas berdasarkan penghasilan adalah responden berpenghasilan Rp 3.000.500—Rp 4.000.000 dan > Rp 4.000.000. Mereka terdiri atas wirausaha skala sedang/besar, profesional, atau pegawai negeri yang memiliki usaha sampingan.

Dilihat dari jenis pekerjaannya, responden dipetakan menjadi empat: (1) tukang/buruh, yakni pekerja yang mengandalkan tenaga/otot dan terutama mengikuti pesanan pihak lain, termasuk 'swasta' yang tidak disebut spesifik/jelas

(N=59=40.97%); (2) wirausaha atau wiraswasta: orang yang memiliki dan menjalankan usahanya sendiri, baik besar maupun kecil (N=19=13.19%); (3) profesional: orang yang menekuni profesi non-negeri dengan bidang kerja (terutama) jasa, konseptual pemikiran, dan lazimnya bekerja di sektor swasta N=24=16.66%); (4) pegawai negeri: orang yang bekerja untuk pemerintah, baik pegawai negeri maupun TNI/Polri (N=42=29.16%). Hal ini mengindikasikan bahwa mayoritas responden berpenghasilan Rp 1.000.000—Rp 2.000.000, kemudian disusul yang berpenghasilan Rp 2.000.500--Rp 3.000.000, < Rp 1.000.000, lalu > Rp 4.000.000, dan terakhir Rp 3.000.500--Rp 4.000.000.

Tabel 4.1. Profil Stratifikasi Sosial

Sub-variabel		*Label*	***Jumlah*** *(N = 144)*	***Persen***
Penghasilan	1.00	< 1.000.000	27	18.75
	2.00	Rp 1.000.000—Rp2.000.000	69	47.92
	3.00	Rp 2.000.500--Rp 3.000.000	32	22.22
	4.00	Rp 3.000.000—Rp 4.000.000	5	3.47
	5.00	> 4.000.000	11	7.63
			144	*100*
Pekerjaan	1.00	Tukang/Buruh	59	40.97
	2.00	Wirausaha	19	13.19
	3.00	Profesional	24	16.66
	4.00	Peg.Negeri	42	29,16
			144	*100*
Pendidikan	1.00	Dasar	25	17.36
	2.00	Menegah	56	38,88
	3.00	Tinggi	63	43.75
			144	*100*

Dilihat dari jenjang pendidikan formalnya, responden dipetakan menjadi tiga: pendidikan dasar yang mencakup SD dan SLTP (N=25=17.36%), pendidikan

menengah atau SLTA (N=56=38.88), dan pendidikan tinggi yang terdiri atas D1, D2, Akademi, D3, S1, S2 (N=63=47.75%). Dalam konteks ini mayoritas responden termasuk memiliki pendidikan tinggi, lalu disusul pendidikan menengah, dan kemudian baru pendidikan dasar. Hal ini mengindikasikan bahwa mayoritas responden telah mengenyam pendidikan sampai pada jenjang tertentu—dan menurut lacakan data, tidak ada satu responden pun yang tidak sekolah atau tidak lulus SD.

Mengingat pendidikan, pekerjaan, dan pekerjaan tersebut menunjukkan stratifikasi/kelas sosial seseorang dalam masyarakat, mereka diduga ikut menentukan tindakan atau perilaku sosialnya. Karena pemilihan bahasa dalam konteks sosial sebenarnya juga merupakan bagian dari perilaku sosial, maka dapat dikatakan bahwa ketiga sub-faktor stratifikasi tersebut diduga juga menentukan pemilihan bahasa.

Oleh karena itu, dalam penelitian ini stratifikasi sosial diperlakukan sebagai variabel bebas ketika dikaitkan dengan pemilihan bahasa. Hal ini mengimplikasikan bahwa stratifikasi sosial diduga kuat memiliki hubungan atau pengaruh tertentu terhadap pemilihan bahasa.

4.2.2. Variabel Sikap Bahasa

Sikap bahasa masih berada dalam tahap kognisi dan afeksi, bukan merupakan tindakan nyata (manifes) yang bersifat psikomotorik. Karena itu, dalam sikap bahasa seseorang terhadap sesuatu terkandung pikiran dan perasaan senang atau tidak senang, positif atau negatif, terhadap bahasa. Dialah yang mendasari seseorang untuk berbuat sesuatu (melakukan tindak kebahasaan), meskipun sikap dan tindakan *tidak selalu* berkorelasi secara kuat dan signifikan.

Manifestasi sikap bahasa seseorang dapat berupa sikap terhadap: (1) bahasa sasaran; (2) penutur bahasa sasaran; (3) budaya bahasa sasaran; (4) nilai sosial pembelajaran bahasa sasaran; (5) kegunaan-kegunaan khusus bahasa sasaran; (6) diri sendiri sebagai anggota dari budayanya sendiri.

Output data penelitian menunjukkan, bahwa pemerian sikap bahasa responden menjadi empat label: negatif sebesar 36.80%, netral 27.78%, positif 22.22%, dan sangat positif 13.19%. Tidak terdeteksi responden yang bersikap bahasa sangat negatif (lihat Tabel 4.2). Orang Jawa semestinya sikap bahasa yang positif atau sangat positif terhadap bahasa-budaya Jawa. Akan tetapi kenyataannya, cukup banyak responden yang bersikap bahasa negatif dan netral.

Tabel 4.2.: Profil Sikap Bahasa

Variabel		*Label*	*Jumlah*	*Persen*
Sikap bahasa	2.00	Negatif	53	36.80
	3.00	Netral	40	27.78
	4.00	Positif	32	22.22
	5.00	Sangat positif	19	13.19
			144	*100*

Sikap bahasa negatif lazimnya akan memungkinkan orang untuk enggan menggunakan bahasa bersangkutan dalam komunikasi. Jika demikian halnya, boleh jadi cukup banyak masyarakat Jawa yang tidak lagi bangga dan loyal terhadap bahasa Jawa. Kenyataan ini diperburuk dengan pengakuan 40 responden (27.78%) yang bersikap bahasa netral. Netral hakikatnya tidak menunjukkan sikap apa-apa, dan bahkan dikatakan 'ragu-ragu'. Keraguan responden mengindikasikan lunturnya kebanggan atau loyalitas terhadap bahasa pertama.

Dalam penelitian ini, berkaitan dengan pemilihan bahasa, sikap bahasa diperlakukan sebagai salah satu variabel antara (*intervening variable*), yakni variabel antara untuk melihat pengaruh stratifikasi sosial terhadap pemilihan bahasa.

4.2.3. Variabel Kompetensi Komunikatif

Kompetensi komunikatif mengacu pada pemahaman seseorang tentang sistem kaidah bahasa, pada manusia yang diabstraksikan dari batasan-batasan kontekstual, pada yang Ideal. Kompetensi komunikatif meliputi pengetahuan (*knowledge*) yang responden miliki tentang apa yang mendasari perilaku bahasa (*language behavior*) atau perilaku tutur (*speech behavior*) yang tepat dan benar, dan tentang apa yang membentuk perilaku pemilihan bahasa yang efektif dalam kaitannya dengan tujuan-tujuan komunikatif. Kompetensi komunikatif mencakup pengetahuan linguistik dan pengetahuan pragmatik.

Dalam penelitian ini terungkap bahwa tidak satu responden pun yang buta berbahasa—artinya, tidak ada responden yang mengaku tidak mempunyai kemampuan sama sekali untuk berkomunikasi. Yang terdeteksi adalah bahwa kompetensi komunikatif responden terbagi menjadi empat label, yakni sedikit, cukup, baik, dan sangat baik, sebagaimana disajikan dalam Tabel 4.3. berikut:

Tabel 4.3.: Profil Kompetensi Komunikatif

Variabel		*Label*	*Jumlah*	*Persen*
Kompetensi Komunikatif	2.00	Sedikit	50	34.72
	3.00	Cukup	28	19.44
	4.00	Baik	49	34.02
	5.00	Sangat baik	17	11.80
			144	100

Label sedikit berarti responden hanya sedikit (beberapa kata) memiliki kemampuan komunikasi dalam bahasa Jawa dan/atau bahasa Indonesia untuk kegiatan-kegiatan kebahasaan yang relatif kompleks—termasuk penerapan tingkat tutur bahasa Jawa. Sedangkan label cukup berarti cukup mampu berbicara dalam bahasa Jawa/Indonesia dengan kesulitan yang cukup besar. Label baik mengindikasikan mampu berbicara dengan kesulitan kecil, dan label sangat baik mengindikasikan mampu berbicara tanpa kesulitan sama sekali.

Dalam tabel tersebut tampak, bahwa ternyata lebih dari sepertiga dari jumlah responden (34.72%) memiliki sedikit kompetensi komunikatif—sama dengan mereka yang memiliki kompetensi komunikatif yang baik. Sementara itu responden yang berkompetensi komunikatif cukup sebesar 19.44%, dan sangat baik sebesar 11.80%. Dengan pelacakan terhadap data secara acak, ditemukan bahwa kompetensi sedikit dan cukup cenderung dimiliki oleh responden karena perolehan (askripsi) saja dari generasi sebelumnya. Sementara itu, kompetensi baik dan sangat baik, selain diperoleh, juga diraih (*achieved*) terutama lewat pendidikan. Karena itu, pendidikan diduga berpengaruh cukup besar terhadap kompetensi komunikatif.

Dalam penelitian ini kompetensi komunkatif, sama dengan sikap bahasa, diperlakukan juga sebagai variabel antara (*intervening* variable) ketika dikaitkan dengan variabel stratifikasi sosial dan variabel pemilihan bahasa. Kedudukannya sebagai variabel antara memungkinkannya untuk membantu mengungkap hubungan (pengaruh) stratifikasi sosial terhadap pemilihan bahasa.

4.2.4. Variabel Pemilihan Bahasa

Dalam masyarakat multibahasa dan multietnis seseorang anggota masyarakat berkemungkinan menerapkan pemilihan bahasa berikut ini: (1) menggunakan bahasa daerah/pertamanya (divergen); (2) menggunakan bahasa daerah/pertamanya dan bahasa Indonesia (konvergen); dan (3) menggunakan bahasa Indonesia (paling konvergen). Pola pemilihan bahasa semacam ini dapat ditemukan dalam penelitian.

Pola pemilihan bahasa masyarakat Jawa di Perumnas KBD Gresik ditunjukkan oleh responden penelitian ini. Pilihan bahasa yang terbagi menjadi tiga—bahasa Jawa, bahasa Jawa dan bahasa Indonesia, dan bahasa Indonesia—menggambarkan bahwa bahasa Jawa tidak lagi dipilih sebagai bahasa dominan dalam komunikasi, baik resmi maupun santai, dengan partisipan lain dalam situasi dan topik berbeda-beda. Dalam Tabel 4.4 berikut tampak profil pemilihan bahasa yang telah responden tentukan lewat swalapor-nya dalam kuesioner..

Tabel 4.4. Profil Pemilihan Bahasa

Variabel		*Label*	*Jumlah*	*Persen*
Pemilihan Bahasa	1.00	B. Jawa	31	21.53
	2.00	B.Jawa & B. Indonesia	78	54.16
	3.00	B. Indonesia	35	24.30
			144	*100*

Melihat tabel tersebut, bisa dikatakan bahwa mayoritas responden (54.16%) melakukan pencampuran bahasa Jawa dan bahasa Indonesia. Maksudnya, ketika berkomunikasi dengan orang lain dalam situasi-situasi dan topik tertentu, mereka cenderung memakai bahasa Jawa, dibarengi dengan pemakaian bahasa Indonesia.

Sementara itu, responden yang memilih bahasa Jawa sebagai medium komunikasi hanyalah 21.53%---dibanding yang malah memilih bahasa Indonesia yang berjumlah lebih tinggi, yakni 24.30%.

Dalam hal ini mayoritas responden telah mengalami akomodasi sosial dan akomodasi bahasa, dalam kategori konvergen atau paling konvergen. Artinya, responden yang menunjukkan divergensi (menarik diri ke dalam kaidah bahasa dan sistem nilai budaya Jawa) sama sekali tidak seimbang dengan yang beraspirasi keluar atau telah keluar dari kaidah bahasa dan sistem nilai budaya Jawa.

Dalam penelitian ini variabel pemilihan bahasa diperlakukan sebagai variabel tergantung atau *dependent variable* dari variabel bebas di atas, yakni variabel stratifikasi sosial (dalam bidang pendidikan, pekerjaan, penghasilan) dan variabel antara, yakni variabel sikap bahasa, dan variabel kompetensi komunikatif.

4.3. Hasil Uji Univariat: Pengaruh Antar-Variabel

Berikut ini dikemukakan hasil Uji Univariat untuk mengungkap pengaruh antar variabel, yang meliputi delapan buah uji pengaruh: yakni (1) pengaruh stratifikasi sosial terhadap sikap bahasa; (2) pengaruh sikap bahasa terhadap pemilihan bahasa; (3) pengaruh stratifikasi sosial terhadap kompetensi komunikatif; (4) pengaruh kompetensi komunikatif terhadap pemilihan bahasa; (5) Pengaruh stratifikasi sosial terhadap pemilihan bahasa *dengan tidak dimediasi* sikap bahasa dan kompetensi komunikatif; (6) pengaruh stratifikasi sosial terhadap pemilihan bahasa *dengan dimediasi* sikap bahasa dan kompetensi komunikatif secara bersamaan; (7) pengaruh

stratifikasi sosial terhadap pemilihan bahasa *dengan dimediasi* sikap bahasa dan kompetensi komunikatif secara individual; dan (8) perbandingan pengaruh stratifikasi sosial terhadap pemilihan bahasa yang dimediasi sikap bahasa dan yang dimediasi kompetensi komunikatif.

4.3.1. Pengaruh Stratifikasi Sosial terhadap Sikap Bahasa

Uji Univariat (lihat **Lampiran 8**) menunjukkan, bahwa stratifikasi sosial yang direpresentasikan dengan pendidikan, pekerjaan, dan penghasilan mempunyai pengaruh yang sangat signifikan (dengan p= 0.000, dan R Squared=0.637) terhadap sikap bahasa. Jika ditinjau dari tiap sub-variabel, pendidikan dan pekerjaan responden mempunyai pengaruh masing-masing sangat signifikan (dengan p=0.000) dan signifikan (dengan p= 0.019) terhadap sikap bahasanya. Adapun jumlah penghasilan berpengaruh tidak signifikan terhadap sikap bahasanya (dengan p=0.069).

R Squared (R-kwadrat) dimaksudkan untuk melihat kontribusi stratifikasi sosial dalam mempengaruhi sikap bahasa. Ketegorinya adalah kontribusi rendah (r=maksimum 0.29), kontribusi sedang (r=0.3—0.59), kontribusi tinggi (r=0.6—0.79), dan kontribusi mutlak (r=0.8—1). Dengan R-Squared=0.637, stratifikasi sosial memiliki pengaruh terhadap sikap bahasa dengan r = 0.798. Dengan demikian, kontribusinya mutlak.

Pola sikap bahasa secara umum (Grand Mean atau G.M=3.093) mengindikasikan para responden memiliki sikap bahasa netral. Namun, secara rinci hal ini bisa ditinjau dari tiga sub-variabel stratifikasi sosial: yakni pendidikan, pekerjaan, dan penghasilan berikut ini:

Pertama, pendidikan responden berpengaruh signifikan terhadap sikap bahasa. Responden berpendidikan dasar (N=25=17.36%) memiliki sikap bahasa negatif (Mean=2.167), yang berpendidikan menengah (N=56=28.88%) memiliki sikap bahasa netral (Mean=2.940), dan yang berpendidikan tinggi (N=63=43.75%) memiliki sikap bahasa positif (Mean=3.941). Post Hoc Test juga membuktikan, bahwa ada perbedaan pengaruh sangat signifikan (dengan p=0.000) terhadap sikap bahasa antara responden yang berpendidikan dasar dan menengah, dasar dan tinggi, menengah dan tinggi, dan sebaliknya. Dari berbagai variasi perbedaan yang ada, semuanya menunjukkan perbedaan pengaruh yang sangat signifikan.

Kedua, pekerjaan responden juga berpengaruh terhadap sikap bahasa (p=0.019). Responden yang berpekerjaan sebagai tukang/buruh (N=59=40.97%) memiliki sikap bahasa cenderung netral (Mean=2.983), yang berpekerjaan sebagai wirausaha (N=19=13.39%) bersikap bahasa hampir positif (Mean=3.880), yang berpekerjaan sebagai profesional (N=24=16.66) bersikap bahasa negatif tapi mengarah ke netral (Mean=2.620) dan yang pekerjaannya sebagai Pegawai Negeri (N=42=29.16%) cenderung bersikap netral (Mean=2.986). Post Hoc Test juga membuktikan, bahwa hanya dua dari duabelas variasi perbandingan yang menunjukkan perbedaan pengaruh tidak signifikan, yakni antara profesional dan buruh (p=0.973), dan sebaliknya. Dengan kata lain, mayoritas variasi perbandingan jenis pekerjaan menunjukkan perbedaan pengaruh signifikan terhadap sikap bahasa.

Ketiga, penghasilan responden berpengaruh tidak signifikan terhadap sikap bahasa (dengan p=0.069). Responden yang berpenghasilan < Rp 1.000.000

(N=27=18.75%) memiliki sikap bahasa yang mengarah netral (Mean=2.653), yang berpenghasilan Rp 1.000.000--Rp 2.000.000 (N=69=49.92%) bersikap bahasa netral (Mean=2.914), yang berpenghasilan Rp Rp 2.000.500--Rp 3.000.000 (N=32=22.22%) bersikap bahasa netral (Mean=3.235), yang berpenghasilan Rp 3.000.500--Rp 4.000.000 (N=5=3.47%) bersikap bahasa negatif dan mengarah ke netral (Mean=2.778), dan yang berpenghasilan > Rp 4.000.000 (11=6.63%) bersikap bahasa netral dan mengarah ke positif (Mean=3.600). Sementara itu, Post Hoc Test menunjukkan, bahwa rata-rata ada perbedaan pengaruh terhadap sikap antara responden yang berpenghasilan < Rp 1.000.000 dengan yang berpenghasiian Rp 1.000.000--Rp 2.000.000, Rp Rp 2.000.500--Rp 3.000.000, Rp 3.000.500--Rp 4.000.000, dan > Rp 4.000.000. Jika hal ini diperhatikan, perbedaan pengaruhnya hanya sedikit.

Adapun variasi-variasi lain uji antar subvariabel terhadap sikap bahasa menunjukkan pengaruh tidak signifikan. Penghasilan terkait pekerjaan, penghasilan terkait pendidikan, pekerjaan terkait pendidikan, penghasilan terkait pekerjaan terkait pendidikan memiliki pengaruh terhadap kompetensi komunikatif secara tidak signifikan— masing-masing dengan p=0.302, 0.727, 0.371, dan 0.152 yang semuanya melampaui alfa 0.05.

4.3.2. Pengaruh Sikap Bahasa terhadap Pemilihan Bahasa

Uji Univariat (lihat **Lampiran** 9) menunjukkan, bahwa sikap bahasa responden berpengaruh sangat signifikan (pada p=0.000, dan R Squared= 0.348 atau r=0.590) terhadap perilaku pemilihan bahasa. Kontribusinya sedang. Akan tetapi,

sikap bahasa negatif dan netral terhadap bahasa Jawa yang pengaruhnya sangat signifikan (p=0.000) dan signifikan (p=0.017) terhadap pemilihan bahasa. Sedangkan sikap positif dan sangat positif memberikan pengaruh tidak signifikan.

Pola pemilihan bahasa secara umum (Grand Mean=2.061) mengindikasikan para responden menggunakan campuran bahasa Jawa (lebih dominan) dan bahasa Indonesia (kurang dominan). Secara rinci dapat dikemukakan, responden yang bersikap negatif terhadap bahasa Jawa (N=53=36.80%) menunjukkan pola pemilihan bahasa penggunaan bahasa Jawa yang mengarah ke penggunaan bahasa Indonesia (Mean=1.622). Untuk responden yang bersikap netral (N=40=27.78%), positif (N=32=22.22%), dan sangat positif (N=19=13.19%), pemilihan bahasanya jatuh pada campuran bahasa Jawa (lebih dominan) dan bahasa Indonesia (kurang dominan), masing-masing dengan Mean=2.025, 2.281, dan 2.316. Hal ini mengindikasikan, bahwa lebih dari sepertiga responden yang kurang menghargai bahasa Jawa, sehingga enggan untuk menggunakannya dalam komunikasi. Yang paling kentara, kebanyakan mereka mencari posisi aman, dengan berlindung di bawah bendera nasionalisasi bahasa Indonesia, yakni melakukan pencampuran penggunaan bahasa Jawa dan bahasa Indonesia—kendati bahasa Jawa masih lebih dominan.

Perbedaan sikap bahasa yang menimbulkan perbedaan pola pemilihan bahasa ditunjukkan dengan Post Hoc Test. Dengan perbandingan *mean difference* sikap bahasa responden, tampak bahwa ada perbedaan pengaruh terhadap pemilihan bahasa antara sikap bahasa negatif dan netral, antara sikap negatif dan positif, dan antara sikap negatif dan sangat positif. Demikian pula dengan sejumlah variasi perbandingan

silang, dengan p yang berbeda-beda tetapi masih dalam status signifikan. Dari berbagai variasi perbandingan yang ada, hanya perbandingan sikap positif dan sangat positif-lah (atau sebaliknya) yang tidak mempunyai perbedaan—dengan p=0.782.

4.3.3. Pengaruh Stratifikasi Sosial terhadap Kompetensi Komunikatif

Uji Univariat (lihat **Lampiran 10**) menunjukkan, bahwa stratifikasi sosial yang direpresentasikan dengan sub-variabel pendidikan, pekerjaan, dan penghasilan mempunyai pengaruh yang sangat signifikan (dengan p= 0.000, dan R Squared=0.703 atau r=0.838) terhadap kompetensi komunikatif. Kontribusinya mutlak. Jika ditinjau dari tiap sub-variabel, pendidikan dan pengasilan responden mempunyai pengaruh masing-masing sangat signifikan (p=0.000) dan signifikan (p=0.017) terhadap kompetensi komunikatifnya. Adapun jenis pekerjaan berpengaruh tidak signifikan terhadap kompetensi komunikatifnya (p=0.080).

Pola kompetensi komunikatif secara umum (Grand Mean atau G.M=3.181) mengindikasikan bahwa para responden memiliki kompetensi komunikatif cukup. Namun, secara rinci hal ini bisa ditinjau dari tiga sub-variabel: pendidikan, pekerjaan, dan penghasilan berikut ini:

Pertama, pendidikan responden berpengaruh signifikan terhadap kompetensi komunikatif. Responden berpendidikan dasar (N=25=17.36%) memiliki kompetensi komunikatif yang rendah (Mean=2.250), yang berpendidikan menengah (N=56= 28.88%) memiliki kompetensi komunikatif yang cukup (Mean=2.939), dan yang berpendidikan tinggi (N=63=43.75%) memiliki kompetensi komunikatif baik (Mean=4.120). Post Hoc Test juga membuktikan, bahwa ada perbedaan pengaruh

sangat signifikan (dengan p=0.000) terhadap kompetensi komunikatif antara pendidikan dasar dan menengah, dasar dan tinggi, menengah dan tinggi, dan sebaliknya. Dari berbagai variasi perbedaan yang ada, semuanya menunjukkan perbedaan pengaruh yang sangat signifikan.

Kedua, penghasilan responden juga berpengaruh terhadap kompetensi komunikatifnya. Responden yang berpenghasilan < Rp 1.000.000 (N=27=18.75%) memiliki kompetensi komunikatif yang rendah (Mean=2.250), yang berpenghasilan Rp 1 000.000--Rp 2.000.000 (N=69=49.92%) memiliki kompetensi komunikatif yang cukup (Mean=2.939), yang berpenghasilan Rp Rp 2.000.500--Rp 3.000.000 (N=32=22..22%) memiliki kompetensi komunikatif yang cukup baik (Mean=3.448), yang berpenghasilan Rp 3.000.500--Rp 4.000.000 (N=5=3.47%) memiliki kompetensi komunikatif yang cukup (Mean=2.889), dan yang berpenghasilan > Rp 4.000.000 memiliki kompetensi komunikatif yang tinggi (Mean=3.600). Post Hoc Test juga membuktikan, antara penghasilan rendah, sedang, dan tinggi dan sebaliknya, dengan berbagai variasinya, kebanyakan memberikan pengaruh signifikan terhadap kompetensi komunikatif. Hanya seperlima dari 20 variasi perbandingan (40%) yang menunjukkan perbedaan pengaruh tidak signifikan.

Ketiga, pekerjaan responden berpengaruh tidak signifikan terhadap kompetensi komunikatif. Responden yang berpekerjaan sebagai tukang/buruh (N=59=40.97%) memiliki kompetensi komunikatif cukup (Mean=3.042), yang berpekerjaan sebagai wirausaha (N=19=13.39%) berkompetensi komunikatif baik (Mean=3.880), yang berpekerjaan sebagai profesional (N=24=16.66) berkompetensi komunikatif cukup

(Mean=2.940) dan yang pekerjaannya sebagai Pegawai Negeri (N=42=29.16%) berkompetensi komunikatif cukup (Mean=2.986). Post Hoc Test juga membuktikan, bahwa yang perbedaan pengaruhnya signifikan terhadap kompetensi komunikatif adalah hanyalah antara Pegawai Negeri dan buruh, profesional dan wirausaha, profesional dan buruh, wirausaha dan buruh. Selebihnya, dari 12 variasi perbandingan, tiada perbedaan pengaruh.

Adapun variasi-variasi lain uji antyar sub-variabel terhadap kompetensi komunikatif juga menunjukkan pengaruh tidak signifikan. Penghasilan terkait pekerjaan, penghasilan terkait pendidikan, pekerjaan terkait pendidikan, penghasilan terkait pekerjaan terkait pendidikan memiliki pengaruh terhadap kompetensi komunikatif secara tidak signifikan— masing-masing dengan p=0.133, 0.086, 0.886, dan 0.163 yang tentu saja melampaui alfa 0.05

4.3.4. Pengaruh Kompetensi Komunikasi terhadap Pemilihan Bahasa

Uji Univariat (lihat **Lampiran 11**) menunjukkan, bahwa kompetensi komunikatif responden berpengaruh sangat signifikan (pada p=0.000, dengan R Squared= 0.514 atau r=0.717) terhadap perilaku pemilihan bahasa. Kontribusinya tinggi. Baik kompetensi komunikatif rendah (sedikit) maupun cukup, apalagi baik, mempengaruhi pemilihan bahasa secara sangat signifikan, masing-masing pada p=0.000.

Pola pemilihan bahasa secara umum (Grand Mean=2.120) mengindikasikan para responden menggunakan campuran atau campur kode antara bahasa Jawa (lebih dominan) dan bahasa Indonesia (kurang dominan), kecuali jika kompetensi

pengaruh yang sangat signifikan (dengan p= 0.001, dan R Squared=0.472 atau r=0.687) terhadap pemilihan bahasa. Jika ditinjau dari tiap sub-variabel, pendidikan, penghasilan, dan pekerjaan responden mempunyai pengaruh signifikan masing-masing dengan p =0.007, 0.010, dan 0.012 terhadap pemilihan bahasanya.

Pola pemilihan bahasa secara umum (G.M=1.959) mengindikasikan bahwa para responden cenderung memiliki pemilihan bahasa campuran antara bahasa Jawa dan bahasa Indonesia. Namun, secara rinci hal ini bisa ditinjau dari tiga sub-variabel: pendidikan, pekerjaan, dan penghasilan berikut ini:

Pertama, pendidikan responden berpengaruh signifikan terhadap pemilihan bahasa. Responden berpendidikan dasar (N=25=17.36%) memilih bahasa Jawa yang mengarah ke campuran bahasa Jawa dan bahasa Indonesia (Mean=1.781), yang berpendidikan menengah (N=56=28.88%) memilih bahasa cenderung campuran bahasa Jawa dan bahas Indonesia (Mean=1.832), dan yang berpendidikan tinggi (63=43.75%) memiliki pemilihan bahasa campuran bahasa Jawa dan bahasa Indonesia (Mean=2.219). Post Hoc Test juga membuktikan, bahwa ada perbedaan pengaruh sangat signifikan (dengan p=0.000) terhadap pemilihan bahasa antara pendidikan dasar dan tinggi, menengah dan tinggi, tinggi dan dasar, dan tinggi dan menengah. Adapun variasi pendidikan dasar dan mengah atau menengah dan dasar, tidak menunjukkan perbedaan pengaruh (p=0.686).

Kedua, penghasilan responden juga berpengaruh terhadap pemilihan bahasanya. Responden yang berpenghasilan < Rp 1.000.000 (N=27=18.75%) menempuh pemilihan bahasa Jawa yang mengarah ke campuran bahasa Jawa dan

bahasa Indonesia (Mean=1.606), yang berpenghasilan Rp 1.000.000--Rp 2.000.000 (N=69=49.92%) hampir selalu memilih campuran bahasa Jawa dan bahasa Inonesia (Mean=1.907), dan medikian halnya dengan yang berpenghasilan Rp 3.000.500--Rp 4.000.000 (N=5=3.47%) dengan Mean=1.889. Adapun responden yang berpenghasilan Rp Rp 2.000.500--Rp 3.000.000 (N=32=22..22%) memiliki pemilihan bahasa yang benar-benar campurabn bahasa Jawa dan bahasa Indonesia. Kemudian, yang berpenghasilan > Rp 4.000.000 memilih bahasa campuran bahasa Jawa dan Bahasa Idonwesia (Mean=2.110). Post Hoc Test juga membuktikan, antara responden berpenghasilan rendah, sedang, dan tinggi dan sebaliknya, dengan berbagai variasinya, separuh dari 20 variasi perbandingan (50%) yang menunjukkan perbedaan pengaruh tidak signifikan, misalnya antara Rp 1.000.000--Rp 2.000.000 dan Rp 3.000.500--Rp 4.000.000, atau Rp 1.000.000--Rp 2.000.000 dan > Rp 4.000.000, atau antara Rp 3.000.500--Rp 4.000.000 dan > Rp 4.000.000.

Ketiga, pekerjaan responden berpengaruh signifikan terhadap pemilihan bahasa (p=0.012). Responden yang berpekerjaan sebagai tukang/buruh (N=59=40.97%) memilih campuran bahasa Jawa dan bahasa Indonesia (Mean=2.014), yang berpekerjaan sebagai wirausaha (N=19=13.39%) selalu memilih campuran bahasa Jawa dan bahasa Inonesia (Mean=2.296), yang berpekerjaan sebagai profesional (N=24=16.66) dan Pegawai Negeri (N=42=29.16%) cenderung memilih campuran bahasa Jawa dan bahasa Indonesia, masing-masing dengan Mean (1.778) dan (1.811). Yang menarik adalah Post Hoc Test membuktikan, bahwa hanya ada sepertiga (33,33%) dari 12 variasi perbandingan yang menunjukkan perbedaan

MILIK
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA

pengaruh signifikan, misalnya antara profesional dan wirausaha (p=0.035), antara wirausaha dan buruh (p =0.014), atau sebaliknya.

Adapun variasi-variasi lain uji antar sub-variabel variabel terhadap pemilihan bahasa menunjukkan pengaruh tidak signifikan. Penghasilan terkait pekerjaan, penghasilan terkait pendidikan, pekerjaan terkait pendidikan, penghasilan terkait pekerjaan terkait pendidikan memiliki pengaruh tidak signifikan terhadap pemilihan bahasa— masing-masing dengan p=0.321, 0.184, 0.469, dan 0.235 yang tentu saja melampaui 0.05.

Dengan demikian dapatlah disimpulkan bahwa di antara sub-variabel stratifikasi sosial, *pendidikan*-lah yang paling dominan pengaruhnya terhadap pemilihan bahasa, kemudian disusul oleh *penghasilan*, dan *pekerjaan*.

4.3.6. Pengaruh Stratifikasi Sosial terhadap Pemilihan Bahasa *dengan Mediasi* Sikap Bahasa dan Kompetensi Komunikatif secara Bersamaan

Untuk menemukan pengaruh stratifikasi sosial terhadap pemilihan bahasa *dengan mediasi* sikap bahasa dan kompetensi komunikatif, ada dua tahap uji pengaruh: yakni uji pengaruh stratifikasi sosial terhadap gabungan sikap bahasa-kompetensi komunikatif ("modal komunikatif"), dan uji pengaruh "modal komunikatif" terhadap pemilihan bahasa. Hasilnya dirata-rata untuk memperoleh nilai korelasi r-Z1Z2.

- ***Pengaruh Stratifikasi Sosial terhadap "Modal Komunikatif"***

Uji Univariat (lihat **Lampiran 13**) menunjukkan, bahwa stratifikasi sosial yang direpresentasikan dengan sub-variabel pendidikan, pekerjaan, dan penghasilan

mempunyai pengaruh yang sangat signifikan (dengan p= 0.000, dan R Squared=0.684 atau r=0.827) terhadap "modal komunikatif". Kontribusinya mutlak. Jika ditinjau dari tiap sub-variabel, pendidikan dan pengasilan responden mempunyai pengaruh masing-masing sangat signifikan (p=0.000) dan signifikan (p=0.007). Adapun jenis pekerjaan berpengaruh tidak signifikan terhadap "modal komunikatif"nya (p=0.077).

Pola modal komunikatif secara umum (Grand Mean atau G.M=3.287) mengindikasikan bahwa para responden memiliki "modal komunikatif" lebih dari sedang. Namun, secara rinci hal ini bisa ditinjau dari tiga sub-variabel: pendidikan, pekerjaan, dan penghasilan berikut ini:

Pertama, pendidikan responden berpengaruh signifikan terhadap "modal komunikatif". Responden berpendidikan dasar (N=25=17.36%) memiliki modal komunikatif yang rendah (Mean=2.250), yang berpendidikan menengah (N=56= 28.88%) memiliki modal komunikatif yang cukup (Mean=3.081), dan yang berpendidikan tinggi (N=63=43.75%) memiliki modal komunikatif baik (Mean=4.270). Post Hoc Test juga membuktikan, bahwa ada perbedaan pengaruh sangat signifikan (dengan p=0.000) terhadap modal komunikatif antara pendidikan dasar dan menengah, dasar dan tinggi, menengah dan tinggi, dan sebaliknya. Dari berbagai variasi perbedaan yang ada, semuanya menunjukkan perbedaan pengaruh yang sangat signifikan.

Kedua, pekerjaan responden berpengaruh signifikan terhadap modal komunikatif. Responden yang berpekerjaan sebagai tukang/buruh (N=59=40.97%) memiliki modal komunikatif cukup (Mean=3.159), yang berpekerjaan sebagai

wirausaha (N=19=13.39%) bermodal komunikatif baik (Mean=4.046), yang berpekerjaan sebagai profesional (N=24=16.66) bermodal komunikatif cukup (Mean=2.921) dan yang pekerjaannya sebagai Pegawai Negeri (N=42=29.16%) bermodal komunikatif cukup (Mean=3.142). Post Hoc Test membuktikan, bahwa mayoritas variasi perbandingan pengaruh terhadap modal komunikatif antara pekerjaan satu dan lainnya cukup jelas.

Ketiga, penghasilan responden berpengaruh tidak signifikan terhadap modal komunikatifnya. Responden yang berpenghasilan < Rp 1.000.000 (N=27=18.75%) memiliki modal komunikatif yang kurang (Mean=2.250), yang berpenghasilan Rp 1.000.000--Rp 2.000.000 (N=69=49.92%) memiliki modal komunikatif yang cukup (Mean=2.939), yang berpenghasilan Rp Rp 2.000.500--Rp 3.000.000 (N=32=22..22%) memiliki modal komunikatif yang cukup mengarah ke baik (Mean=3.448), yang berpenghasilan Rp 3.000.500--Rp 4.000.000 (N=5=3.47%) memiliki modal komunikatif yang cukup (Mean=2.889), dan yang berpenghasilan > Rp 4.000.000 memiliki modal komunikatif yang cukup baik (Mean=3.600). Post Hoc Test juga membuktikan, kebanyakan variasi perbandingan pekerjaan mengindikasikan perbedaan pengaruh cukup signifikan.

Adapun variasi-variasi lain uji antar sub-variabel stratifikasi sosial terhadap modal komunikatif menunjukkan pengaruh tidak signifikan. Penghasilan terkait pekerjaan, penghasilan terkait pendidikan, pekerjaan terkait pendidikan, penghasilan terkait pekerjaan terkait pendidikan memiliki pengaruh terhadap kompetensi

komunikatif secara tidak signifikan— masing-masing dengan p=0.091, 0.086, 0.129, dan 0.538 yang tentu saja melampaui alfa 0.05.

- ***Pengaruh "Modal Komunikatif" terhadap Pemilihan Bahasa***

Uji Univariat (**lihat Lampiran 14**) menunjukkan, bahwa modal komunikatif responden berpengaruh sangat signifikan (pada p=0.000, dengan R Squared= 0.395 r=0628) terhadap pemilihan bahasa. Kontribusinya tinggi. Akan tetapi, baik kompetensi komunikatif rendah (sedikit) maupun cukup, apalagi baik, mempengaruhi pemilihan bahasa secara sangat signifikan, masing-masing pada p=0.000.

Pola pemilihan bahasa secara umum (Grand Mean=2.041) mengindikasikan para responden menggunakan campuran atau campur kode antara bahasa Jawa dan bahasa Indonesia. Secara rinci dapat dikemukakan, responden yang bermodal komunikatif kurang (N=50=34.72%) menunjukkan pola pemilihan bahasa dengan Mean=1.6000, yakni penggunaan bahasa Jawa yang mengarah ke penggunaan bahasa Indonesia. Untuk responden yang bermodal komunikatif sedang (N=28=19.44%), dan bermodal komunikatif baik (N=49=34.02%), pemilihan bahasanya jatuh pada campuran bahasa Jawa dan bahasa Indonesia, masing-masing dengan Mean=2.038 dan 2.025. Adapun responden yang bermodal komunikatif sangat baik (N=17=11.80%) pemilihan bahasanya masih campuran bahasa Jawa dan bahasa Indonesia tapi lebih mengarah ke bahasa Indonesia (Mean=2.500).

Perbedaan modal komunikatif yang menimbulkan perbedaan pola pemilihan bahasa ditunjukkan dengan Post Hoc Test. Dengan perbandingan *mean difference* tingkat modal komunikatif responden, tampak bahwa ada perbedaan pengaruh yang

variabel (sikap bahasa atau kompetensi komunikatif) antara "nilai pengaruh tak

sosial terhadap pemilihan bahasa melalui sikap bahasa adalah sebesar r=0.798. Juga ditemukan dalam analisis pada butir 4.3.2, bahwa nilai pengaruh sikap bahasa terhadap pemilihan bahasa adalah sebesar r=0.590. Dengan demikian, penjumlahan rerata dari dua hasil uji pengaruh itu adalah 0.694. Dengan kata lain, nilai pengaruh stratifikasi sosial terhadap pemilihan bahasa melalui sikap bahasa adalah sebesar 0.694.

Sementara itu, dalam analisis pada butir 4.3.3 ditemukan, bahwa nilai pengaruh stratifikasi sosial terhadap kompetensi komunikatif, atau nilai pengaruh tak langsung stratifikasi sosial terhadap pemilihan bahasa melalui kompetensi komunikatif adalah sebesar r=0.838. Juga ditemukan dalam analisis pada butir 4.3.4, bahwa nilai pengaruh kompetensi komunikatif terhadap pemilihan bahasa adalah sebesar r=0.717. Dengan demikian, penjumlahan rerata dari dua hasil uji pengaruh itu adalah 0.778. Dengan kata lain, nilai pengaruh stratifikasi sosial terhadap pemilihan bahasa melalui kompetensi komunikatif adalah sebesar 0.778.

4.3.8. Perbandingan Pengaruh Stratifikasi Sosial terhadap Pemilihan Bahasa yang Dimediasi Sikap Bahasa atau Kompetensi Komunikatif

Untuk memperoleh perbandingan pengaruh stratifikasi sosial terhadap pemilihan bahasa yang dimediasi sikap bahasa dan yang dimediasi kompetensi komunikatif, dapat didasarkan pada hasil uji pengaruh butir 4.3.7. Sebagaimana telah ditemukan, nilai pengaruh stratifikasi sosial terhadap pemilihan bahasa melalui sikap bahasa adalah sebesar 0.694. Sementara itu, nilai pengaruh stratifikasi sosial terhadap pemilihan bahasa melalui kompetensi komunikatif adalah sebesar 0.778.

Berdasarkan temuan tersebut, dapatlah disimpulkan bahwa pengaruh stratifikasi sosial terhadap pemilihan bahasa melalui kompetensi komunikatif lebih besar dari pada melalui sikap bahasa. Hal ini sekaligus membuktikan bahwa kompetensi komunikatif merupakan variabel antara yang lebih kuat dibandingkan dengan sikap bahasa.

4.4. Hasil Akhir Uji Pengaruh Stratifikasi Sosial terhadap Pemilihan Bahasa

Setelah melakukan beberapa variasi uji pengaruh, peneliti menyajikan ringkasan atau hasil akhirnya berikut ini, dengan harapan dapat disajikan suatu pemetaan komprehensif. Hasil selengkapnya divisualisasikan dalam Tabel 4.5.

Stratifikasi sosial dalam pendidikan, pekerjaan, dan penghasilan berpengaruh sangat signifikan (p= 0.000, dan R Squared=0.637 atau r=0.798) terhadap sikap bahasa. Pengaruh pendidikan sangat signifikan, dan pekerjaan signifikan, sedangkan penghasilan tidak signifikan. Sementara, sikap bahasa responden berpengaruh sangat signifikan (p=0.000, dan R Squared= 0.348 atau r=0.590) terhadap pemilihan bahasa. Namun, hanya sikap bahasa negatif dan netral yang pengaruhnya sangat (sangat) signifikan.

Stratifikasi sosial juga berpengaruh sangat signifikan (dengan p= 0.000, dan R Squared=0.703 atau r=0.838) terhadap kompetensi komunikatif. Pengaruh pendidikan sangat signifikan, dan pengasilan signifikan, sedangkan pekerjaan tidak signifikan. Sementara, kompetensi komunikatif responden berpengaruh sangat signifikan (pada p=0.000, dengan R Squared= 0.514 atau r = 0.717) terhadap pemilihan bahasa. Baik

kompetensi komunikatif rendah maupun cukup, apalagi baik, mempengaruhi pemilihan bahasa secara sangat signifikan.

Tabel 4.5: Rekapitulasi Uji Pengaruh Variabel

Stratifikasi Sosial	*Label*	*Sikap Bahasa*	*Kompetensi Komunikatif*	*Modal Komunikatif*	*Pemilihan Bahasa*
		R=0.789 GM=3.093 (N)	R=0.838 GM=3.181 (C)	R=0.827 GM=3.287 (C+)	R=0.687 GM=1.987 (BJ+BI)
Pendidikan	Dasar	Negatif	Rendah	Rendah	BJ ke (BJ + BI)
	Menengah	Netral	Cukup	Cukup	- (BJ + BI)
	Tinggi	Positif	Baik	Baik	(BJ + BI)
Pekerjaan	Buruh	(-) Netral	Cukup	Cukup	(BJ + BI)
	Wirausaha	(-) Positif	Baik	Baik	(BJ + BI)
	Profesional	Netral	Cukup	Cukup	- (BJ + BI)
	Peg. Negeri	Netral	Cukup	Cukup	- (BJ + BI)
Penghasilan	< Rp 1.000.000	Netral	Rendah	Rendah	- (BJ + BI)
	Rp 1 juta--2 juta	Netral	Cukup	Cukup	(BJ + BI)
	Rp Rp 2,0005 juta--3 juta	Netral	Cukup (+)	Cukup (+)	(BJ + BI)
	Rp 3, 0005 juta--4 juta	(-) netral	Cukup	Cukup	- (BJ + BI)
	> Rp 4 juta	Netral (+)	Tinggi	Tinggi	(BJ + BI)
		Penghasilan tak signifikan	Pekerjaan tak signifikan	Pekerjaan tak signifikan	
		Z1-Y=0.590	Z2-Y=0.717	MK-Y=0.628	
		X-Z1-Y=0.694	X-Z2-Y=0.778	X-MK-Y =0.728	

Keterangan: BJ = Bahasa Jawa
(BJ + BI)= Campuran Bahasa Jawa-Bahasa Indonesia
Tanda (-) = hampir atau mengarah ke
Tanda (+)= lebih dari

Stratifikasi sosial berpengaruh sangat signifikan (p= 0.001, dan R Squared=0.472 atau r = 0.687) terhadap pemilihan bahasa. Pendidikan, penghasilan, dan pekerjaan responden berpengaruh signifikan. Pola pemilihan bahasa secara

umum (G.M=1.959) mengindikasikan kecenderungan pemilihan bahasa campuran (bahasa Jawa dan bahasa Indonesia).

Selanjutnya, pengaruh stratifikasi sosial terhadap variabel antara ("modal komunikatif") sebesar r=0.827, dan bahwa pengaruh modal komunikatif terhadap pemilihan bahasa sebesar r=0.628. Nilai rata-rata dari penjumlahan dua uji pengaruh ini sebesar r-Z1Z2 = 0.728. Dengan demikian, nilai pengaruh stratifikasi sosial terhadap pemilihan bahasa *dengan mediasi* sikap bahasa dan kompetensi komunikatif (=modal komunikatif) adalah sebesar 0.728.

Sementara itu, nilai pengaruh stratifikasi sosial terhadap kompetensi komunikatif, atau nilai pengaruh tak langsung stratifikasi sosial terhadap pemilihan bahasa melalui kompetensi komunikatif r=0.838. Juga ditemukan, bahwa nilai pengaruh kompetensi komunikatif terhadap pemilihan bahasa sebesar r=0.717. Penjumlahan rerata dari dua hasil uji pengaruh itu adalah 0.778. Dengan kata lain, nilai pengaruh stratifikasi sosial terhadap pemilihan bahasa melalui kompetensi komunikatif adalah 0.778.

Nilai pengaruh stratifikasi sosial terhadap pemilihan bahasa melalui sikap bahasa sebesar 0.694. Sementara itu, nilai pengaruh stratifikasi sosial terhadap pemilihan bahasa melalui kompetensi komunikatif sebesar 0.778. Berdasarkan temuan ini, dapat disimpulkan bahwa pengaruh stratifikasi sosial terhadap pemilihan bahasa melalui kompetensi komunikatif lebih besar dari pada melalui sikap bahasa. Dengan kata lain, kompetensi komunikatif mempunyai potensi lebih besar untuk mempengaruhi pemilihan bahasa daripada sikap bahasa. Jika ditelusur lebih jauh,

faktor intralinguistik berpengaruh lebih kuat daripada faktor ekstralinguistik terhadap pemilihan bahasa. Hal ini masuk di akal ketika dicermati, bahwa kompetensi komunikatif pada dasarnya merupakan "bahan dasar" atau *knowledge baggage* seseorang untuk melakukan komunikasi dengan orang lain. Kompetensi mengacu pada pemahaman seseorang tentang sistem kaidah, pada manusia yang diabstraksikan dari batasan-batasan kontekstual, pada yang Ideal. 'Kompetensi komunikatif' meliputi pengetahuan (*knowledge*) yang penutur-pendengar miliki tentang apa yang mendasari perilaku bahasa (*language behavior*) atau perilaku tutur (*speech behavior*) yang tepat dan benar. dan tentang apa yang membentuk perilaku bahasa yang efektif dalam kaitannya dengan tujuan-tujuan komunikatif. Karena itu, ia mencakup pengetahuan linguistik dan pengetahuan pragmatik.

Sementara itu, sikap bahasa, yang merupakan faktor esktralinguistik, bertindak sebagai pelengkap bagi seseorang untuk melakukan komunikasi dengan orang lain itu. Sikap bahasa hanya memberikan kecenderungan seseorang untuk menunjukkan perilaku tertentu dalam berbahasa

Dengan demikian, stratifikasi sosial dan pemilihan bahasa, terkait dengan kompetensi komunikatif, memiliki hubungan yang erat. Artinya, seseorang yang berasal dari strata sosial tinggi, dan memiliki kompetensi komunikatif tinggi, berkemungkinan besar untuk memilih bahasa yang berprestise. Karena bahasa Indonesia sudah dianggap sebagai bahasa yang berstrata tingi dan berprestise, maka orang Jawa yang berbahasa Indonesia hakikatnya berupaya memasuki wilayah modern dan bergengsi.

Jika rekapitulasi hasil uji pengaruh antar variabel tersebut disederhanakan dan dimasukkan ke dalam skema kerangka konseptual, maka diperoleh pemetaannya pada Skema 4.1 dan 4.2.

Skema 4.1. Pemetaan Hasil Uji Pengaruh (Bagian 1)

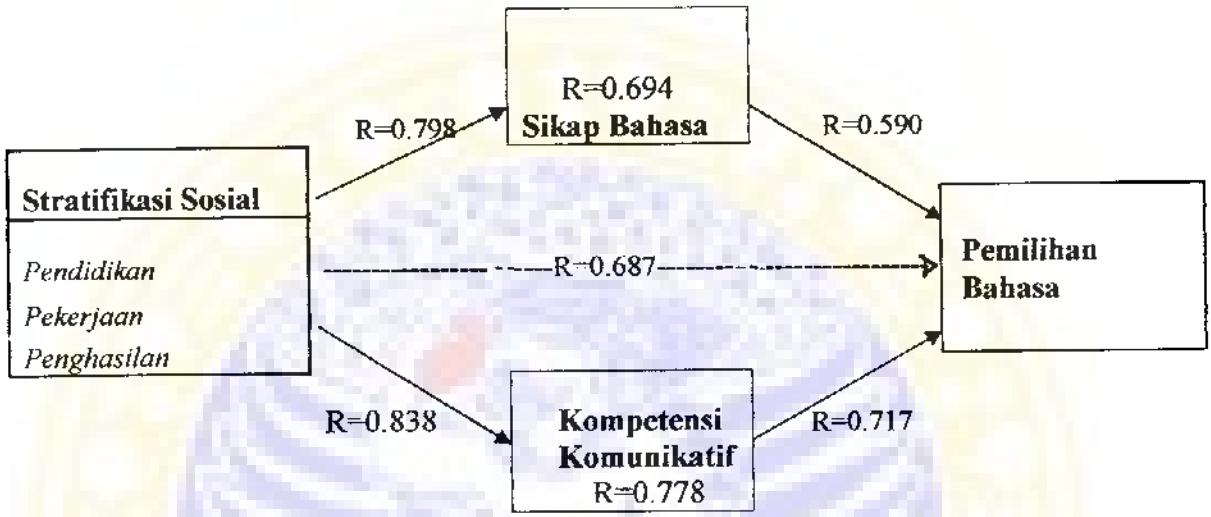

Skema 4.2. Pemetaan Hasil Uji Pengaruh (Bagian 2)

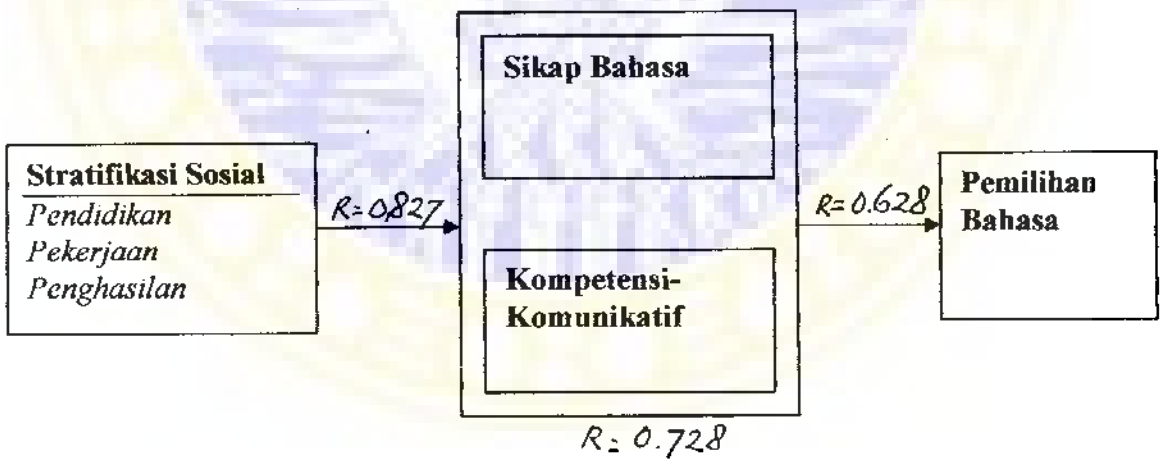

Karena pengaruh stratifikasi sosial terhadap pemilihan bahasa tanpa melalui sikap bahasa dan kompetensi sebesar r=0.687; karena pengaruh stratifikasi sosial

terhadap pemilihan bahasa melalui "modal komunikatif" sebesar r=0.728; karena pengaruh stratifikasi sosial terhadap pemilihan bahasa melalui sikap bahasa sebesar 0.694; dan karena pengaruh stratifikasi sosial terhadap pemilihan bahasa melalui kompetensi komunikatif sebesar 0.778—maka dapat ditarik kesimpulan, bahwa pengaruh stratifikasi sosial terhadap pemilihan bahasa tanpa melalui sikap bahasa dan kompetensi komunikatif, baik secara bersamaan maupun secara invidual (sendiri-sediri), lebih kecil dari pada yang melalui kedua variabel tersebut. Dengan demikian, kehadiran *intervering variables* berupa sikap bahasa dan kompetensi cukup penting untuk membantu mengungkap pengaruh stratifikasi sosial terhadap pemilihan bahasa masyarakat Jawa di Perumnas KBD Gresik.